



Pemerintah Kabupaten Magetan



LPPD

2022



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022**

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Jawa Timur 63314



magetan.go.id



(0351) 895043



pemerintahan.setda@magetan.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Magetan Tahun 2022.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 didasari oleh Surat Menteri dalam Negeri tanggal 19 Desember 2022 Nomor 120.2.2.7/9136/OTDA tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sejalan dengan visi kabupaten Magetan yaitu “Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera ” dimana Masyarakat Magetan yang SMART merupakan kepanjangan dari Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (enterpreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Penyusunan LPPD ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif dan sekaligus dapat dijadikan obyek evaluasi secara lengkap tentang Kinerja Pemerintahan Daerah khususnya Kabupaten Magetan, sehingga dapat dilakukan pemetaan Langkah-langkah strategis bagi perbaikan Kabupaten Magetan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan, sehingga dapat menjadi lebih baik di setiap tahunnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karuniaNya kepada kita semua. Aamiin.

Magetan, Maret 2023

BUPATI MAGETAN

Dr.Drs. H. SUPRAWOTO, SH, M.Si



DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
 Bab I	 Pendahuluan	 1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.1.1 Penjelasan Umum	1
	1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	8
	1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	16
Bab II	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	19
	2.1 Capaian Kinerja Makro	19
	2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	19
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	38
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	67
	2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	81
	2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	83
Bab III	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	145
	1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	145
	2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	145
	3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	147
	3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah.....	147
	3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah	153
	3.3 Permasalahan dan Kendala.....	153
	3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	153
Bab IV	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	154
	4.1 Urusan Pendidikan.....	154
	4.2 Urusan Kesehatan.....	157
	4.3 Urusan Pekerjaan Umum	166
	4.4 Tugas Perumahan Rakyat	168
	4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	172
	4.6 Urusan Sosial.....	177



Bab V	Penutup	182
-------	---------------	-----



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Luas Kecamatan di Kabupaten Magetan.....	1
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan.....	2
Tabel 1.3	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT Kabupaten Magetan.....	3
Tabel 1.4	Jumlah Perangkat daerah dan total pegawai Kabupaten Magetan.....	4
Tabel 1.5	Realisasi APBD	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magetan	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	19
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	67
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	51
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2022.....	80
Tabel 2.6	Anggaran Program Kabupaten Magetan Tahun 2022	81
Tabel 2.7	Rekapitulasi Capaian Kinerja Kabupaten Magetan Tahun 2022	86
Tabel 2.8	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	88
Tabel 2.9	Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD	89
Tabel 2.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	92
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan	139
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan	142
Tabel 4.1	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.....	145
Tabel 4.2	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.....	146
Tabel 4.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	147
Tabel 4.4	Rekapitulasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan triwulan IV Tahun 2022	148
Tabel 4.5	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Magetan Tahun 2022	150
Tabel 4.6	Realisasi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan 2022	155
Tabel 4.7	Alokasi Dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan .	155
Tabel 4.8	Personel Pendukung pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum	156
Tabel 4.9	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan	156
Tabel 4.10	Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan Tahun 2022	157



Tabel 4.11	Alokasi Dana Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Magetan Tahun 2022	158
Tabel 4.12	Jumlah personil pada Standar Pelayanan Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Magetan Tahun 2022.....	158
Tabel 4.13	Alokasi Dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	160
Tabel 4.14	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2022.....	162
Tabel 4.15	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2022.....	163
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2022	164
Tabel 4.17	Dukungan Personel Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2022	164



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Magetan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung Barat Propinsi Jawa Timur, dengan posisi berada pada 7°38'30" Lintang Selatan dan 111°20'30" Bujur Timur. Batas-batas administrasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi
- Sebeleh Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Berdasarkan lokasinya, Kabupaten Magetan termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Madiun dan sekitarnya. Magetan merupakan Kabupaten terkecil ke-dua se-Jawa Timur, setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh berdasarkan penghitungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten wilayah Kabupaten Magetan untuk luas wilayah 688,847 dengan pembulatan 688,84 KM².

a. Undang-undang pembentukan daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya danDati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

b. Data geografis wilayah

Batas-batas administrasi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi
- Sebeleh Timur : Kabupaten Madiun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Wilayah administrasi Kabupaten Magetan terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu:

Tabel 1.1
Luas Kecamatan di Kabupaten Magetan

No	Nama Kecamatan	Luas (KM2)
1	Poncol	51,31
2	Parang	71,64
3	Lembeyan	54,85



No	Nama Kecamatan	Luas (KM2)
4	Takeran	25,46
5	Nguntoronadi	16,72
6	Kawedanan	39,45
7	Magetan	21,41
8	Ngariboyo	39,13
9	Plaosan	66,09
10	Sidorejo	39,15
11	Panekan	64,23
12	Sukomoro	33,05
13	Bendo	42,90
14	Maospati	25,26
15	Karangrejo	15,15
16	Karas	35,29
17	Barat	22,72
18	Kartoharjo	25,03
Jumlah luas wilayah		688.84

- Sumber : Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2022

c. Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan berdasarkan data dari Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2020 oleh BPS adalah sebanyak 674.133 jiwa, terdiri dari 331.598 laki-laki dan 342.535 perempuan. Dengan wilayah seluas 688,84 Km² kepadatan penduduk akhir tahun 2021 adalah 979 jiwa/Km².

Perkembangan penduduk Kabupaten Magetan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah, Penduduk Kabupaten Magetan Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk	Ribu	628,61	628,92	628,98	670,81	674,13

Sumber : Magetan Dalam Angka 2022

d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan (untuk kabupaten/kota)

Kabupaten Magetan terdiri dari 18 Kecamatan, 235 desa/kelurahan, 1.084 RW dan 4.710 RT sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT Kabupaten Magetan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Poncol	8	44	231
2.	Parang	13	106	297
3.	Lembeyan	10	71	333
4.	Takeran	12	39	197
5.	Nguntoronadi	9	29	135



No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
6.	Kawedanan	20	69	319
7.	Magetan	14	64	328
8.	Ngariboyo	12	43	211
9.	Plaosan	15	67	389
10.	Sidorejo	10	41	215
11.	Panekan	17	69	362
12.	Sukomoro	14	46	216
13.	Bendo	16	108	357
14.	Maospati	15	78	333
15.	Karangrejo	13	37	173
16.	Karas	11	39	203
17.	Barat	14	46	207
18.	Kartoharjo	12	52	204
	Jumlah	235	1.048	4.710

Sumber : Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2022

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Jumlah perangkat daerah di Kabupaten Magetan ada 46, unit kerja perangkat daerah ada 56 dan jumlah total pegawai di kabupaten Magetan per 31 Desember 2022 ada 7.205 orang.

Tabel 1.4
Jumlah Perangkat daerah dan total pegawai kabupaten Magetan tahun 2022

NO	UNIT KERJA	JML
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	31
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29
3	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	71
4	BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	32
5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	28
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	46
7	DINAS KESEHATAN	1557
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	22



NO	UNIT KERJA	JML
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	74
11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	48
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	164
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	31
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	29
15	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3886
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK	26
17	DINAS PERHUBUNGAN	44
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	64
19	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	32
20	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	56
21	DINAS SOSIAL	25
22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	143
23	DINAS TENAGA KERJA	21
24	INSPEKTORAT	48
25	KECAMATAN BARAT	32
26	KECAMATAN BENDO	18
27	KECAMATAN KARANGREJO	26
28	KECAMATAN KARAS	18
29	KECAMATAN KARTOHARJO	12
30	KECAMATAN KAWEDANAN	32
31	KECAMATAN LEMBAYAN	20
32	KECAMATAN MAGETAN	48
33	KECAMATAN MAOSPATI	30
34	KECAMATAN NGARIBOYO	15
35	KECAMATAN NGUNTORONADI	13
36	KECAMATAN PANAKAN	19
37	KECAMATAN PARANG	16
38	KECAMATAN PLAOSAN	24
39	KECAMATAN PONCOL	18
40	KECAMATAN SIDOREJO	12
41	KECAMATAN SUKOMORO	18



NO	UNIT KERJA	JML
42	KECAMATAN TAKERAN	17
43	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15
44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	92
45	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	37
46	SETDAKAB. MAGETAN	130
	TOTAL	7205



f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 1.5 Realisasi APBD

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

NO. URUT	URAIAN	Anggaran	Realisasi	(%)	TOTAL
4	PENDAPATAN DAERAH	1.808.408.753.509,00	1.845.412.433.875,57	102,05	1.845.412.433.875,57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.838.319.486,00	238.172.331.190,57	115,15	238.172.331.190,57
4.1.1	Pajak Daerah	61.145.300.000,00	66.510.181.067,00	108,77	66.510.181.067,00
4.1.1.06	Pajak Hotel	700.000.000,00	924.426.883,00	132,06	924.426.883,00
4.1.1.07	Pajak Restoran	3.000.000.000,00	4.222.558.579,00	140,75	4.222.558.579,00
4.1.1.08	Pajak Hiburan	40.300.000,00	87.436.225,00	216,96	87.436.225,00
4.1.1.09	Pajak Reklame	300.000.000,00	366.107.960,00	122,04	366.107.960,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	25.000.000.000,00	25.977.475.850,00	103,91	25.977.475.850,00
4.1.1.11	Pajak Parkir	100.000.000,00	127.736.652,00	127,74	127.736.652,00
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	205.000.000,00	275.259.639,00	134,27	275.259.639,00
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	702.223.125,00	117,04	702.223.125,00
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	23.700.000.000,00	23.868.611.158,00	100,71	23.868.611.158,00
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000.000,00	9.958.344.996,00	132,78	9.958.344.996,00
4.1.2	Retribusi Daerah	29.579.580.000,00	32.138.419.545,00	108,65	32.138.419.545,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10.469.450.000,00	10.735.186.415,00	102,54	10.735.186.415,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	18.655.130.000,00	20.386.996.960,00	109,28	20.386.996.960,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	455.000.000,00	1.016.236.170,00	223,35	1.016.236.170,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.042.170.286,00	4.042.170.286,20	100,00	4.042.170.286,20
4.1.3.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.042.170.286,00	4.042.170.286,20	100,00	4.042.170.286,20
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	112.071.269.200,00	135.481.560.292,37	120,89	135.481.560.292,37
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	158.639.200,00	190.691.700,00	120,20	190.691.700,00
4.1.4.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.601.713.500,00	130,09	2.601.713.500,00
4.1.4.05	Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.784.991.515,41	92,83	2.784.991.515,41
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	3.000.000.000,00	3.383.219.177,76	112,77	3.383.219.177,76
4.1.4.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00		0,00
4.1.4.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	214.500.000,00	653.589.742,97	304,70	653.589.742,97
4.1.4.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	20.000.000,00	341.791.112,00	1.708,96	341.791.112,00
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.000.000,00	23.514.553,00	117,57	23.514.553,00
4.1.4.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00		0,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	102.658.130.000,00	124.827.778.833,13	121,60	124.827.778.833,13
4.1.4.17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	674.270.158,10	67,43	674.270.158,10
4.1.4.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00		0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.577.656.598.023,00	1.586.048.920.041,00	100,53	1.586.048.920.041,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.452.933.296.873,00	1.440.424.558.484,00	99,14	1.440.424.558.484,00
4.2.1.01	Dana Perimbangan	1.256.074.929.873,00	1.243.566.191.484,00	99,00	1.243.566.191.484,00
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	24.444.477.000,00	24.444.477.000,00	100,00	24.444.477.000,00
4.2.1.05	Dana Desa	172.413.890.000,00	172.413.890.000,00	100,00	172.413.890.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	124.723.301.150,00	145.624.361.557,00	116,76	145.624.361.557,00
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	118.874.807.150,00	138.947.192.557,00	116,89	138.947.192.557,00
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	5.848.494.000,00	6.677.169.000,00	114,17	6.677.169.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.913.836.000,00	21.191.182.644,00	88,61	21.191.182.644,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	6.650.000.000,00	7.592.000.000,00	114,17	7.592.000.000,00
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.650.000.000,00	7.592.000.000,00	114,17	7.592.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.263.836.000,00	13.599.182.644,00	78,77	13.599.182.644,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2022

4.3.3.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00		0,00
4.3.3.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.263.836.000,00	13.599.182.644,00	78,77	13.599.182.644,00
5	BELANJA DAERAH	2.153.714.081.975,00	1.971.226.044.228,85	91,53	1.971.226.044.228,85
5.1	BELANJA OPERASI	1.564.278.267.325,00	1.433.413.606.548,22	91,63	1.433.413.606.548,22
5.1.1	Belanja Pegawai	827.935.052.828,00	767.853.165.415,00	92,74	767.853.165.415,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	510.080.053.033,00	498.606.042.887,00	97,75	498.606.042.887,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	84.800.000.000,00	76.411.199.501,00	90,11	76.411.199.501,00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	195.452.528.277,00	157.087.223.912,00	80,37	157.087.223.912,00
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.893.310.551,00	21.385.170.565,00	97,68	21.385.170.565,00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	971.416.677,00	809.604.717,00	83,34	809.604.717,00
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	839.400.000,00	98,52	839.400.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	608.184.190.341,00	544.801.165.837,22	89,58	544.801.165.837,22
5.1.2.01	Belanja Barang	144.735.185.415,00	115.674.747.125,00	79,92	115.674.747.125,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	207.297.637.059,00	188.622.264.650,00	90,99	188.622.264.650,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	22.577.485.711,00	21.730.913.872,22	96,25	21.730.913.872,22
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	59.643.457.100,00	50.147.251.964,00	84,08	50.147.251.964,00
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.451.850.690,00	1.768.102.400,00	72,11	1.768.102.400,00
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.590.966.649,00	44.833.171.884,00	98,34	44.833.171.884,00
5.1.2.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	125.887.607.717,00	122.024.713.942,00	96,93	122.024.713.942,00
5.1.4	Belanja Subsidi	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	74.000.000,00
5.1.4.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	74.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	113.888.851.556,00	106.970.065.226,00	93,92	106.970.065.226,00
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	196.487.500,00	71.400.000,00	36,34	71.400.000,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	102.769.389.056,00	97.964.865.184,00	95,32	97.964.865.184,00
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS	8.959.360.000,00	6.970.347.900,00	77,80	6.970.347.900,00
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.963.615.000,00	1.963.452.142,00	99,99	1.963.452.142,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	14.196.172.600,00	13.715.210.070,00	96,61	13.715.210.070,00
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	13.796.172.600,00	13.321.210.070,00	96,56	13.321.210.070,00
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	400.000.000,00	394.000.000,00	98,50	394.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	248.745.264.044,00	217.757.007.674,63	87,54	217.757.007.674,63
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	2.130.685.000,00	60,88	2.130.685.000,00
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	2.130.685.000,00	60,88	2.130.685.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.852.087.634,00	52.351.754.401,00	90,49	52.351.754.401,00
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	780.002.797,00	748.266.343,00	95,93	748.266.343,00
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.123.262.440,00	2.018.329.300,00	64,62	2.018.329.300,00
5.2.2.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	440.604.123,00	403.548.228,00	91,59	403.548.228,00
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	538.486.299,00	504.771.150,00	93,74	504.771.150,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.775.015.169,00	5.377.114.003,00	93,11	5.377.114.003,00
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.767.727.891,00	1.657.209.603,00	93,75	1.657.209.603,00
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.649.081.318,00	12.405.997.326,00	90,89	12.405.997.326,00
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	12.615.041.500,00	11.946.761.024,00	94,70	11.946.761.024,00
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	8.050.259.833,00	7.240.971.003,00	89,95	7.240.971.003,00
5.2.2.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	83.181.500,00	77.998.900,00	93,77	77.998.900,00
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	90.764.139,00	87.061.200,00	95,92	87.061.200,00
5.2.2.16	Belanja Modal Alat Peraga	627.000.000,00	540.475.000,00	86,20	540.475.000,00
5.2.2.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	264.893.044,00	154.356.800,00	58,27	154.356.800,00
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	18.336.400,00	18.336.400,00	100,00	18.336.400,00
5.2.2.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.471.963.181,00	5.325.489.231,00	97,32	5.325.489.231,00
5.2.2.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.556.468.000,00	3.845.068.890,00	84,39	3.845.068.890,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2022

5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.155.610.201,00	68.737.085.255,63	90,26	68.737.085.255,63
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	72.944.610.201,00	65.613.569.805,63	89,95	65.613.569.805,63
5.2.3.02	Belanja Modal Monumen	338.000.000,00	334.400.000,00	98,93	334.400.000,00
5.2.3.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.873.000.000,00	2.789.115.450,00	97,08	2.789.115.450,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.867.847.057,00	91.219.487.130,00	84,57	91.219.487.130,00
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	76.961.347.060,00	62.248.138.950,00	80,88	62.248.138.950,00
5.2.4.02	Belanja Modal Bangunan Air	30.906.499.997,00	28.971.348.180,00	93,74	28.971.348.180,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.369.719.152,00	3.317.995.888,00	98,47	3.317.995.888,00
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	244.750.000,00	232.418.912,00	94,96	232.418.912,00
5.2.5.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	483.778.982,00	474.646.906,00	98,11	474.646.906,00
5.2.5.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.640.190.170,00	2.610.267.170,00	98,87	2.610.267.170,00
5.2.5.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.000.000,00	662.900,00	66,29	662.900,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.183.932.406,00	4.011.448.806,00	16,59	4.011.448.806,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	24.183.932.406,00	4.011.448.806,00	16,59	4.011.448.806,00
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	24.183.932.406,00	4.011.448.806,00	16,59	4.011.448.806,00
5.4	BELANJA TRANSFER	316.506.618.200,00	316.043.981.200,00	99,85	316.043.981.200,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	9.072.488.000,00	9.072.488.000,00	100,00	9.072.488.000,00
5.4.1.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.114.530.000,00	6.114.530.000,00	100,00	6.114.530.000,00
5.4.1.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.957.958.000,00	2.957.958.000,00	100,00	2.957.958.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	307.434.130.200,00	306.971.493.200,00	99,85	306.971.493.200,00
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	307.434.130.200,00	306.971.493.200,00	99,85	306.971.493.200,00
	SURPLUS / DEFISIT	(345.305.328.466,00)	(125.813.610.353,28)	36,44	(125.813.610.353,28)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	363.215.328.466,00	363.156.025.966,26	99,98	363.156.025.966,26
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	363.065.328.466,00	363.065.328.466,26	100,00	363.065.328.466,26
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	3.696.065.000,00	3.696.065.000,00	100,00	3.696.065.000,00
6.1.1.05	Penghematan Belanja	359.369.263.466,00	359.369.263.466,26	100,00	359.369.263.466,26
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	150.000.000,00	90.697.500,00	60,47	90.697.500,00
6.1.5.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	150.000.000,00	90.697.500,00	60,47	90.697.500,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.910.000.000,00	16.000.000.000,00	89,34	16.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
6.2.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.910.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	1.910.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	345.305.328.466,00	347.156.025.966,26	100,54	347.156.025.966,26
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	221.342.415.612,98		221.342.415.612,98



1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu, isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

b. Visi dan misi kepala daerah

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Magetan 2018—2023 merupakan penjabaran lima tahun keempat dan kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan 2005—2025. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magetan sertavisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka visi pembangunan Kabupaten Magetan dalam RPJMD 2018—2023 adalah:

“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Magetan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Magetan saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut.

Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebihluas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi. Dalam mengembangkan penjelasanvisiharus merujuk sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magetan periode keempat dan kelima untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD.



Masyarakat Magetan yang **SMART** merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang mere Persentasikan karakteristi kmasyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreneur*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di KabupatenMagetan.

Sehat merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang terbebas dari berbagai penyakit, baik penyakitjasmani, penyakit rohani, penyakit sosial, dan penyakit lingkungan. Kondisi masyarakat yang sehat memungkinkan untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan pembangunan melalui peran strategi smasing-masing elemen masyarakat.

Maju merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki tingkat intelektual/pendidikanmemadai (*educated*) dan memiliki wawasan keilmuan yang luas dan progresif sehingga mampu berkiprah secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Kondisi masyarakat yang maju sangat terbuka terhadap pembaharuan dan kemajuan teknologi serta selektif.

Agamis merupakan perwujudan dari kondisi ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang diwujudkan dalam tata keyakinan (keimanan), peribadatan, tata hubungan keluarga dan sosialmasyarakat, sertaakhlak dan perilaku budipekerti yang luhur. Kondisi masyarakat yang agamis memiliki hubungan inter dan antar umat beragama yang toleran, saling menghargai dan menjaga serta saling berkasih sayang sehingga terwujud suasana masyarakat yang damai, aman dan tenteram.

Ramah merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang peduli terhadap sesama melalui berbagai unsur komunikasi yang sehat seperti mudah bertegur sapa, mudah akrab, saling bersilaturahmi dan saling berbagi. Kondisi masyarakat yang ramah tidak mudah terpecah belah, terprovokasi yang dapat merenggangkan hubungan kemasyarakatan serta persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Terampil merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat yang memiliki penguasaan ketrampilan serta teknologi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengimplementasikan ketrampilan dan teknologi tersebutdalam berbagai kegiatan produksi. Kondisi masyarakat yang terampil mudah mengelola



dan mengolah kesempatan/peluang menjadi kegiatan usaha yang produktif, profitable dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat ikut serta mengurangi tingka pengangguran dan kemiskinan.

Masyarakat Magetan yang semakin **Mantab** merupakan kepanjangan dari **Mandiri, Lestari dan Bermartabat** yang mere Persentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dicita-citakan dalam RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005–2025. Periode pembangunan tahun 2018–2023 merupakan periode lima tahun terakhir RPJPD 2005–2025 sehingga dapat disebut sebagai periode pamantapan.

Mandiri dapat diartikan bahwa daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi unggulan/andalan daerah dengan didukung oleh sumber daya manusia yang SMART.

Lestari dapat diartikan sebagai perwujudan dari kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antarape manfaat, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lestari dapat juga menunjukkan sinergitas pembangunan tiga pilar yaitu perspektif pembangunan sosial, perspektif pembangunan ekonomi, dan perspektif pembangunan lingkungan menjadi aras pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Bermartabat dapat diartikan sebagai perwujudan dar kondisi masyarakat yang memiliki harga diri yang terhormat, dimana masyarakat tersebut memiliki orientasi nilai moral yang tinggi dengan selalu mengutamakan nilai religius dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah perbuatannya, sehingga mewujudkan sebagai suatu masyarakat yang beradab. Bermartabat juga dapat diartikan terbentuknya perilaku, budaya pemerintah dan masyarakat yang menjunjung tinggi religiusitas, akhlak mulia dan nilai-nilai luhur tradisi dan budaya masyarakat madani serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dikembangkan melalui kepemimpinan yang tulus-ikhlas, amanah, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk



mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah

Program prioritas dalam mencapai visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk diselenggarakan. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD. Namun demikian, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Magetan berisi program-program, baik untuk



mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pendanaan program disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal diperoleh dari proyeksi APBD dikurangi belanja dan pengeluaran wajib mengikat prioritas

Program prioritas pembangunan daerah tahun 2022 sesuai dengan kebijakan umum belanja daerah, adalah :

1. Pemenuhan kecukupan belanja pegawai ASN dan non-ASN, serta kebutuhan rutin operasionalisasi perkantoran
2. Penyediaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, peningkatan pelayanan Puskesmas, serta pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan
3. Penyediaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu, peningkatan pelayanan Puskesmas, serta pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan
4. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Penanganan masalah sosial (lanjut usia terlantar, penanganan penyandang disabilitas dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS))
6. Penyediaan sarana penanganan dan pengelolaan sampah
7. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kualitas pelayanan publik, utamanya di Kecamatan dan Kelurahan
8. Pengembangan pengungkit dan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi kewilayahan di Kelurahan dan Desa
9. Pelatihan dan pengembangan usaha mikro
10. Peningkatan sarpras pertanian dan irigasi pertanian serta pengembangan agrowisata pertanian
11. Penanganan KLB Penyakit Kuku dan Mulut (PKM) pada hewan ternak
12. Rehabilitasi pasar daerah dan pasar desa
13. Fasilitasi pelaksanaan event-event pariwisata, budaya dan olahraga
14. Penyediaan hibah kepada organisasi, masyarakat dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya



15. Pemberian Bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan resiko sosial serta peningkatan/ rehabilitasi Rumah tidak layak huni.

Program prioritas yang ditetapkan adalah dalam upaya mencapai arah kebijakan yang telah ditentukan, dan disinergikan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi. Kondisi perekonomian Nasional dan Provinsi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan menjadi dasar penentuan target capaian indikator kinerja ekonomi makro Kabupaten Magetan.

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

1. Pendidikan
 - a. Pengembangan pendidikan karakter untuk anak usia dini
 - b. Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi (SD DAN SMP)
 - c. Peningkatan sarana dan pasarana pendidikan dasar (SD - SMP), meliputi gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, alat peraga edukatif dan lainnya.
 - d. Angkutan pelajar gratis
2. Kesehatan
 - a. Menekan angka stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi
 - b. Program pencegahan penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS) dan tidak menular (darah tinggi, diabetes, kesehatan jiwa)
 - c. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya
 - d. Jaminan layanan kesehatan masyarakat (non kuota pusat)
 - e. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan puskesmas
 - f. Peningkatan kualitas sarpras dan layanan rsud dr. Sayidiman
 - g. Rintisan pembangunan rumah sakit tipe D
3. Bidang infrastuktur (konektivitas)
 - a. Pembangunan jalan twin road masopati – sukomoro (lanjutan)
 - b. Peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan jembatan kabupaten.
 - c. Rehabilitasi jaringan irigasi
 - d. Pembangunan embung
 - e. Peningkatan infrastruktur pedesaan
 - f. Peningkatan fasilitas perhubungan
4. Bidang sosial dan tenaga kerja
 - a. Penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)



- b. Pemberdayaan fakir miskin, melalui pembentukan kube dilanjutkan pemberian ketrampilan dan bantuan modal usaha
 - c. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
 - d. Pengembangan sistem layanan administrasi ketenagakerjaan satu pintu
 - e. Fasilitasi program transmigrasi
5. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan penanggulangan bencana
- a. Pemenuhan sarpras pemadam kebakaran.
 - b. Peningkatan mitigasi bencana
6. Bidang administrasi kependudukan
- a. Pelayanan administrasi kependudukan on line
 - b. Pelayanan administrai kependudukan di kecamatan dan Mall Pelayanan Publik
7. Pariwisata dan kebudayaan
- a. Penataan kawasan sarangan sesuai grand desain yang baru. Penataan kawasan sarangan sesuai visi misi Bupati baru.
 - b. Penyusunan city brand pariwisata.
 - c. Pengembangan kawasan wisata religi temboro.
 - d. Pengembangan desa wisata.
 - e. Pelaksanaan event-event wisata dan budaya
8. Koperasi & UM
- a. Pembinaan koperasi (kelembagaan, produksi, dan pemasaran)
 - b. Pemberdayaan usaha mikro (pelatihan dan fasilitasi permodalan)
 - c. Pelatihan usaha ekonomi produktif
9. Penanaman modal
- a. Optimalisasi layanan online terintegrasi dan operasionalisasi penyelenggaraan mal pelayanan publik
 - b. Insentif penanaman modal untuk investor baru. Insentif penanaman modal berupa pengurangan dan atau pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan atau pembebasan retribusi daerah.
 - c. Penyelenggaraan promosi investasi dan pemetaan potensi investasi



10. Bidang industri, perdagangan dan usaha mikro

- a. Revitalisasi pasar daerah (pasar baru, pasar wisata, pasar sayur).
- b. Pembinaan industri kecil menengah (IKM) melalui pelatihan ketrampilan, dan fasilitasi promosi produk ikm.
- c. Pelatihan usaha ekonomi produktif

11. Bidang pertanian dan pangan

- a. Pengembangan agrowisata pertanian/ perikanan untuk menopang kepariwisataan
 - 1) Agrowisata sayur dan bunga di depan pasar wisata plaosan dan kebun buah di srogo
 - 2) Agrowisata perikanan di sumberdodol
 - 3) Agrowisata perah susu di singolangu, wisata ternak edukasi, kelinci di tanjungsari,
- b. Peningkatan produksi untuk mendukung ketahanan pangan daerah (penyediaan bibit unggul, pupuk, pemberantasan hama dan alsintan)
- c. Peningkatan sarana irigasi pertanian, seperti jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani
- d. Pengadaan benih tanaman pangan berkualitas, seperti padi, jagung, kedelai, kacang, kentang dan lainnya
- e. Pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura
- f. Pembangunan pusat promosi hasil pertanian/perkebunan (pengembangan agrowisata)
- g. Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah

12. Pembangunan desa

- a. Peningkatan sarpras desa (jalan, pasar, saluran irigasi, dll)
- b. Pemberdayaan bumdes dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- c. Fasilitasi pengembangan pasar desa dan BUMDes
- d. Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan
- e. Pengembangan pengelolaan keuangan desa berbasis IT

13. Lingkungan hidup



- a. Revitalisasi dan pemeliharaan hutan kota
- b. Pengelolaan limbah industri
- c. Pengelolaan sampah terpadu dan pembangunan TPA sanitary landfill
- d. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- e. Peningkatan edukasi pengelolaan sampah dan pembatasan sampah plastik.

14. Bidang komunikasi dan informatika

- a. Pengembangan e-government dan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
- b. Pengembangan website desa dan kelurahan

15. Pengentasan kemiskinan

- a. Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
- b. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH)
- c. Penyediaan sambungan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
- d. Bantuan sosial sarpras produksi pertanian bagi petani miskin
- e. Bantuan sarana perdagangan bagi warga miskin
- f. Pelatihan ketrampilan kerja bagi warga miskin
- g. Penyediaan makanan bagi lansia terlantar
- h. Pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM
- i. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah merupakan tujuan pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari pemerintah, Pemerintahan daerah bertanggungjawab meningkatkan pelayanan publik berdasar indikator – indikator dalam Standar Pelayanan Minimal pada urusan urusan wajib pemerintah daerah yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat. Standar Pelayanan Minimal ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan bernegara. Filosofi Standar Pelayanan Minimal ini adalah adanya peningkatan mutu dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai indikator - indikatornya. Guna memastikan terpenuhinya



standar capaian dalam bidang layanan tertentu serta mewujudkan adanya kesamaan kualitas dan akses terhadap layanan tersebut di semua daerah otonom, maka diperlukan adanya indikator - indikator yang jelas sebagai tolak ukur pelayanan dan disertai dengan target waktu pencapaiannya sehingga pencapaiannya akan terukur secara obyektif. Indikator – indikator tersebut, dalam undang – undang pemerintahan daerah disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan untuk melengkapi berbagai jenis standar yang ada di sektor publik yang diharapkan akan menjadi tolak ukur bagi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar Pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.

Arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Magetan telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2020. Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut, dilakukan melalui tahapan dan skala prioritas pembangunan yang dijadikan agenda pembangunan jangka menengah daerah secara berkesinambungan dan saling menjaga dari periode satu ke periode berikutnya, sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Magetan yang ditujukan untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sebelumnya.

Arah kebijakan tahun 2022 diprioritaskan pada penguatan sektor infrastruktur daerah dan pelayanan publik untuk menjamin standarisasi mutu pelayanan serta peningkatan tingkat kepuasan masyarakat melalui penyiapan sistem inovasi daerah yang berbasis pada karakteristik dan keunggulan daerah. Indikasi capaian dalam arah kebijakan ini antara lain adalah diterapkannya standar pelayanan publik seperti SPM, MDGs, maupun standar lain yang diadopsi seperti ISO, dll, merencanakan sistem inovasi daerah sebagai persiapan dalam mengembangkan kluster-kluster ekonomi, serta menyusun *blue print* potensi wisata.



BAB II
CAPAIAN KINERJA

2.1 Capaian Kinerja Makro

Target kinerja tahunan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 yang sudah disesuaikan dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Target kinerja Tahun 2022 dengan demikian adalah komitmen kinerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah pada tahun tersebut yang diuraikan di dalam program dan kegiatan tahun bersangkutan. Maka, target RPJMD Tahun 2021 diturunkan ke dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan 2022 dan setelah ditetapkan melalui APBD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Magetan pada awal Tahun Anggaran.

Rekapitulasi capaian kinerja adalah realisasi dari target kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magetan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,15	74,85	0,94
2	Angka Kemiskinan	10,66	9,84	-7,69
3	Angka Pengangguran	3,86	4,33	12,17
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,04	3,89	27,96
5	Pendapatan Per kapita	29,06	31,24	7,50
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,359	0,354	-1,39

Sumber : Sumber : BPS (Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2023)

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)

Pengukuran Kinerja dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah. Laporan kinerja membandingkan antara Target Kinerja yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja tahun yang sama. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen pemerintah daerah yang diturunkan dari target dan sasaran indikator kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati Kabupaten Magetan guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pendidikan PAUD			
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	788 unit	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	22986 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	22986 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1576 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1579 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	410 orang	DIKPORA	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	383 orang	DIKPORA	
		Pendidikan SD			
		Jumlah SD Negeri Terakreditasi	401 unit	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	53381 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	53381 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3328 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4698 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	832 orang	DIKPORA	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	73 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1967 orang	DIKPORA	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	437 orang	DIKPORA	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	222 orang	DIKPORA	
		Pendidikan SMP			
		Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	49 unit	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	30437 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	30437 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2352 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2246 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	280 orang	DIKPORA	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	461 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1275 orang	DIKPORA	
		Jumlah kepala sekolah	76 orang		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		DIKPORA	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	91 orang	DIKPORA	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	14 unit	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1242 orang	DIKPORA	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1242 orang	DIKPORA	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	256 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	132 orang	DIKPORA	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	132 orang	DIKPORA	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	-	DIKPORA	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	12 orang	DIKPORA	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk			
		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	DINKES	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	DINKES	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan ibu hamil)	23102	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	750	DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan persalinan)	23708	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	750	DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan bayi baru lahir)	22238	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	806	DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan balita sesuai	65655	DINKES	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		standar)			
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	806	DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar)	75239	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	2867	DINKES	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar)	286	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (pelayanan orang usia 15-59 tahun)	66	DINKES	
		Pelayanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	76487	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai	1846	DINKES	
		Pelayanan penderita hipertensi			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	308	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai	66	DINKES	
		Pelayanan penderita DM			
		Jumlah dukungan logistik	41880	DINKES	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kesehatan yang tersedia			
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	66	DINKES	
		Pelayanan ODGJ berat			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	308	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	66	DINKES	
		Pelayanan orang terduga TBC			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8354	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	75	DINKES	
		Pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	21342	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	72	DINKES	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir			
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUPR	Kabupaten Magetan tidak memiliki wilayah sungai karena Magetan masuk dalam wilayah sungai Bengawan Solo yang masuk dalam kewenangan pusat
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PUPR	Kabupaten Magetan tidak memiliki wilayah sungai karena Magetan masuk dalam wilayah sungai Bengawan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Solo yang masuk dalam kewenangan pusat
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	1	Dinas PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai			
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUPR	Kabupaten Magetan tidak memiliki wilayah pantai
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan	0	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota (m)			
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	1	Dinas PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	$\frac{57.998}{60.050} \times 100 = 96.58 \%$	Dinas PUPR	total irigasi primer: 60.050 irigasi primer yang rusak: 2.432,4695 irigasi primer dalam kondisi baik: 57.998
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{40.569,19}{42.319} \times 100 = 95.86 \%$	Dinas PUPR	total irigasi sekunder: 42.319 irigasi sekunder yang rusak: 2.064,767 irigasi sekunder dalam kondisi baik: 40.254,233
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM			
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PUPR	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota	1	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penyelenggara SPAM			
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PUPR	belum pernah memberikan izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas PUPR	penyelenggara an SPAM tidak melakukan kerjasama dengan BUMD/PMD.
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	139376	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	8233	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	146659	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	48 Rumah	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	48 Rumah	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	159235 Rumah	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{950}{172342} \times 100 = 0,55 \%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{48}{172342} \times 100 = 0,028\%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{159,235}{172,342} \times 100 = 92.39 \%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{159,235}{172,342} \times 100 = 92.39 \%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{1}{6} \times 100 = 16,67\%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{3650}{7300} \times 100 = 50 \%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{159,235}{172,342} \times 100 = 92.39 \%$	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{48}{172,342} \times 100 = 0.028 \%$	Dinas PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota			
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting	146 izin	Dinas PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada	Dinas PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUPR	Tidak ada bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan.
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk	0	Dinas PUPR	Tidak ada bangunan gedung yang ditetapkan oleh



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kepentingan strategis daerah			Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2046	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	0	Dinas PUPR	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	630,25 km	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	0 km	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dibangun	0 unit	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	19.86 km	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	24.2 Meter	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	97.27 km	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	377.85 Meter	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	107.58 km	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	690 Meter	Dinas PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	376 orang	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	560 Orang	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	510 Orang	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Tidak	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi	Ada	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	Dinas PUPR	data LPPD tentang tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya belum dilakukan
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	Dinas PUPR	kecukupan data LPPD tentang tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya belum dilakukan
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	214	Dinas PUPR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	214	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	214	Dinas PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi	0	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kewenangan pengawasannya			
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			
		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	691 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	10 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	10 Orang	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	5 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	5 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PKP	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	366 Unit	Dinas PKP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	10 Orang	Dinas PKP	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas PKP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		program pemerintah kabupaten/kota			
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP	Pelaksanaan SPM baru dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2022
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP	Pelaksanaan SPM baru dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2022
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP	Pelaksanaan SPM baru dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2022
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP	Pelaksanaan SPM baru dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2022
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKP	Pelaksanaan SPM baru dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2022
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PKP	Pelaksanaan SPM baru dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2022
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	430.82 Ha	Dinas PKP	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	520 Unit	Dinas PKP	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	75.62 Ha	Dinas PKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		Jumlah rumah di kab/kota	170,694	Dinas PKP	
		Jumlah unit PK RTLH	520 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah rumah tidak layak huni	4,890	Dinas PKP	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PKP	
		Rasio rumah dan KK	$\frac{0}{1} = 0 \%$	Dinas PKP	
		Jumlah rumah pembangunan baru	100 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	33 Perumahan	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1973 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1973 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	1973 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas PKP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	1973 Rumah	Dinas PKP	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	33	Dinas PKP	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	33	Dinas PKP	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1430	SATPOL PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	30 Orang	SATPOL PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7	SATPOL PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	SATPOL PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	SATPOL PP	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{0.6}{1} \times 100 = 60\%$	SATPOL PP	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{9,417}{10497} \times 100 = 89.71 \%$	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{0,65}{1} \times 100 = 65\%$	SATPOL PP	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{2,336}{10497} \times 100 = 22.25 \%$	SATPOL PP	
		Persentase warga negara	$\frac{2,328}{10497} \times 100 = 22.17 \%$	SATPOL PP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang ikut pelatihan			
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{1,204}{10497} \times 100 = 11.47 \%$	SATPOL PP	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{7,754}{10497} \times 100 = 73.86 \%$	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{52}{52} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{402}{402} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	4	SATPOL PP	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	SATPOL PP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak	SATPOL PP	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	SATPOL PP	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	75	SATPOL PP	
		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	9	SATPOL PP	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	30	SATPOL PP	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	2	SATPOL PP	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	4	DINSOS	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	5516	DINSOS	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	4485 Orang	DINSOS	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 Unit	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	3909 Orang	DINSOS	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	66	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	200	DINSOS	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	11	DINSOS	
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	4	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	25	DINSOS	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINSOS	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial	110	DINSOS	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang disediakan			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	56	DINSOS	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	147	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	22	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	10	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	28	DINSOS	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	22	DINSOS	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	400	DINSOS	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	400	DINSOS	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	DINSOS	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	200	DINSOS	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	400	DINSOS	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	44	DINSOS	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			
		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada	DISNAKER	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	$\frac{74.03}{74.03} - 72.24 = 2.42\%$	DISNAKER	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	DISNAKER	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{7}{10} \times 100 = 70\%$	DISNAKER	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{8}{14} \times 100 = 57.14\%$	DISNAKER	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{14}{195} \times 100 = 7.18\%$	DISNAKER	
		Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{7}{40} \times 100 = 17,5\%$	DISNAKER	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{40}{40} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penganggur yang dilatih	57	DISNAKER	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{195}{195} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Persentase penyerapan lulusan	$\frac{158}{195} \times 100 = 81,02\%$	DISNAKER	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{23}{195} \times 100 = 11,79\%$	DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISNAKER	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	$\frac{0}{1} = 0\%$	DISNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{0}{881} \times 100 = 0\%$	DISNAKER	
		Data tingkat produktivitas total	-9,49%	DISNAKER	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{10}{232} \times 100 = 4,31\%$	DISNAKER	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{3}{7} \times 100 = 42,85 \%$	DISNAKER	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	21 SP/SB	DISNAKER	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	$\frac{13}{13} \times 100 = 100 \%$	DISNAKER	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{553}{881} \times 100 = 62,77 \%$	DISNAKER	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{1}{881} \times 100 = 0.11 \%$	DISNAKER	
		Jumlah mogok kerja	0	DISNAKER	
		Jumlah penutupan perusahaan	2	DISNAKER	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	DISNAKER	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	DISNAKER	
		Jumlah perselisihan PHK	0	DISNAKER	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	636	DISNAKER	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	1	DISNAKER	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada	DISNAKER	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	3824	DISNAKER	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	3095	DISNAKER	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	28	DISNAKER	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	DISNAKER	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	DISNAKER	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu	0	DISNAKER	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		wilayah kab/kota			
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	1737	DISNAKER	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2088	DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	1737	DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulungan	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{155}{1737} \times 100 = 100\%$	DISNAKER	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISNAKER	tidak ada PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISNAKER	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			
		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	55 Lembaga	DPPKBPPPA	OPD



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	74 Program/Kegiatan	DPPKBPPPA	PROGRAM/KEGIATAN
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5	DPPKBPPPA	MEDIA MASSA
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	DPPKBPPPA	SOP P2T P2A
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{34}{35} \times 100 = 97.14\%$	DPPKBPPPA	ANAK KORBAN KEKERASAN
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	22 Lembaga	DPPKBPPPA	P2T-P2A
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	DPPKBPPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	20	DPPKBPPPA	
		Jumlah kader perempuantingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	DPPKBPPPA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	20 Lembaga	DPPKBPPPA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	DPPKBPPPA	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	5 Kebijakan/Program	DPPKBPPPA	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 Lembaga	DPPKBPPPA	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{23}{23} \times 100 = 100\%$	DPPKBPPPA	korban kekerasan perempuan yang terlayani
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)			
		1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		2. Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	Tidak	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			
		SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Belum ada $\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{1}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{1}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan TanahKabupaten/Kota	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap:			Nilai IKLH berdasarkan verifikasi dari Pusat (Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
		a. Indeks kualitas air (IKA)	56,03	Dinas LH	
		b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,68	Dinas LH	
		c. Indeks tutupan hutan (ITH)	33,72	Dinas LH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota			
		Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah	Ada	Dinas LH	Tersedianya informasi terkait jumlah



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		terhadap volume timbunan sampah			TPS
		Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah	Ada	Dinas LH	Tersedianya informasi terkait jumlah TPS
		Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing	Tidak	Dinas LH	Tersedianya informasi terkait jumlah TPS
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{138}{138} \times 100 = 100\%$	Dinas LH	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{1}{138} \times 100 = 0.72\%$	Dinas LH	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas LH	Tidak ada
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas LH	Tidak ada
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	$\frac{110}{120} \times 100 = 91.67\%$	Dinas LH	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{8}{8} \times 100 = 100\%$	Dinas LH	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik			
		1. Penerbitan akta perkawinan	$\frac{41}{41} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
		2. Penerbitan akta perceraian	$\frac{11}{11} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
		3. Penerbitan akta kematian	$\frac{10,126}{10,126} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
		4. Penyajian data kependudukan	$\frac{2}{2} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal			
		1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	73 Desa	DPMD	
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	51 Desa	DPMD	
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas	6542 Lembaga	DPMD	Pada tahun 2021 tidak terdapat lembaga adat di Kab. Magetan
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DPMD	Pada tahun 2021 tidak terdapat desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)			
		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	Ada	DPPKBPPPA	GDPK
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	24,70	DPPKBPPPA	MEDIAN UKP
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	4,52	DPPKBPPPA	ASFR
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{244,171}{244,171} \times 100 = 100\%$	DPPKBPPPA	Jumlah Masyarakat yang ter4papar program KKBPK
		5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	251	DPPKBPPPA	STAKESHOLDERS
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{76}{83} \times 100 = 91.56\%$	DPPKBPPPA	FASKES MKJP
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{77,258}{107,509} \times 100 = 71.86\%$	DPPKBPPPA	KB MKJP
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	24	DPPKBPPPA	KAMPUNG KB
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{3,918}{4,637} \times 100 = 84.49\%$	DPPKBPPPA	KB Pasca Persalinan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	$\frac{5,314}{8,010} \times 100 = 66.34 \%$	DPPKBPPPA	KB TERENDAH
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{18,991}{205,115} \times 100 = 9.26 \%$	DPPKBPPPA	PBI
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota			
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	$\frac{29}{116} \times 100 = 25\%$	DISHUB	Terminal Tipe C
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{4425}{6727} \times 100 = 88,84\%$	DISHUB	Terlaksananya pelayanan uji berkala
		3. Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	$\frac{18}{18} \times 100 = 100\%$	DISHUB	
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	$\frac{184}{405} \times 100 = 45,43\%$	DISHUB	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan	Ada	DISKOMINFO	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	$\frac{63}{63} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{58}{58} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{49}{61} \times 100 = 80,33\%$	DISKOMINFO	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{61}{61} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{28}{61} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan		DISKOMINFO	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		data di pusat data pemerintah	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$		
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{7}{63} \times 100 = 11.11 \%$	DISKOMINFO	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{9}{10} \times 100 = 90 \%$	DISKOMINFO	
		Tersedianya peraturandaerah atau peraturan kepala daerahterkait implementasi e-government	ada	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota			
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{6}{6} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{2400}{2400} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase diseminasi dan layananinformasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{6}{6} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	DINKOPUM	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{1} \times 100 = 0\%$	DINKOPUM	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{70}{861} \times 100 = 8,13\%$	DINKOPUM	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{53}{170} \times 100 = 31,17\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{77}{861} \times 100 = 8.94\%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	$\frac{124}{82275} \times 100 = 0.15\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{861} \times 100 = 0,12\%$	DINKOPUM	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak perlu diisi	DINKOPUM	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{327}{861} \times 100 = 37.98\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{1}{861} \times 100 = 0,12\%$	DINKOPUM	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{861} \times 0 = 0\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{280}{861} \times 100 = 32.52\%$	DINKOPUM	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{0}{32.52} \times 100 = 0\%$	DINKOPUM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha			
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{67}{16,773} \times 100 = 0.39 \%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{16,773}{156,243} \times 100 = 10.73\%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{67}{16,773} \times 100 = 0.40\%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan	$\frac{30}{12,000} \times 100 = 0.25\%$	DINKOPUM	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sertifikasi produk usaha			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	$\frac{80}{156.243} \times 100 = 0.05\%$	DINKOPUM	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	$\frac{598}{156.243} \times 100 = 0.38\%$	DINKOPUM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{0}{156.243} \times 100 = 0\%$	DINKOPUM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota			
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Ada	DPMPTSP	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Ada	DPMPTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	DPMPTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	3	DPMPTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	103	DPMPTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	13.160	DPMPTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	1.551.369.078.594	DPMPTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal	4	DPMPTSP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		tingkat kabupaten/kota			
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	335	DPMPTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Ada	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	DIKPORA	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	82	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	50	DIKPORA	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	54	DIKPORA	
		Peningkatan prestasi olahraga			
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	194	DIKPORA	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	22	DIKPORA	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		Tersedianya buku profil daerah	Ada	DISKOMINFO	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	7	DISKOMINFO	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	32	DISKOMINFO	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	7	DISKOMINFO	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	32	DISKOMINFO	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	$\frac{39}{39} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	Belum melakukan penganggaran
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISKOMINFO	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISKOMINFO	Kabupaten Magetan belum memiliki perangkat untuk kegiatan pengamanan sinyal
		2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{54}{61} \times 100 = 88.52\%$	DISKOMINFO	
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{43}{61} \times 100 = 70.49\%$	DISKOMINFO	
		4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya			
		1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	409 obyek pemajuan kebudayaan	DISPARBUD	
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	394 obyek pemajuan kebudayaan	DISPARBUD	
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	394 obyek	DISPARBUD	
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	838 Orang	DISPARBUD	
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	162 Cagar Budaya	DISPARBUD	
		6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	19 Cagar Budaya	DISPARBUD	
		7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DISPARBUD	
		8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1 Cagar Budaya	DISPARBUD	
		9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan,	5 Cagar Budaya	DISPARBUD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	DISPARBUD	
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	DISPARBUD	
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	DISPARBUD	
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	DISPARBUD	
		14. Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	0	DISPARBUD	
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya	0	DISPARBUD	
		16. Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	3 Orang	DISPARBUD	
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	DISPARBUD	
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	4 Unit	DISPARBUD	
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	DISPARBUD	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			
		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{24,355}{689,898} \times 100 = 8.74\%$	ARPUS	
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{24,355}{689,898} \times 100 = 3.53 \%$	ARPUS	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{869}{689,898} \times 100 = 0,12\%$	ARPUS	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{185}{68,898} \times 100 = 0.26\%$	ARPUS	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	6	ARPUS	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Magetan belum melaksanakan survey indeks kegemaran membaca
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	ARPUS	Kabupaten Magetan tidak memiliki naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	0	ARPUS	Kabupaten Magetan tidak memiliki naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	ARPUS	Kabupaten Magetan tidak memiliki naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional			
		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{3,081}{3,081} \times 100 = 100\%$	ARPUS	
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar	$\frac{11,545}{11,545} \times 100 = 100\%$		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		arsip		ARPUS	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{50}{50} \times 100 = 100\%$	ARPUS	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{822}{14,626} \times 100 = 5.62 \%$	ARPUS	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara			
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	ARPUS	Belum pernah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai Peraturan Kepala ANRI 25/2012
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	ARPUS	Belum pernah melaksanakan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi	231	ARPUS	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	50	ARPUS	Belum pernah melaksanakan autentikasi arsip merujuk pada Kepala ANRI 20/2011
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	10	ARPUS	Belum pernah melaksanakan pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	ARPUS	Bafr fia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan IGBupaten tvlargetan belrm pernah nrelaksanakan Penerb itan iz



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					in penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NISPK
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)			
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	DISNAKKAN	Jumlah rumah tangga nelayan yang diversifikasi usaha (RTP) :0/ tidak ada
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	DISNAKKAN	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional : 0 Tidak memiliki tempat pelelangan ikan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	DISNAKKAN	Jumlah izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Magetan : 0
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	3737	DISNAKKAN	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi /danaa penguatan kelembagaan) :



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					3.667 orang
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	20766930 Ekor	DISNAKKAN	Jumlah benih budidaya aair tawar dan aair payau yang diproduksi di magetan sebanyak 18.952.819 ekor
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
		1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	83	DISPARBUD	
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	9	DISPARBUD	Panjang Jalan Kabupaten Magetan 684,92 km. Jalan Negara 15,61 km. Jalan Provinsi 39,06 km. Jalan Kabupaten 630,25 km. Jumlah Kendaraan Bus 477 unit. Mobil 30.841 unit. Truk 12.370 unit. Motor 317.085 unit. Pelanggan Listrik 142.468. Daya Terpasang 222.097.266 KW. Pelanggan PDAM 70.311. Produksi Air Bersih PDAM Magetan 14.713.889 m2.
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	6 TDUP	DISPARBUD	1. Hotel/Penginapan, Pondok Wisata 122 2. Rumah Makan/Restoran/Warung Makan 326 3. Cafe 15 4. Karaoke 9 5. Perahu dan Becak Air 65 6. Tempat Rekreasi dan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Olahraga 12
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	601	DISPARBUD	
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	73 Kegiatan	DISPARBUD	
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	DISPARBUD	
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	16 Industri	DISPARBUD	
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{21}{2561} \times 100 = 0.82\%$	DISPARBUD	
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{329}{2561} \times 100 = 3.98\%$	DISPARBUD	
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	60 Lokasi	DISPARBUD	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		Sarana pertanian yang diberikan	287 unit	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		Prasarana pertanian yang digunakan	216 unit	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{216}{216} \times 100 = 100\%$	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	$\frac{118}{118} \times 100 = 100\%$	Dinas TPHPKP	Surat pernyataan
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular			
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\frac{688}{688} \times 100 = 100\%$	Dinas TPHPKP	Presentase fasilitasi penanggulanga n bencana



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan			
		1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{23}{23} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	
		3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{23}{23} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			
		a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	DISPERINDAG	
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	DISPERINDAG	
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	Tidak ada waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	Tidak Ada pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di Magetan
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISPERINDAG	
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	DISPERINDAG	
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0%	DISPERINDAG	
		Persentase Kinerja realisasi Pupuk			
		1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	94.91%	DISPERINDAG	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			
		1. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{16,637}{27,347} \times 100 = 60.83 \%$	DISPERINDAG	
		2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{10}{60} \times 100 = 16.66 \%$	DISPERINDAG	
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota			
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	$\frac{0}{1} \times 100 = 53.8462 \%$	DISPERINDAG	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	90%	DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{15}{15} \times 100 = 100\%$	DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{15}{15} \times 100 = 100\%$	DISPERINDAG	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil,	$\frac{15}{40} \times 100 = 37,5 \%$	DISPERINDAG	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota			
31	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	DISNAKER	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	DISNAKER	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	DISNAKER	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

Indikator Kinerja Kunci Hasil merupakan Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati Kabupaten Magetan guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{14,997}{17,330} \times 100 = 86,53\%$	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{52,776}{56,460} \times 100 = 93,47\%$	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{26,094}{28,243} \times 100 = 92,39\%$	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	$\frac{364}{364} \times 100 = 100\%$	DIKPORA	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	$\frac{367}{637.108} \times 100 = 0,06\%$	DINKES	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{2}{6} \times 100 = 33,33\%$	DINKES	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{7081}{8012} \times 100 = 88,38\%$	DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{7081}{7684} \times 100 = 92,07\%$	DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{7098}{7284} \times 100 = 97,44\%$	DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{31317}{31317} \times 100 = 100\%$	DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{82218}{82218} \times 100 = 100\%$	DINKES	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{372.401}{380.824} \times 100 = 97,78\%$	DINKES	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{151,205}{154,430} \times 100 = 97,91\%$	DINKES	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{188.092}{211.764} \times 100 = 88,82\%$	DINKES	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{13,938}{13,662} \times 100 = 102,02\%$	DINKES	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1,569}{1,569} \times 100 = 100\%$	DINKES	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan		DINKES	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{8.970}{6.571} \times 100 = 136,50\%$		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{14.445}{10.671} \times 100 = 135,36\%$	DINKES	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	Kabupaten Magetan tidak memiliki wilayah sungai karena Magetan masuk dalam wilayah sungai Bengawan Solo yang masuk dalam kewenangan pusat.
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	$\frac{1}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	Kabupaten Magetan tidak memiliki wilayah pantai
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{14270}{27683} \times 100 = 51,54\%$	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{160.533}{172.342} \times 100 = 93,15\%$	Dinas PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{159.235}{172.342} \times 100 = 92,39\%$	Dinas PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PUPR	
		Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{51.432}{63.025} \times 100 = 81,60\%$	Dinas PUPR	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{1,038}{2500} \times 100 = 41,52\%$	Dinas PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{551}{551} \times 100 = 100\%$	Dinas PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{10}{10} \times 100 = 100\%$	Dinas PKP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	$\frac{75,62}{430,82} \times 100 = 64,21$	Dinas PKP	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{4890}{170,694} \times 100 = 2,86\%$	Dinas PKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{33}{43} \times 100 = 76,74\%$	Dinas PKP	
6	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{24}{24} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{7}{7} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{9,417}{10,497} \times 100 = 89.71\%$	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	$\frac{2,680}{10,497} \times 100 = 25.53\%$	SATPOL PP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		bencana			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{402}{402} \times 100 = 100\%$	SATPOL PP	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{17}{24} \times 100 = 70.83\%$	SATPOL PP	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16,25 menit	SATPOL PP	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{4,485}{5,516} \times 100 = 81,30\%$	DINSOS	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{400}{400} \times 100 = 100\%$	DINSOS	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{10}{600} \times 100 = 1,67\%$	DISNAKER	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{23}{3095} \times 100 = 0.74\%$	DISNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{21.194,7}{372.496} \times 100 = 0.05$	DISNAKER	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{21}{881} \times 100 = 2,38\%$	DISNAKER	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	$\frac{2088}{3095} \times 100 = 67,46\%$	DISNAKER	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{480,733,145,573}{1,197,897,562,011} \times 100 = 40,13\%$	DPPKBPPPA	ARG
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	$\frac{34}{35} \times 100 = 97,14\%$	DPPKBPPPA	ANAK KORBAN KEKERASAN YG TERLAYANI
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	$\frac{23}{273,327} \times 100 = 8,41\%$	DPPKBPPPA	PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{241.841}{55.751} \times 100 = 433,78\%$	Dinas TPHPKP	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Belum ada kegiatan $\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Belum ada kegiatan $\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Belum ada kegiatan $\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Belum ada kegiatan $\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PKP	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	64,78%	Dinas LH	Nilai IKLH berdasarkan verifikasi dari Pusat (Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{6,574,745}{6,618,910} \times 100 = 99.33\%$	Dinas LH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\frac{10}{28} \times 100 = 35.71\%$	Dinas LH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	$\frac{544267}{544267} \times 100 = 100\%$	DISDUKCAPIL	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{148736}{150324} \times 100 = 98.94\%$	DISDUKCAPIL	
		Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{166,236}{168,481} \times 100 = 98.67\%$	DISDUKCAPIL	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{11}{46} \times 100 = 23,91\%$	DISDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	Dinas PMD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{2}{34} \times 100 = 5,88\%$	Dinas PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,10	DPPKBPPPA	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{77258}{107509} \times 100 = 71,86\%$	DPPKBPPPA	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{9989}{107509} \times 100 = 9,29\%$	DPPKBPPPA	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	$63 + 19,5 = 82,5$	DISHUB	
		V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,6%	DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{63}{63} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{494255}{689898} \times 100 = 71,64\%$	DISKOMINFO	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{321}{861} \times 100 = 37,28\%$	DINKOPUM	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	$\frac{26}{156243} \times 100 = 0,01\%$	DINKOPUM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	$\frac{1,551,369,078,594}{1,136,436,573,269} - 1,136,436,573,269 = 36.5\%$	DPMPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{4466}{136153} \times 100 = 3,28\%$	DIKPORA	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{13435}{136153} \times 100 = 9,86\%$	DIKPORA	
		Peningkatan prestasi olahraga	10 Medali/Penghargaan	DIKPORA	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{27}{46} \times 100 = 58,69\%$	DISKOMINFO	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{0}{1} \times 100 = 0\%$	DISKOMINFO	Tingkat keamanan Informasi Pemerintah belum bisa dihitung dikarenakan ada pandemi COVID – 19 sehingga tidak bisa mendatangkan lembaga penilai



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{238}{238} \times 100 = 100\%$	DISPARBUD	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	75,45	ARPUS	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,87	ARPUS	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	2,15	ARPUS	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	283	ARPUS	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	101.43%	DISNAKKAN	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten magetan sebesar 1.757,3
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{601}{0} - 0 = 60000\%$	DISPARBUD	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$\frac{2,050,084}{1,588,822} - 1,588,822 = 29.03\%$	DISPARBUD	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat hunian akomodasi	$\frac{37322}{783290} \times 100 = 4.76\%$	DISPARBUD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{986547,6}{21194741,1} = 4,65\%$	DISPARBUD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{17.730.196.000}{238,172,378,594.57} = 7.44\%$	DISPARBUD	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{397.278}{56.560} \times 100 = 702.40 \%$	Dinas TPHPKP	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{6,143}{2,478} - 2,478 = 147.90\%$	Dinas TPHPKP	
28	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	$\frac{2,475}{3,237} \times 100 = 76.45\%$	DISPERINDAG	
		Persentase Kinerja realisasi Pupuk	$\frac{39.462,54}{41.578} \times 100 = 94.91\%$	DISPERINDAG	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{16637}{27347} \times 100 = 60.83\%$	DISPERINDAG	
29	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	$\frac{13466}{12498} - 12498 = 7.74\%$	DISPERINDAG	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	$\frac{12}{10} = 120\%$	DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan	$\frac{15}{15} \times 100 = 100\%$	DISPERINDAG	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{15}{15} \times 100 = 100\%$	DISPERINDAG	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	$\frac{15}{15} \times 100 = 60.86\%$	DISPERINDAG	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75%	DISPERINDAG	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Lainnya diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{358.395.968.493}{1.971.226.044.228,85} \times 100 = 18,18\%$	BPPKAD	
		Rasio PAD	$\frac{238.172.331.190,57}{1,845,412,433,875.57} \times 100 = 12,9\%$	BPPKAD	



		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum expenditures)	$\frac{1,971,226,044,228.85}{1,971,226,044,228.85} \times 100 = 83.9\%$	BPPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	WTP	INSPEKTORAT	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{11,248} \times 100 = 0\%$	PBJ SETDA	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{11,248}{6,094} \times 100 = 184,57\%$	PBJ SETDA	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{142,607,362,030}{899,351,000,000} \times 100 = 15.85\%$	PBJ SETDA	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{143,487,714,140}{102,410,200,000} \times 100 = 40.11\%$		
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1,358}{877} \times 100 = 154.84\%$	BKD	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{415}{2,235} \times 100 = 18.56\%$	BKD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{141}{415} \times 100 = 33.97\%$	BKD	



4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1,971,226,044,228.85}{1,840,283,370,562.00} - 1 = 7.11\%$	BPPKAD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{203464421559,25}{205685936441,4} \times 100 = 15.14\%$	BPPKAD	
		Manajemen Aset :		BPPKAD	
		Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	BPPKAD	
		Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya	BPPKAD	
		Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Ya	BPPKAD	
		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Tidak	BPPKAD	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{363,065,328,466.26}{1,773,058,306,092} \times 100 = 20.47\%$	BPPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{46}{46} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{7}{7} \times 100 = 100\%$	DISKOMINFO	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Perencanaan Kinerja dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kinerja Tahunan untuk mencapai target kinerja sasaran yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja setiap tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 dan ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Target kinerja tahunan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Target Kinerja RPJMD Tahun 2022 yang sudah disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Target kinerja Tahun 2022 dengan demikian adalah komitmen kinerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah pada tahun tersebut yang diuraikan di dalam program dan kegiatan tahun bersangkutan. Maka, target RPJMD Tahun 2022 diturunkan ke dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan 2022 dan setelah ditetapkan melalui APBD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Magetan pada awal tahun anggaran 2022. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kesehatan	80,56
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2. Indeks Pendidikan	67,44
3	Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	3. Angka Kemiskinan	9,52
4	Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Tertib, dan Agamis	4. Indeks Toleransi	78,85
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	5. Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp.juta)	873.840
		6. Nilai Investasi (Rp)	400.000.000.000
		7. Jumlah Investor	1.120
		8. Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rp.)	782.055,27
		9. Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rp.)	2.417.898,53
		10. Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp.)	3.945.931,52
6	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	11. Prosentase Desa Berkategori Desa Mandiri (%)	12,07
7	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	12. Indeks Kualitas Air (IKA)	53,49
		13. Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,52



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	34,16
8	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	15. Indeks Ketahanan Daerah	0,60
9	Meningkatnya Pemerataan Kualitas dan Infrastruktur Wilayah	16. Indeks Infrastruktur	82,3
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	17. Opini BPK	WTP
		18. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,8
		19. Hasil Evaluasi AKIP	BB (78)
		20. Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5

Tabel 2.6
Anggaran Program
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021

1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	125.481.797.930,-
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.473.580.000,-
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	323.042.000,-
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.100.750.750,-
5.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota (semua OPD)	1.044.415.661.332,-
6.	Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	329.500.000,-
7.	Penanganan Kerawanan Pangan	349.000.000,-
8.	Pengawasan Keamanan Pangan	59.000.000,-
9.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	184.500.000,-
10.	Pengendalian Penduduk	298.225.950,-
11.	Pembinaan Keluarga Berencana	5.563.591.398,-
12.	Pembinaan Perpustakaan	1.439.268.000,-
13.	Pengelolaan Pendidikan	129.937.548.492,-
14.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.486.800.000,-
15.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	800.000.000,-
16.	Penataan Bangunan Gedung	15.035.570.000,-
17.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.959.185.000,-
18.	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	832.200.000,-
19.	Pengembangan Kebudayaan	1.439.268.000,-
20.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	176.625.000,-
21.	Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	62.502.700,-



22.	Pemenuhan Hak Anak	61.830.000,-
23.	Perlindungan Perempuan	54.100.000,-
24.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3.509.312.500,-
25.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	19.720.158.300,-
26.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	38.587.902.472,-
27.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.381.400.000,-
28.	Pemberdayaan Sosial	17.637.788.550,-
29.	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1.096.208.757,-
30.	Penempatan tenaga kerja	102.979.825,-
31.	Hubungan Industrial	113.737.400,-
32.	Pembangunan kawasan transmigrasi	160.000.000,-
33.	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	12.208.368.550,-
34.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	404.200.000,-
35.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	202.200.000,-
36.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	58.000.000,-
37.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	209.350.000,-
38.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.450.827.650,-
39.	Pengembangan UMKM	1.374.299.000,-
40.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terpantau	395.000,-
41.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	450.000.000,-
42.	Penataan Desa	145.607.100,-
43.	Administrasi Pemerintahan Desa	2.401.961.250,-
44.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	724.000.000,-
45.	Peningkatan Kerjasama Desa	25.500.000,-
46.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	363.000.000,-
47.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	660.500.000,-
48.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	274.500.000,-
49.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	105.000.000,-
50.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.303.615.000,-
51.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.096.659.169,-
52.	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	50.000.000,-
53.	Promosi penanaman Modal	310.000.000,-
54.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	394.695.000,-
55.	Pelayanan Penanaman Modal	190.000.000,-



56.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.291.391.000,-
57.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	540.000.000,-
58.	Pemasaran Pariwisata	730.000.000,-
59.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.580.368.490,-
60.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	469.800.000,-
61.	Penyuluhan Pertanian	1.878.370.000,-
62.	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.864.911.087,-
63.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	75.000.000,-
64.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.016.188.550,-
65.	Pengendalian Pencemaran dan / kerusakan lingkungan hidup	1.802.668.700,-
66.	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	25.000.000,-
67.	Pengelolaan keanekaragaman hayati	3.072.515.923,-
68.	Perencanaan Lingkungan Hidup	255.000.000,-
69.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	110.000.000,-
70.	Pengelolaan Persampahan	5.012.475.000,-
71.	Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	440.625.000,-
72.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	804.300.000,-
73.	Penanggulangan Bencana	903.354.650,-
74.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat, Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	24.000.000,-
75.	Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	1.565.000.000,-
76.	Pengembangan Perumahan	470.000.000,-
77.	Kawasan Permukiman	14.001.669.800,-
78.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.650.378.200,-
79.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	23.661.856.710
80.	Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air Limbah	2.440.526.950,-
81.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.376.794.000,-
82.	Penyelenggaraan Jalan	109.929.866.813,-
83.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	11.199.865.672,-
84.	Pengelolaan Sumber Daya Air	27.630.798.900,-
85.	Penanganan Bencana	280.000.000,-
86.	Aplikasi Informatika	2.149.499.975,-
87.	Pengelolaan Keuangan Daerah	343.749.400.606,-
88.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.705.798.600,-
89.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.681.437.500,-



90.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna Daerah	1.102.968.500,-
91.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.317.149.700,-

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Pemerintah Kabupaten Magetan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. RPJMD menyajikan susunan 5 (lima) Misi, 7 (delapan) Tujuan, 15 (lima belas) sasaran dan dengan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran yang secara rinci terbagi sebagai berikut:

Misi I = terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja,



- Misi II = terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja,
Misi III = terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja,
Misi IV = terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja
Misi V = terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 4 indikator kinerja.

Rekapitulasi capaian kinerja adalah realisasi dari target kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2020. Rekapitulasi capaian kinerja tersebut adalah:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Capaian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Kesehatan	80,56	81,50	101,17	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2. Indeks Pendidikan	67,44	67,89	100,67	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	3. Angka Kemiskinan	9,52	9,84	96,53	Berhasil
4	Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Tertib, dan Agamis	4. Indeks Toleransi	78,85	83,95	106,47	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	5. Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Juta Rp.)	873.840	1.098.536	125,71	Sangat Berhasil
		6. Nilai Investasi (Rp)	400.000.000.000	1.551.369.078.594	387,84	Sangat Berhasil
		7. Jumlah Investor	1.120	4.319	385,63	Sangat Berhasil
		8. Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rp.)	782.055,27	986.548 (ADHB)	126,15	Sangat Berhasil
		9. Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rp.)	2.417.898,53	2.318.350 (ADHK)	95,88%	Berhasil
		10.Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp.)	3.945.931,52	6.172.989 (ADHB)	156,43	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Kemandirian Desa	11.Persentase desa berkategori desa mandiri(%)	12,07	22,71	188,15	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya Kualitas	12.Indeks Kualitas Air (IKA)	53,49	56,03	104,75	Sangat



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Air, Udara dan Lahan					Berhasil
		13.Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,52	89,68	101,31	Sangat Berhasil
		14.Indeks Kualitas Lahan (IKL)	34,16	33,72	98,71	Berhasil
8.	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	15.Indeks ketahanan daerah	0,60	0,64	105	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Infrastruktur Wilayah	16.Indeks Infrastruktur	82,3	belum rilis	-	-
10.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	17.Opini BPK	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
		18.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,8	2,27	81,07%	Berhasil
		19.Hasil Evaluasi AKIP	BB (78)	BB (72,62)	93,10	Berhasil
		20.Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	82,75	102,80	Sangat Berhasil

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dibutuhkan untuk mengukur capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2022. Pengukuran tersebut tersaji dalam table berikut:

Tabel 2.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			
			2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,51	81,00	80,56	81,50
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	66,94	66,87	67,44	67,89
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,71%	10,66%	9,52	9,84
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan	Indeks Toleransi	78,6	82,97	78,85	83,95



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			
			2021		2022	
	Agamis					
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	801.790	941.770	873.840	1.098.536
6	Meningkatnya kegiatan investasi	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	300	1.136,43	400	1.551,36
7	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Juta)	722.308,68	856.400,40	782.055,27	986.548 (ADHB)
8	Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. Juta)	2.308.194,41	3.116.120,90	2.417.898,53	2.318.350 (ADHK)
9	Meningkatnya kegiatan sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (Rp. Juta)	3.848.095,82	5.820.792,10	3.945.931,52	6.172.989 (ADHB)
10	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkatkan Menjadi Desa Mandiri	9,66	10,63	12,07	22,71
11	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,39	52,78	53,49	56,03
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,42	85,28	88,52	89,68
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	33,56	34,93	34,16	33,72
12	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,35	0,59	0,60	0,64
13	Meningkatnya Pemerintahan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur	81,90	76,36	82,3	belum rilis
14	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,4	2,56	2,8	2,27
		Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB (73)	BB (70,19)	BB (78)	BB (72,62)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,01	80,66	80,5	82,75



d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Berikut adalah tabel capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah:

Tabel 2.9
Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam RPJMD
Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,56	81,50	101,17%	80,61
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	67,44	67,89	100,67%	72,90
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,52	9,84	96,53%	9,9%
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis	Indeks Toleransi	78,85	83,95	106,47%	79%
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	873.840	1.098.536	125,71%	963.200
6	Meningkatnya kegiatan investasi	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	400	1.551,36	387,84%	450
7	Meningkatnya kegiatan industri pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Juta)	782.055,27	986.548 (ADHB)	126,15%	846.743,87
8	Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. Juta)	2.417.898,53	2.318.350 (ADHK)	95,88%	846.743,87
9	Meningkatnya kegiatan sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (Rp. Juta)	3.945.931,52	6.172.989 (ADHB)	156,43%	4.043.767,21
10	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkatkan Menjadi Desa Mandiri	12,07	22,71	188,15	9,6
11	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,49	56,03	104,75%	55,54
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,52	89,68	101,31%	87,15
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	34,16	33,72	98,71%	67,64
12	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam	Indeks Ketahanan Daerah	0,60	0,64	106,67%	0,50



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	Capaian	
	Menghadapi Bencana					
13	Meningkatnya Pemerintahan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur	82,3	Belum rilis	-	82,3
14	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,8	2,27	81,07%	3,0
		Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB (78)	BB (72,62)	100%	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	82,75	102,80%	81

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

Analisis terhadap akuntabilitas anggaran dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran, serta analisis efisiensi kinerja yaitu membandingkan capaian kinerja dengan capaian (serapan) anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian kinerja 137,97% dan serapan anggaran sebesar 86,96% sehingga capaian efisiensi kinerja sebesar 51,01%. Hasil analisis efisiensi sebagai berikut:



Tabel 2.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2022			Anggaran Tahun 2022			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	MISI I : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)								
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	80,56	81,50	101,17%	261.905.782.230	185.339.799.064	90,48%	10,13%
2	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	67,44	67,89	100,67%	143.348.255.348	135.606.931.099	94,60%	5,30%
3	Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,52%	9,84%	96,53%	25.929.690.994	23.419.427.137	90,32%	-0,10%
4	Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis	Indeks Toleransi	78,85	83,95	106,47%	4.958.683.593	4.153.432.564	83,76%	21,80%



II	MISI II : Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah.								
5	Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan	Nilai omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Rp. juta)	873.840	1.098.536	125,71%	1.455.103.500	1.347.259.764	92,59%	24,87%
		Nilai Investasi (Rp)	400.000.000 .000	1.551.369. 078.594	387,84%	867.856.850	584.402.109	67,34%	311,47%
		Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Juta)	782.055,27	986.548 (ADHB)	126,15%	6.295.724.355	4.166.669.867	66,18%	52,38%
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Rp. Juta)	2.417.898,53	2.318.350 (ADHK)	95,88%	9.281.468.944	8.316.839.000	89,61%	45,40%
		Nilai PDRB sektor pertanian (Pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan) (Rp. Juta)	3.945.931,52	6.172.989 (ADHB)	156,43%	45.980.343.442	42.757.727.352	94,42%	56,84%
6	Menurunnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkat Menjadi Desa Mandiri	12,07	22,71	188,15%	3.802.612.150	1.457.113.960	38,32%	71,72%



III	MISI III: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.								
7	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,49	56,03	104,75%	7.184.426.350	6.550.210.922	91,17%	8,62%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,52	89,68	101,31%				
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	34,16	33,72	98,71%				
8	Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,60	0,64	106,67%	12.717.530.150	9.708.386.340	76,34%	92,23%
IV	MISI IV: Memantapkan Ketercukupan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana dan Fasilitas bagi Kegiatan Pelayanan Masyarakat.								
9	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur	82,3	Belum rilis	-	114.370.697.337	112.430.070.391	98,30%	-
V	MISI V: Mengembangkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Manajemen Pemerintahan yang Lebih Profesional.								
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif	Opini BPK	WTP	WTP	100%	125.302.395.506	123.275.646.390	98,38%	2,53%
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,8	2,27	81,07%				
		Hasil Evaluasi AKIP	BB (78)	BB	100%				



		(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)		(72,62)					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5	82,75	102,80%				
Rata-Rata Capaian Kinerja, Serapan Anggaran dan Efisiensi					124,86%			83,70%	41,16%



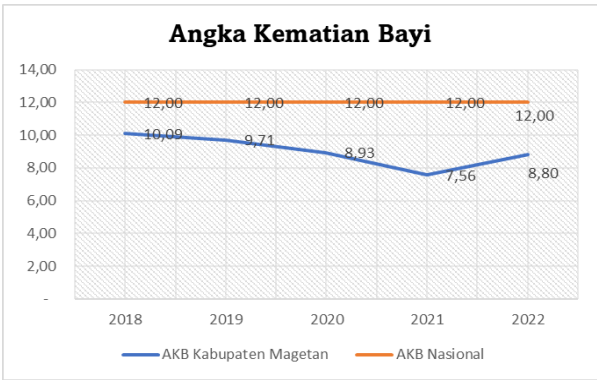
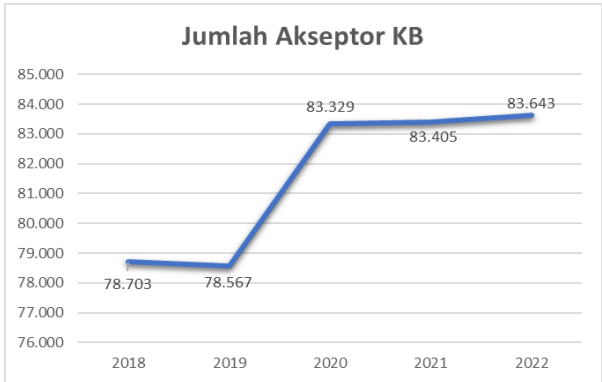
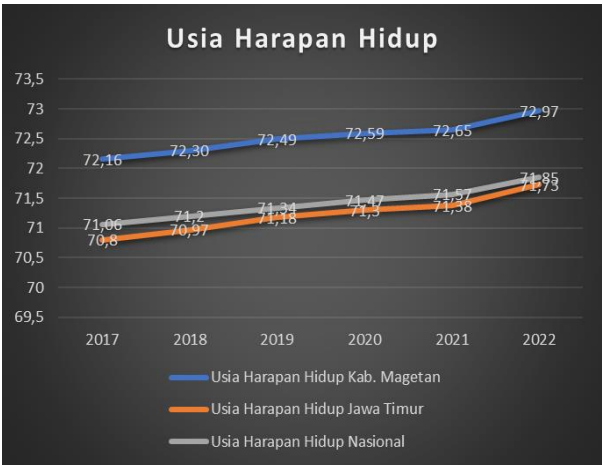
f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Sasaran Strategis-1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	81	80,56	81,50	101,17%	80,61
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				101,17%	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah mencapai 101,17% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kesehatan. Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai faktor pembentuk Indeks Kesehatan menunjukkan angka yang meningkat secara moderat rata-rata 0,162 per tahun selama 6 tahun terakhir. Tahun 2017 UHH sebesar 72,16 tahun dan akhir tahun 2022 menjadi 72,92 tahun. Suasana Pandemi Covid-19 yang telah berlalu tetap memberikan kesadaran bagi warga untuk hidup sehat. Angka capaian UHH ini berada di atas Provinsi Jawa Timur 71,73 tahun dan bahkan Nasional 71,85 tahun. Beberapa indikator pendukung menunjukkan adanya peningkatan kinerja antara lain Jumlah Akseptor KB, Angka Kemadian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta tingkat konsumsi ikan perkapita penduduk. Indikator Jumlah Akseptor KB menunjukkan tren kenaikan yang moderat dengan jumlah rata-rata akseptor KB sebanyak 82.236 PUS per tahun. Rata-rata kenaikan Akseptor KB sebanyak 1.235 orang atau 1,57% selama 5 tahun terakhir. Tahun 2018 jumlah akseptor KB sebanyak 78.703 pasangan usia subur dan angka ini naik rata-rata 1,57% menjadi sebesar 83.643 akseptor di tahun 2022. Kenaikan rata-taya moderat ini menunjukkan bahwa kesadaran Pasangan Usia Subur untuk aktif sebagai akseptor KB dan mendukung program nasional Pemerintah daerah wajib dilaksanakan.

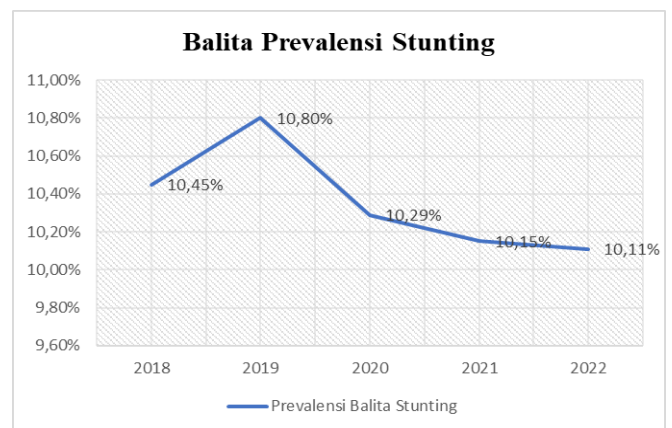
Indikator lain yaitu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Melahirkan, dan cakupan pelayanan penyakit menular dan tidak menular. Realisasi angka kematian bayi (AKB) selama 10 tahun terakhir selalu di bawah target nasional. Angka AKB rata-rata pertahun sebesar 8,75 per 1.000 kelahiran hidup dan turun secara





moderat sebesar -0,32 atau -2,68% tiap tahun. Angka AKB tahun 2018 sebesar 10,09 per 1000 kelahiran hidup menurun menjadi 8,80 kejadian per 1000 kelahiran hidup. Untuk capaian angka kematian ibu (AKI) melahirkan dengan target nasional < 183 per 100.000 kelahiran, mampu dicapai dengan angka jauh di bawah ini yaitu 112,07 per 100.000 kelahiran. Angka AKI ini masih menunjukkan tren meurun dalam 5 tahun terakhir yaitu -11,34 kejadian atau turun rata-rata 23,36% per tahun. Angka AKI tahun 158 per 100.000 kelahiran di tahun 2018 menjadi 112,7 kejadian per 100.000 kelahiran. Angka AKI ini selalu di bawah target nasional selama 5 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak terus membaik di Kabupaten Magetan.

Pemerintah memiliki program prioritas pencegahan dan penanganan stunting secara masif. Program ini dilakukan dengan lintas sektor antara lain Dinas Kesehatan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan melalui pengelolaan dan pemasaran hasil ikan dan



program gemar ikan, Dinas Pendidikan melalui percepatan penuntasan melek huruf masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui peningkatan gizi keluarga. Berbagai program ini berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan dan jauh di bawah target nasional. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan keluarga sehat sebesar rata-rata 9,19% setiap tahun, dimana tahun 2018 jumlah realisasi keluarga sehat sekitar 20,50% keluarga di tahun 2018, terus meningkat moderat menjadi 29% di tahun 2022. Peningkatan berbagai faktor pendukung pengurangan stunting ini telah berhasil menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan, rata-rata per tahun sebesar -0,78%. Tahun 2018 angka prevalensi balita stunting sebesar 10,45% terus menurun moderat menjadi 10,11% di tahun 2022. Angka prevalensi ini masih di bawah angka prevalensi stunting nasional yaitu 21,6% tahun 2022.

Upaya perbaikan gizi masyarakat terus dilakukan dengan memantau konsumsi energi dan protein per kapita masyarakat. Target persentase tingkat konsumsi energi untuk masyarakat di Kabupaten Magetan sebesar 100% (standar nasional: 2150 gr/kap/hr) dan mampu direalisasi sebesar 96,1% (2.065,9gr/kap/hr). sedangkan, prosentase tingkat konsumsi protein untuk masyarakat berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 100% (standar nasional: 73 gr/kap/hr). Tahun 2022 realisasi persentase tingkat konsumsi protein sebesar 128,1% (57 gr/kap/hr). Realisasi pencapaian melebihi dari target yakni sebesar 128,1%. Untuk Konsumsi Ikan Perkapita (orang/kg/th) tercatat rata-rata konsumsi ikan perkapita penduduk selama 5 tahun terakhir adalah 2,832 kg/org/tahun. Tingkat konsumsi ikan tahun 2018 yaitu 2,9 kg/org/tahun dan terus naik rata-rata 0,1 kg/org/tahun selama 5 tahun, sehingga angka konsumsi ikan warga sebanyak 3,3 kg/org/tahun di tahun 2022.

Berbagai kegiatan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka untuk mendukung capaian kinerja produksi perikanan antara lain 1) kegiatan sosialisasi Program Gemarikan



kepada Guru PAUD; 2) Fasilitasi Pemasaran Produk hasil Perikanan yang dihasilkan oleh Poklhasr dan Pokdakan melalui kegiatan bazar (Ikan segar dan Ikan Olahan); 3) Penyediaan ikan segar (Suplai Nutrisi protein) untuk masyarakat (balita) dalam kasus stunting di Kabupaten Magetan; 4) Paket Batuan suplai gizi berupa Ikan segar bagi masyarakat (balita) status Stunting; dan 5) Fasilitasi Pemasaran Pelaku usaha perikanan (pembudidaya dan pengolah produk ikan) melalui kegiatan bazar

Beberapa perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini dan penanganan stunting yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan realisasi program sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

OPD Pendukung dan Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	125.481.399.470	97.345.147.258	77,58
Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.473.580.000	2.482.890.537	71,48
Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	323.042.000	273.973.277	84,81
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.170.757.750	1.011.185.600	86,37
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	258.815.672.575	249.419.640.274	96,37
Rata-Rata Serapan Anggaran	389.264.451.795	350.532.836.946	90,05

b. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengendalian Penduduk	298.225.950	287.849.282	98,45
Pembinaan Keluarga Berencana	5.563.591.398	5.148.836.496	94,02
Rata-Rata Serapan Anggaran	5.861.817.348	5.436.685.778	92,75

c. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	329.500.000	315.061.319	95,6
Penanganan Kerawanan Pangan	349.000.000	124.396.500	35,6
Pengawasan Keamanan Pangan	59.000.000	56.822.470	96,3
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	22.500.000	22.457.900	99,8
Rata-Rata Serapan Anggaran	760.000.000	518.738.189	68,26

d. Dinas Peternakan dan Perikanan



Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	184.500.000	181.240.335	98,23
Rata-Rata Serapan Anggaran	184.500.000	181.240.335	98,23

Kendala/Hambatan yang terjadi dalam mencapai Sasaran Strategis:

- a. Indikator Angka Kematian Bayi
- Pada Tahun 2022 Angka Kematian Bayi sebesar 8,87/1000 KH sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,31% dari tahun 2021 namun sudah mencapai target sebesar 100%, Penyebab Utama kematian Bayi adalah:
- BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah).
 - Kelainan bawaan umumnya disebabkan oleh factor-faktor yang dibawa sejak lahir, yang diperoleh dari orangtuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
- b. Indikator Angka Kematian Ibu
- Pada tahun 2022 Angka Kematian Ibu sebesar 112,70/100.000 KH meskipun belum mencapai target yaitu <102/100.000 KH namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 112,73/100.000KH dibandingkan tahun 2021 sebesar 225,43/100.000KH, Penyebab utama Kematian Ibu adalah:
- Meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi yang disebabkan oleh penyebab langsung (pre eklamsi, perdarahan)
 - Meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi yang disebabkan oleh penyebab tidak langsung (penyakit penyerta ibu hamil yang tidak diketahui sebelumnya)
 - Masih tingginya kehamilan pada ibu dengan kondisi yang tidak layak hamil sehingga menambah komplikasi dan risiko kematian ibu
- c. Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standart pelayanan antenatal
- Masih terdapatnya ibu hamil yang belum memenuhi standart ANC sesuai Standart
 - Belum terciptanya alur ANC terpadu yang efektif di Puskesmas
- d. Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar pelayanan ibu bersalin.
- Belum optimalnya Puskesmas PONED di Puskesmas.
 - Jumlah Puskesmas PONED masih kurang.
 - Sarana Prasarana dan tenaga di Puskesmas PONED belum memenuhi standar.
- e. Indikator Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir pada tahun 2022 sebesar 96,80% sehingga belum mencapai target 100% dengan permasalahan sebagai berikut:
- Adanya Sistem pelaporan ganda melalui pelaporan manual dan aplikasi.
 - Adanya proses pergantian petugas.
- f. Indikator Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standart skrining Kesehatan usia produktif



Pada Tahun 2022 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standart skrining Kesehatan usia produktif sebesar 98% sehingga belum mencapai target 100% karena ada beberapa kendala yaitu:

- Sasaran Usia Produktif Sebagian besar tidak datang ke fasilitas Kesehatan khususnya pada anak sekolah.

g. Indikator Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining Kesehatan usia lanjut

Pada tahun 2022 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining Kesehatan usia lanjut sebesar 99,92% sehingga belum mencapai target 100% dengan beberapa kendala:

- Kurangnya Jumlah stik pemeriksaan seperti gula darah, kolesterol, asam urat serta blangko pemeriksaan
- Lansia yang resiko tinggi lebih dari 70 tahun tidak bisa berkunjung ke Fasilitas Kesehatan
- Jumlah lansia yang hadir terbatas
- Keterbatasan Lansia dengan tingkat kemandirian B dan C untuk mengakses layanan kesehatan

h. Indikator Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standart pelayanan Kesehatan penderita hipertensi

Pada tahun 2022 Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standart pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sebesar 88,73% sehingga belum mencapai target sebesar 100% karena adanya beberapa hambatan yaitu:

- Masyarakat tidak menyadari bahwa hipertensi merupakan penyakit berbahaya
- Kepatuhan minum obat masih rendah

i. Jumlah peserta sosialisasi gerakan makan ikan = 300 orang

j. Jumlah penerima sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan = 3 Kelompok

k. Terbatasnya jumlah barang, varian dan nilai paket bantuan, karena terkait anggaran.

l. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)

- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam
- Sulitnya mencari data yang valid dan terkini

m. Indikator Jumlah hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

- Kondisi alam yang tidak menentu (cuaca)
- Serangan organisme pengganggu tanaman
- Tidak semua petani mau menerapkan teknologi budidaya yang dianjurkan oleh pemerintah

Strategi/solusi yang diambil dalam meningkatkan capaian sasaran strategis di masa yang akan datang:

a. Indikator Angka Kematian Bayi

- Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan perinatal
- Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kasus kematian bayi dengan narasumber Dokter Spesialis Obgyn (DSOG), Dokter Spesialis Anak (DSA) serta dokter spesialis terkait kasus yang



dibahas bertujuan untuk pembelajaran kasus supaya tidak terjadi kasus yang sama dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

- Pelaksanaan rujukan terencana pada kasus resiko tinggi.
- Pelaksanaan orientasi kelas ibu balita dengan upaya optimalisasi penggunaan buku KIA.
- Untuk menurunkan kasus BBLR dan kelainan bawaan pada bayi, dilakukan koordinasi (Bimtek Petugas koordinator pelayanan Kesehatan anak) dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor, demi mempersiapkan reproduksi yang berkualitas bagi calon ibu diantaranya: Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja dan Edukasi untuk calon pengantin dengan menggunakan buku Catin.
- Pembinaan pelayanan maternal dan neonatal bagi faskes primer.
- Peningkatan Kapasitas petugas dalam Skrining Hipotiroid Kongenetal
- Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak melalui E-Kohort dan MPDN
- Penguatan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam tata kelola desentralisasi program kesehatan (regulasi, pembiayaan) dan kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan berfungsinya Tim Penakib (Penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi).

b. Indikator Angka Kematian Ibu:

- Sosialisasi Skrining Layak Hamil bagi lintas sector dan masyarakat
- Workshop Skrining Layak Hamil bagi petugas Kesehatan.
- Optimalisasi Pelaksanaan kelas Ibu Hamil sesuai pedoman terbaru.
- Pemanfaatan Buku KIA bagi Kader dan Masyarakat.
- Pendampingan Hamil Risti oleh Kader Mayangsari.

c. Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standart pelayanan antenatal

- Melaksanakan pelatihan peningkatan Kapasitas Dokter umum dan tenaga Kesehatan dalam pelayanan ANC Terpadu
- Pelaksanaan Workshop Skrining Layak hamil bagi Petugas
- Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil sesuai pedoman terbaru
- Pelaksanaan Gerakan Ibu Hamil Sehat

d. Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standart pelayanan ibu bersalin

- Melakukan Analisa untuk penambahan Puskesmas PONED di Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan SK Bupati

e. Indikator Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan Kesehatan bayi baru lahir

- Peningkatan kapasitas petugas pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Bimbingan teknis untuk melaksanakan refreshing Definisi Operasional
- Pelayanan SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital) untuk seluruh bayi yang lahir yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo
- Bimbingan teknis Kader Kesehatan dan Lintas Sektor dalam pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.

f. Indikator Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standart skrining Kesehatan usia produktif



- Pengaktifan deteksi dini factor resiko PTM kesekolah dan pondok pesantren
- g. Indikator Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut sesuai standar skrining Kesehatan usia lanjut
 - Memeberikan dukungan sarana prasarana termasuk didalamnya blangko serta stik pemeriksaan untuk lansia
 - Melakukan kunjungan rumah bagi lansia resiko tinggi
 - Mendorong/ Menggerakkan lansia yang tidak pernah kontak dengan petugas untuk pergi ke Fasilitas Kesehatan atau Posyandu Lansia
 - Menambah jumlah caregiver informal di masyarakat sehingga bisa membantu petugas Kesehatan dalam kunjungan rumah
- h. Indikator Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standart pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
 - Melakukan kegiatan kunjungan rumah sehat
 - Pengaktifan deteksi dini factor resiko PTM
- i. Indikator meningkatkan jumlah peserta / penerima sosialisasi program Gemarikan
 - Kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan (PAUD) dalam rangka sosialisasi Gemarikan di Sekloah sebagai Narasumber.
 - Sosialisasi melalui Media yang ada (WA, Facebook) dan leaflet terkait sosialisasi program Gemarikan dan bentuk 2 kegiatannya (Bazar dll).
 - Mendorong dan mendampingi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan untuk penerapan standaart mutu
- j. Indikator meningkatkan Jumlah penerima Sarpras P2HP
 - Mendorong dan mendampingi kelompok untuk mengajukan Bantuan guna pengembangan usaha melalui APBD Propinsi, Pusat atau CSR Perusahaan
 - Mendorong dan mendampingi Kelompok dalam pengembangan usaha melalui penyuluhan.
- k. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)
 - Tertib data untuk mendukung data yang valid dan terkini
 - Edukasi kepada generasi milenial serta melalui sector pendidikan
- l. Indikator Jumlah hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 - Pengadaan demplot tanaman
 - Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu

Berbagai inovasi dilakukan oleh dinas terkait dan mampu menyabet berbagai prestasi dan penghargaan, antara lain:

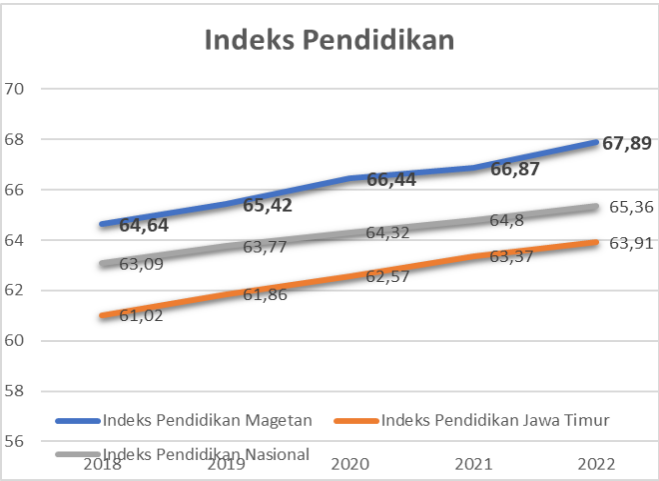
 1. Mendapatkan Piagam Penghargaan untuk kategori Promosi Teraktif Tingkat Jawa Timur.
 2. Award Peduli Ketahanan Pangan Kategori Bidang Pemanfaatan lahan Marginal Tingkat Jawa Timur.
 3. Indeks Ketahanan Pangan Nomor Nasional dan Nomor 2 Se-Jawa Timur.
 4. Penghargaan Swasti Saba Wistara oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Sasaran Strategis-2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pendidikan	81,50	67,44	67,89	100,67%	72,90
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				100,67%	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya taraf pendidikan masyarakat mencapai 100,67% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Angka Indeks Pendidikan Kabupaten Magetan rata-rata sebesar 66,65 poin selama 5 tahun terakhir. Angka ini mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebanyak 0,815 poin atau 1,23%. Tahun 2018 Indeks Pendidikan masih angka 64,64 poin dan terus naik 0,815 poin menjadi 67,89 poin di tahun 2022. Indeks pendidikan ini menunjukkan tingkat warga yang angka melek pendidikan di Kabupaten Magetan. Angka Indeks Pendidikan Kabupaten Magetan selalu di atas capaian indeks pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, di mana tahun 2022 ini sebesar 65,36 poin dan 63,91 poin. Capaian kinerja indikator pendukung menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah terus mengalami kenaikan setiap tahun 0,08 tahun atau 0,58% selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2017 selama 13,72 tahun menjadi 14,05 tahun 2022 atau setara dengan pendidikan tinggi diploma 2. Sedangkan, untuk rata-rata lama sekolah juga terus mengalami kenaikan setiap tahun rata-rata 0,11 tahun atau 1,31%, selama 5 tahun terakhir, dari selama 7,94 tahun di tahun 2017 menjadi 8,66 tahun di tahun 2022 atau setara dengan SMP kelas. Sedangkan, untuk Rata-rata lama sekolah di atas capaian Provinsi Jawa Timur yaitu 8,03 tahun.



Selama pandemi Covid-19 proses pendidikan dasar tetap dilakukan secara daring (online), sehingga proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidikan tetap berjalan. Capaian kinerja pendidikan lain, khususnya layanan pendidikan antara lain: Angka melek huruf penduduk sudah mencapai 100% sejak tahun 2020 - tahun 2022 atau naik 0,05% dibandingkan tahun 2019, sehingga menjadikan Kabupaten Magetan menjadi bebas buta huruf. Angka Melek huruf ini jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yaitu 93,32% dan 96,35% dari jumlah penduduk. Banyak warga kejar paket A dan B adalah wirausaha muda yang jumlahnya terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Rata-rata jumlah wirausaha muda sebanyak 21,41% selama tahun





terakhir. Tahun 2020 jumlah ini sebanyak 20,17% dan naik moderat 1,89% selama 3 tahun menjadi 22,06% pada tahun 2022. Pertumbuhan wirausaha muda ini menunjukkan animo masyarakat terhadap entrepreneurship sangat tinggi.

Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mencapai 100% selama 5 tahun berturut-turut. Nilai APK SD/MI terus mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, di mana 2018 sebesar 100% terus mengalami kenaikan yang rendah menjadi sebesar 105,36% di tahun 2022. Untuk nilai APK SMP/ MTs juga mengalami kenaikan yang justru lebih signifikan dimana tahun 2017 hanya sebesar 100% menjadi 114,66 di tahun 2022. Sedangkan, untuk nilai APM SD/MI mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami fluktuasi dinamis, di mana tahun 2017 hanya sebesar 99,31 menjadi 99,44 di tahun 2022. Terakhir, untuk angka prosentase akreditasi sekolah dengan Akreditasi A terus menunjukkan peningkatan dimana untuk Akreditasi SD nilai akreditasi A sebesar 99,24% dan SMP sebesar 82,85%.

Kinerja pendidikan ini didukung oleh tambahan koleksi buku perpustakaan digital daerah yang terus naik rata-rata 2.542 tiap tahun dari tahun 2018 sebanyak 76.318 buku menjadi 84.696 buku di tahun 2022. Tambahan koleksi buku perpustakaan cenderung turun setiap tahun karena saat ini di era digital yang banyak membutuhkan buku referensi baru yang *up to date*. Indikator pendukung indeks minat baca masyarakat juga terus naik, dimana tahun 2019 ditarget 74,76 poin rata-rata naik 0,69 poin setiap tahun menjadi 75,45 poin di tahun 2022. Dukungan pencapaian kinerja pendidikan menunjukkan tren kenaikan. Beberapa Perangkat daerah yang terkait antara lain, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai *leading sector*, lalu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya untuk urusan kebudayaan, serta urusan Kepemudaan dan Olahraga khususnya terkait dengan pengembangan kepemudaan dan organisasi pemuda. Realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengelolaan Pendidikan	129.937.548.492	121.791.824.134	93,73
Pendidik dan Tenaga Pendidikan	6.693.200.000	6.607.482.400	98,72
Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	800.000.000	708.990.000	88,62
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.959.185.000	6.081.951.900	87,39
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	832.200.000	826.875.000	99,36
Rata-rata Serapan Anggaran	145.222.133.492	136.017.123.434	93,66

b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pembinaan Perpustakaan	1.439.268.000	1.360.106.388	94,50

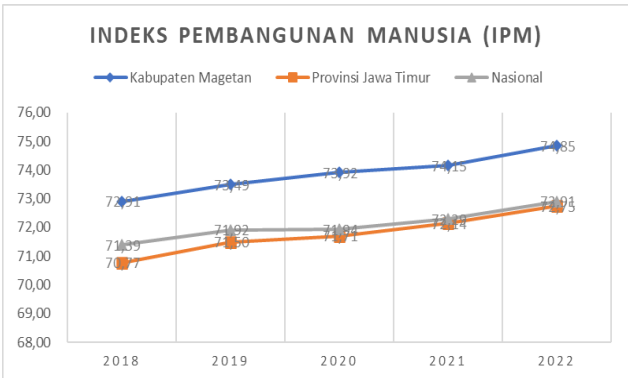


Rata-rata Serapan Anggaran	1.439.268.000	1.360.106.388	94,50
----------------------------	---------------	---------------	-------

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Kebudayaan	2.135.460.950	2.116.845.600	99,13
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	759.125.000	478.668.490	63,06%
Rata-rata Serapan Anggaran	2.894.585.950	2.595.514.090	99,13%

Inovasi peningkatan minat baca masyarakat juga dilakukan melalui layanan e-book di perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling dengan mobil. Maka, diperlukan strategi dan kebijakan prioritas pendidikan dalam mempercepat capaian kinerja pendidikan. Berbagai program ini mampu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meski di tengah resesi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun dari 4 indikator yaitu Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Penduduk. IPM Kabupaten Magetan menunjukkan angka yang terus meningkat secara progresif sejak tahun 2015 sebesar rata-rata 0,51 poin. Angka IPM tahun 2018 angka IPM sebesar 72,91 poin yang terus meningkat sampai dengan tahun 2022 menjadi sebesar 74,85 poin. Capain angka IPM tahun 2022 ini tetap masih jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur 72,75 poin dan IPM Nasional 72,91 poin. Angka IPM Kabupaten Magetan termasuk kategori tinggi di Indonesia dan menempati peringkat ke 11 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Peringkat ini naik 1 tingkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang masih berada di peringkat 12. Capaian IPM Kabupaten Magetan mulai tahun 2018 selalu berada di atas capaian angka IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional secara konsisten. Capaian IPM Kabupaten Magetan mulai tahun 2015 selalu berada di atas capaian IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional secara konsisten. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain:

- a. Masih banyak penduduk Kabupaten Magetan yang berijazah SD maupun SMP dan enggan untuk mengikuti program kesetaraan.
- b. Kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan masih rendah terutama untuk daerah basis pertanian yang ada jauh dari perkotaan.
- c. Persentase budaya baca masyarakat menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022 di sebabkan masyarakat cenderung melakukan aktifitas pemenuhan kebutuhan ekonomi (mencari nafkah).
- d. Sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang masih terbatas, antara lain koleksi buku dan fasilitas ruang baca yang terbatas.
- e. Pembatasan jam layanan dan jumlah pengunjung.



- f. Indikator Perpustakaan Desa/Kelurahan aktif
 - Rendahnya kepedulian pemerintah desa terhadap keberadaan perpustakaan
 - Pembatasan Kegiatan sehingga menyebabkan pengurangan jumlah pembinaan ke perpustakaan Desa/Kelurahan
- g. Indikator Jumlah pengadaan judul buku perpustakaan (Judul)
 - Berkurangnya jumlah pengadaan buku dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya *refocusing*/pengurangan anggaran.
- h. Pembatasan Kegiatan sehingga menyebabkan pengurangan jumlah pembinaan ke perpustakaan Desa/Kelurahan.
- i. Masih perlu pemberdayaan dan pengembangan organisasi pemuda baik melalui organisasi KNPI, Pemuda pelopor maupun organisasi lainnya.
- j. Pandemi covid menyulitkan para wirausaha muda.

Berbagai strategi kebijakan peningkatan capaian kinerja yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi untuk menarik minat warga (usia 25 tahun ke atas) yang masih memiliki ijazah terakhir setingkat SD atau SMP untuk mengikuti program kesetaraan.
- b. Peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan dan bacaan dengan melakukan berbagai inovasi antara lain penyiapan format e-book di perpustakaan daerah dan perluasan layanan mobil keliling perpustakaan.
- c. Melanjutkan upaya perluasan dan pemerataan pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana Pendidikan.
- d. Peningkatan promosi layanan perpustakaan, peningkatan pemanfaatan Graha Pusat Literasi dan ruang baca terbuka, dan peningkatan kapasitas internet.
- e. Pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu menyiapkan sarana fisik dan non fisik untuk kegiatan pelayanan pendidikan yang berkualitas yang meliputi komponen-komponen pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan SPM.
- f. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- g. Mencari penyebab putus sekolah dan pembinaan langsung ke sekolah maupun keluarga untuk dapatnya melanjutkan sekolah baik formal maupun Kesetaraan (Kejar paket).
- h. Promosi layanan melalui media social dan Pemanfaatan Layanan wifi gratis.
- i. Meningkatkan layanan kepada masyarakat termasuk disabilitas
- j. Meningkatkan Layanan berbasis digital dengan memanfaatkan Layanan e-book.
- k. Pemanfaatan Ruang Baca Terbuka untuk kegiatan pembelajaran Siswa / Mahasiswa.
- l. Melalui program bantuan modal usaha dari pemerintah sangat membantu dalam upaya peningkatan wirausaha muda.
- m. Pengembangan SDM pemuda seleksi pemuda pelopor dan kegiatan di KNPI.

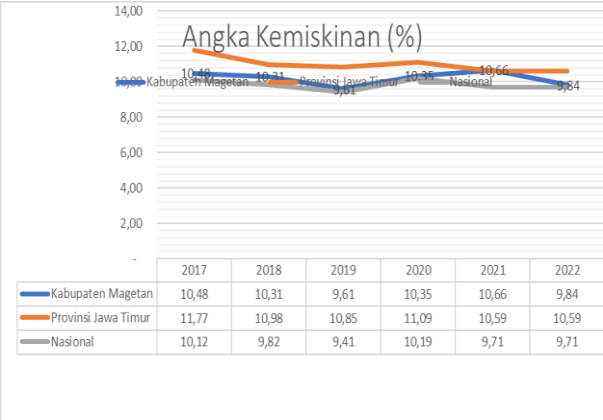


Pemerintah Kabupaten Magetan memberikan perhatian yang besar terhadap akses pelayanan publik, salah satunya adalah penerapan aplikasi sistem digital proses layanan perpustakaan. Beberapa prestasi diraih yaitu: 1) sebagai perpustakaan Kabupaten/Kota Terbaik dalam implementasi Program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial tingkat Nasional dan Provinsi dan 2) Juara 1 Inkubasi Literasi Nasional dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat tingkat Nasional.

Sasaran Strategis-3 : Meningkatnya Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

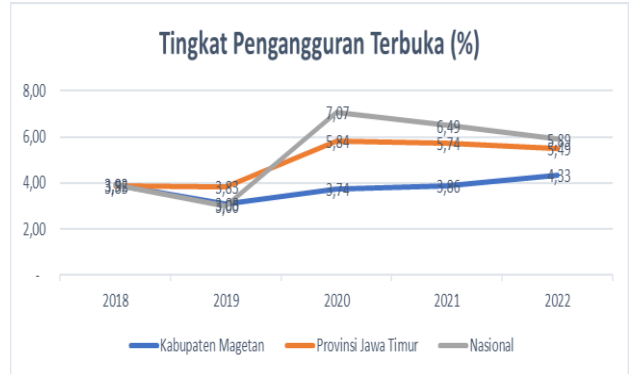
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan	10,66%	9,52	9,84	96,53	9,9%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				96,53%	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat mencapai 90,22% atau kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) buah indikator. Persentase penduduk Kabupaten Magetan yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami tren penurunan selama 5 tahun terakhir sebesar 0,13% per tahun di mana tahun 2018 angka kemiskinan sebesar 10,31% dan terus menurun secara moderat dan pada tahun 2019 tinggal 9,61%. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 akibat resesi ekonomi dunia, kondisi ekonomi daerah turun sehingga telah menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Akibatnya, jumlah angka kemiskinan Kabupaten Magetan meningkat sebesar 0,74% menjadi 10,35% tahun 2020 atau sekitar 65.070 jiwa dan pada tahun 2021 kembali naik 0,31% menjadi 10,66% atau sekitar 67.750 jiwa. Seiring dengan membaiknya ekonomi daerah, maka Tahun 2022 angka kemiskinan sebanyak 9,84% atau 62.650 orang. Angka kemiskinan ini turun 0,82% dibandingkan dengan tahun 2021. Angka kemiskinan Kabupaten Magetan ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur 10,59% dan Nasional sebesar 9,71%. Beberapa perangkat daerah, diantaranya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pangan juga memberikan bantuan bagi petani miskin untuk menjadi *buffer* agar tidak semakin miskin. Tahun 2021 sebanyak 400 petani miskin yang memperoleh bantuan dan tahun 2022 sebanyak 250 orang petani miskin. Sektor basis ekonomi Kabupaten Magetan yang bertumpu pada sektor primer, yaitu masih rendahnya harga jual pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor lambatnya kenaikan pendapatan masyarakat saat ini.





Kabupaten Magetan telah mampu mengukir sejarah terhadap capaian kinerja angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun 2019 yaitu mampu berada di bawah angka TPT Provinsi Jawa Timur dan nasional sampai dengan tahun 2022. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka tren meningkat secara moderat, yaitu 0,12% pertahun di mana tahun 2018 masih tinggi sebesar 3,92% kemudian tahun 2019 menurun menjadi 3% dan kembali meningkat di tahun 2020 dan terus meningkat sampai akhir tahun 2022 sebesar 4,33%. Tahun 2020, seiring dengan resesi ekonomi global akibat Pandemi Covid-19, aktivitas terjadi PHK besar-besaran dari sektor formal produksi, yang akibatnya telah mendorong peningkatan pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Magetan ikut terdampak di tahun 2020 dengan angka TPT meningkat sebesar 0,66% menjadi 3,74% dan tahun 2021 meningkat lagi sebesar 0,12% menjadi 3,86% atau sekitar 14.812 orang. Tahun 2022 4,33%. Meskipun demikian, angka TPT Kabupaten Magetan tahun 2021 ini masih jauh di bawah angka TPT Jawa Timur yaitu 5,49% dan nasional 5,89%. Sektor basis ekonomi Kabupaten Magetan yang bertumpu pada sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan menjadi salah satu faktor rendahnya kenaikan angka TPT ini. Capaian kinerja ini menunjukkan pembangunan Kabupaten Magetan berbasis sektor pertanian masih mampu memiliki tingkat produksi yang baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan yang tumbuh positif 3,89% juga telah mendorong pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK. Pengembangan kegiatan ekonomi bagi pedagang kaki lima (PKL) dilakukan dengan jumlah binaan yang terus meningkat tiap tahun, yaitu 375 di tahun 2018 menjadi 645 di tahun 2022 dan pelatihan bagi pemuda terkena PHK.

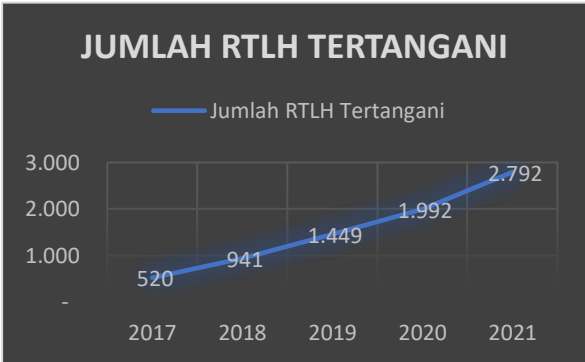


Kemiskinan menjadi salah satu prioritas sasaran pembangunan dan sekaligus tema pembangunan daerah Kabupaten Magetan. Berbagai perangkat daerah telah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk upaya mengurangi dan mencegah kemiskinan lebih banyak. Beberapa perangkat daerah tersebut antara lain Dinas Perumahan dan Permukiman dengan program rumah tidak layak huni, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan program peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk PKL, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan program Pemberdayaan usaha mikro, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk kemudahan izin usaha dan fasilitasi promosi investasi untuk dapat meningkatkan serapan tenaga kerja. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan berbagai program pembinaan terhadap usaha mikro. Sejak tahun 2018, jumlah usaha mikro yang dibina naik rata-rata 223 usaha atau 1,30%, dari 16.773 usaha tahun 2018 menjadi 17.663 di tahun 2022 atau rata-rata jumlah binaan tiap tahun 15.384 usaha. Ditambah jumlah wirausaha baru yang difasilitasi 64 orang.





Upaya pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program pengembangan perumahan dan program kawasan permukiman kumuh. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam meningkatkan rumah layak huni secara mandiri, bekerjasama dengan CSR perusahaan (antara lain Bank Jatim, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Syari'ah) dan berbagai komunitas masyarakat. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa data perkembangan jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun atau direhabilitasi terus meningkat dimana tahun 2017 sebanyak 520 rumah dan terus meningkat secara signifikan menjadi 2.729 rumah di tahun 2022 atau terjadi rata-rata peningkatan 568 rumah tiap tahun atau 53,24% per tahun. Pertumbuhan jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun ini sangat signifikan. Selain itu, jumlah rekomendasi ijin Siteplan yang dikeluarkan oleh dinas menunjukkan tren peningkatan dimana tahun 2020 hanya sebanyak 5 ijin dan tahun 2021 ini sebanyak 8 ijin siteplan. Kawasan kumuh yang tertangani juga tren nya menurun, dimana tahun 2019 sebesar 10,36 ha dan tahun 2021 sebesar 14,91 ha atau setiap tahun turun 2,275 ha. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat, sehingga terus terjadi pemenuhan kebutuhan dasar perumahan bagi masyarakat. Dinas juga terus melakukan penguatan basis data kegiatan melalui pengembangan aplikasi sistem e-RTLH (Basis data rumah tidak layak huni secara online dan update), sehingga kebijakan penanganan RTLH dapat terpadu, efektif dan berkelanjutan.



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perindustrian dan perdagangan melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan sarana perdagangan bagi usaha mikro baik berupa pasar tradisional maupun fasilitas pedagang kaki lima. Akses perdagangan ini sangat penting untuk dapat memberikan akses ekonomi produktif bagi mereka. Jumlah pasar yang aktif di Kabupaten Magetan rata-rata 60 pasar setiap tahun. Jumlah pasar kondisi baik terus menunjukkan adanya peningkatan jumlah secara moderat selama 5 tahun terakhir, dimana tahun 2018 sebanyak 40 buah pasar dan terus meningkat menjadi 77 buah di tahun 2022 atau naik rata-rata 9 buah atau 18,34% per tahun. Sedangkan, jumlah industri kecil yang dibina sebanyak 13.466. Dari sisi investasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP sudah berusaha keras untuk menyediakan akses pekerjaan bagi masyarakat. Tahun 2022 telah terealisasi investasi sebesar Rp.1.551.369.078.594 dengan jumlah investor sebanyak 4.319 pengusaha yang hampir semuanya didominasi oleh usaha kecil, sehingga mampu menyediakan lapangan kerja sebanyak 21.014 tenaga kerja. Untuk Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertindak sebagai *buffer* kebijakan penanggulangan kemiskinan, melakukan berbagai kebijakan pengurangan kemiskinan melalui penyediaan bantuan bagi PMKS dan pemberdayaan PMKS melalui KUBE program tercapai 100%.





Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

a. Dinas Sosial.

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.381.400.000	1.356.469.350	98,20
Pemberdayaan Sosial	17.637.788.550	16.030.319.000	90,89
Rehabilitas Sosial	2.305.700.000	1.978.412.847	86,00
Program Penanganan Bencana	280.000.000	273.107.000	97,54
Pengelolaan taman Makam Pahlawan	60.000.000	57.166.000	95,28
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.445.739.687	4.075.806.083	91,68
Rata-rata Serapan Anggaran	26.110.628.237	23.711.280.280	91,04

b. Dinas PPKB PP dan PA

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	62.502.700	61.532.700	98,45
Pemenuhan Hak Anak	61.830.000	58.134.230	94,02
Perlindungan Khusus Anak	451.800.000	222.506.099	49,25
Perlindungan Perempuan	54.100.000	52.355.400	96,78
Pemberdayaan dan Peningkatan KS	3.509.312.500	2.392.987.850	68,19
Rata-rata Serapan Anggaran	8.585.284.887	6.863.322.362	79,94

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan Distribusi Sarana Perdagangan	12.208.368.550	11.579.695.751	94,85
Serapan Anggaran	12.208.368.550	11.579.695.751	94,85

d. Dinas Tenaga Kerja

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.096.208.757	1.035.646.410	94,48
Hubungan Industrial	113.737.400	109.742.550	96,49
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	160.000.000	156.873.864	98,05
Serapan Anggaran	1.369.946.157	1.302.262.824	95,06

Pemerintah daerah memberikan perhatian besar pada pedagang sektor informal karena memiliki ketahanan ekonomi. Jumlah Pedagang kaki lima yang dibantu terus naik dari 2017 sebanyak 65 pedagang menjadi 192 di tahun 2022. Bantuan tersebut berupa dukungan sarana perdagangan dan fasilitasi dengan CSR perusahaan di Magetan. Selain itu, sebanyak 400 petani yang diberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitasnya. Berdasarkan capaian kinerja diatas, beberapa kendala atau hambatan dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

1. Masih tingginya keluarga rentan miskin.
2. Belum memiliki Lembaga, fasilitas, sarana untuk pembinaan bagi anak sekolah formal yang bermasalah khususnya tingkat SD.
3. Basis data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu belum tervalidasi/tersedia.
4. Minimnya lokasi penempatan, sarana dan prasarana pendukung pedagang sektor informal dan kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak usahanya.
5. Pembatalan pesanan produk dari luar negeri dikarenakan pandemi covid
6. Sumber Daya Manusia dari IKM masih kurang
7. Sarana dan prasarana pendukung produksi belum memenuhi kebutuhan IKM
8. Kurangnya kebersamaan antar IKM dalam hal produksi dan pemasaran
9. Belum dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal
10. Data rumah tidak layak huni dinamis dan selalu ada perubahan setiap tahun, sehingga menyulitkan dinas untuk membuat skala prioritas.
11. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus, Pengawas dan Pengelola mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan koperasi dengan baik di bidang kelembagaan, Usaha dan keuangan
12. Kesadaran berkoperasi para anggota masih rendah
13. Permodalan yang terbatas
14. Penerapan prinsip-prinsip koperasi belum maksimal
15. Minimnya pengetahuan tentang teknologi, akses permodalan, lemahnya kelembagaan dan SDM, kurangnya promosi, pemasaran dan kemitraan, minimnya diversifikasi dan inovasi, dan lemahnya perijinan dan standarisasi produk UM.
16. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan SDM masyarakat peternak dan pembudidaya ikan miskin, serta keterbatasan jumlah bantuan terkait teknis dan kelembagaan pembudidayaan ikan, keterbatasan Modal Usaha, budidaya ikan untuk masyarakat perikanan miskin belum berkonsep untuk berkelanjutan.
17. Kurangnya kompetensi SDM, keterbatasan akses distribusi, masih belum lengkapnya teknologi dan keterbatasan bahan baku, sehingga industri kurang berkembang.
18. Terkait dengan capaian kinerja pembinaan pedagang kaki lima (PK5), kendala yang dihadapi adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung dan penempatan yang diijinkan untuk pedagang kaki lima



(PK5), dan kondisi Pandemi yang membatasi ruang gerak pedagang kaki lima (PK5) untuk berjualan di area publik.

19. Kendala dalam mencapai persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan, antara lain terjadinya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada terhambatnya aktivitas perekonomian, sehingga banyak perusahaan melakukan efisiensi untuk menekan kerugian akibatnya penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan karena banyak pekerja dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK), pelayanan penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ditutup mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2021 sehingga tidak ada pemberangkatan, dan tidak bisa terselenggaranya kegiatan Job Fair di Tahun 2021.
20. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modal.
21. Belum maksimalnya pemanfaatan LKPM Online oleh PMA/PMDN sebagai sarana pencatatan realisasi investasi
22. Belum maksimalnya Promosi Investasi yang sesuai dengan kebutuhan calon investor.
23. Belum tersedianya data potensi investasi yang komprehensif.
24. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data penanaman modal yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
25. Belum optimalnya upaya fasilitasi usaha mikro dan kecil.
26. Kendala yang terjadi dalam peningkatan Persentase Wirausaha Muda yaitu karena ada pandemi covid 19 sangat berdampak pada wirausaha muda yang baru tumbuh dan berkembang.

Sstrategi dan solusi yang ditempuh untuk peningkatan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dan terstruktur mengupdate data kemiskinan terutama dinas sosial dengan tim, perangkat kecamatan dan kelurahan/desa;
2. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu agar penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan secara tepat baik secara sasaran maupun jenis penanganannya;
3. Mengusulkan bantuan Program KUBE Fakir Miskin ke Kementerian Sosial;
4. Bekerjasama dengan UPT/Balai Penanganan Anak secara rutin mengirim anak bermasalah dalam pendidikan formal;
5. Pengajuan bantuan dana untuk pendukung biaya operasional karyawan;
6. Diperlukan pembinaan secara berkelanjutan untuk Sumber Daya Manusia dari IKM;
7. Bantuan sarana penunjang untuk IKM;
8. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu agar penanganan fakir miskin dapat dilaksanakan secara tepat baik secara sasaran maupun jenis penanganannya;
9. Melakukan pengembangan aplikasi sistem untuk melakukan update data terkait dengan rumah tidak layak huni;
10. Meningkatkan capaian pendaftaran JKN oleh Pemerintah Daerah, dengan cara meningkatkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah dalam



bentuk kepesertaan JKN bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan kategori kemiskinan yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PBI Daerah);

11. Pengembangan sistem database penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terpadu dan dilakukan update secara berkala;
12. Berbagai fasilitasi dan peningkatan ketrampilan serta askes pasar dan teknologi oleh pemerinntah daerah kepada industri kecil;
13. Melakukan pendampingan dan pembinaan teknis dan kelembagaan dan Pemberian paket sarpras budidaya untuk masyarakat perikanan miskin untuk meningkatkan produktivitas peternak dan pembudidaya ikan;
14. Pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima secara terpadu antara lain dengan menggandeng dukungan CSR dari pihak swasta/BUMN dan penataan ruang publik yang mengakomodir tempat pedagang kaki lima (PK5) yang representative;
15. Melaksanakan *Job Canvassing*/penjajakan kerjasama perekrutan ke berbagai perusahaan untuk meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan;
16. Peningkatan tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kewirausahaan, maka dilakukan strategi koordinasi dan konsultasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Magetan agar kegiatan pelatihan tahun 2022 dapat dilaksanakan dan saat pelaksanaan kegiatan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat bagi seluruh komponen yang terkait dengan kegiatan;
17. Peningkatan prosentase Pekerja/Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek dilakukan dengan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih digiatkan;
18. Meningkatkan kapabilitas SDM di lingkungan Dinas Tenaga Kerja khususnya didalam menginventarisir dokumen-dokumen program/kegiatan sehingga dapat tertata dengan baik serta mempercepat peyusunan SPJ sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran untuk kegiatan selanjutnya;
19. Meningkatkan kualitas SDM Pengurusan, Pengawasan dan Pengelola melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis, Pendampingan sehingga berkompeten;
20. Merekrut anggota yang berkompeten dan menjalankan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
21. Memfasilitasi permodalan koperasi dengan pihak perbankan, LPDB serta lembaga keuangan lainnya;
22. Menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian secara baik dan konsisten;
23. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro melalui kolaborasi, transformasi, dukungan teknologi, pemanfaatan peluang, inovasi, kemudahan Ijin Usaha, Penguatan lembaga dan SDM, dan branding dan penggalian potensi;
24. Peningkatan kerjasama dengan CSR dari pihak swasta/BUMN baik untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaku UMK maupun kemitraan usaha;
25. Penataan ruang publik yang mengakomodir tempat pedagang kaki lima (PK5), sehingga dapat dibentuk sentra kuliner dan PKL di daerah;
26. Dengan mengadakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PK5) tentang digital marketing sehingga dapat membantu untuk menjual barang dagangannya melalui *marketplace*;



- 27. Memberikan bantuan modal usaha dari pemerintah sangat membantu dalam upaya peningkatan wirausaha muda untuk meningkatkan wirausaha muda;
- 28. Pengembangan SDM pemuda melalui seleksi pemuda pelopor dan kegiatan di KNPI untuk meningkatkan Organisasi Pemuda Aktif;
- 29. Penciptaan lingkungan yang kondusif dan perluasan akses potensi usaha dan akses pemanfaatan teknologi digital bagi generasi muda sehingga mampu produktif;
- 30. Dukungan kebijakan pengembangan usaha yang kondusif dan fasilitas pengembangan berbagai konten digital marketing serta tempat-tempat horspot untuk pemasaran online, sehingga masyarakat memiliki kemudahan dalam mengembangkan pemasaran;
- 31. Meningkatkan kerjasama dengan seluruh pihak, khususnya dunia usaha untuk dapat melakukan kemitraan dengan industri kecil di Magetan;
- 32. Memfasilitasi pelaku usaha dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik secara online maupun offline;
- 33. Memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal;
- 34. Meningkatkan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 35. Menyusun peta potensi investasi dan data peluang investasi;
- 36. Promosi Investasi melalui digital multimedia dan *Investment Project Ready to Offer (I-PRO)*;
- 37. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan perizinan.

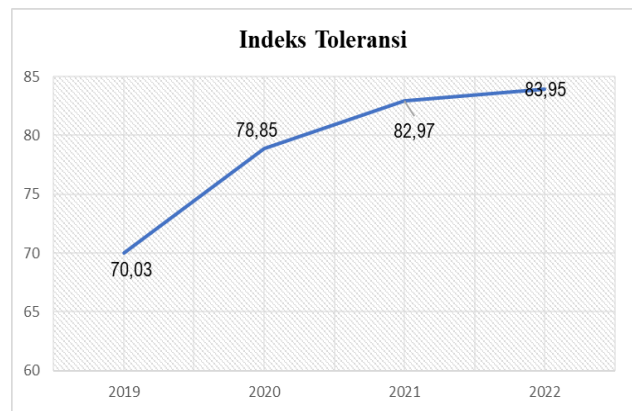
Perangkat daerah selalu aktif melakukan inovasi pelayanan. Beberapa inovasi yang dilakukan antara lain: 1) Inovasi Jempol Peri Jemput Bola untuk Peningkatan Realisasi Investasi; 2) Inovasi Pepeling (Pelayanan Perizinan Keliling ke Kecamatan Kecamatan dan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Magetan); 3) Inovasi LA-ZIK (Layanan antar Izin Khusus) Layanan perizinan untuk kaum tentan dan difable; 4) Inovasi *Weekend Service* (Pelayanan Akhir Pekan) yaitu pelayanan dilaksanakan pada hari sabtu; dan 5) Inovasi Pentas Cermat (Pelayanan Perizinan yang Berkualitas, Cepat, Mudah, dan Akurat) Proses perizinan melalui teknologi informasi berupa tanda tangan digital; 6) Mengintegrasikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan; 7) Fasilitasi pelaku usaha dalam pendampingan penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik secara online maupun offline; dan menyusun peta potensi dan peluang investasi serta menyusun *Investment Project Ready to Offer (I-PRO)*.

Sasaran Strategis-4 : Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Tertib dan Agamis

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Toleransi	82,97%	78,85	83,95	106,47	79%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				106,47%	



Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya masyarakat yang rukun, tertib dan agamis mencapai 106,47% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Capaian beberapa kinerja pendukung menunjukkan perbaikan terus-menerus. Indeks toleransi rata-rata 78,95 poin selama 5 tahun terakhir. Indeks toleransi naik rata-rata 4,64 poin per tahun atau 6,33%, di mana tahun 2019 sebesar 70,03 poin dan tahun 2022 meningkat drastis menjadi 83,95 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kondusifitas masyarakat sangat berhasil. Dukungan untuk mewujudkan ketertiban ini dilakukan melalui pembinaan terhadap petugas perlindungan masyarakat (linmas) yang tahun 2022 naik sebanyak 923 orang petugas menjadi 7.755 orang yang tersebar di 235 kelurahan/desa, sehingga cakupan petugas linmas tiap kel/desa sebesar 33 orang. Cakupan petugas linmas di desa juga terus meningkat, jika pada tahun 2018 berjumlah 109% meningkat menjadi 115% di tahun 2015 atau rata-rata naik 1,5% per tahun. Capaian indeks toleransi terus naik selama 3 tahun terakhir dari 70,03 di tahun 2019 menjadi 82,97 di tahun 2022. Pada sub urusan pemadam kebakaran, cakupan jumlah prosentase kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu (*response time*) selama kurang dari 15 menit terus meningkat dari tahun 2018 sebanyak 40 tertangani terus meningkat sampai akhir tahun 2022 sebanyak 71 tertangani atau naik sebanyak 18 penanganan < 15 menit tiap tahun atau sebesar 41,62% setiap tahun. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui program-program pendukung sasaran strategis:



a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Peningkatan Konflik Sosial	363.000.000	359.889.450	99,14
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	660.500.000	655.645.553	99,26
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	274.500.000	257.082.225	93,65
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	105.000.000	84.170.550	80,16
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.303.615.000	2.290.551.884	99,43
Rata-Rata Serapan Anggaran	3.706.615.000	3.647.339.662	98,40

b. Satuan Polisi Pamong Praja



Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.096.659.169	4.151.073.358	81,45
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.318.362.000	1.011.825.330	76,75
Rata-Rata Serapan Anggaran	6.415.021.169	5.162.898.688	80,48

Beberapa hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut antara lain:

- a. Belum adanya sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga PPNS yang ada masih tersebar di berbagai OPD.
- b. Belum diaktifkannya unit Satpol PP di wilayah kecamatan sehingga penegakan perda di masing - masing wilayah kecamatan belum optimal.
- c. Belum diaktifkannya unit Satpol PP di wilayah kecamatan sehingga penegakan perda di masing - masing wilayah kecamatan belum optimal.
- d. Kurangnya sarana prasarana dan personil untuk menunjang optimalisasi kegiatan operasional penegakan perda dan pemadam kebakaran
- e. Belum adanya unit pembantu / posko di setiap wilayah manajemen kebakaran sehingga menyebabkan penanganan pemadaman kebakaran di wilayah tertentu kurang optimal sehingga tidak memenuhi respon time 15 menit.
- f. Masih adanya paham radikalisme dan terorisme yang bisa mengganggu kerukunan beragama di masyarakat.
- g. Masih rendahnya partisipasi generasi muda dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik masyarakat.
- h. Masih kurangnya anggaran untuk pembinaan dan sosialisasi tentang kerukunan beragama sehingga belum bisa mencakup seluruh wilayah.

Beberapa strategi kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

- a. Mengoptimalkan pembinaan linmas desa di wilayah kecamatan.
- b. Mengupayakan penambahan personil melalui BKD dan pengadaan sarana prasarana untuk penertiban dan pemadam kebakaran
- c. Tahun 2023 membuka unit pembantu/posko di wilayah Kecamatan Parang
- d. Mengupayakan pengadaan personil dan sarana prasarana pemadam kebakaran serta melakukan perbaikan dan perawatan secara rutin sarana prasarana pemadam kebakaran yang sudah ada.
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas pemadam kebakaran dalam menangani dan mengelola penyelesaian dampak kebakaran.
- f. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme serta mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

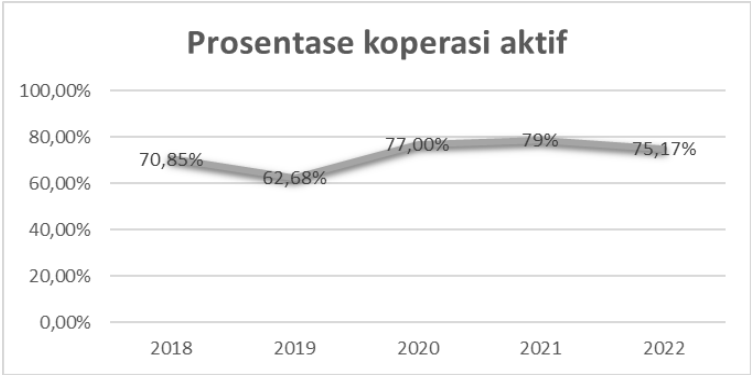


- g. Mengembangkan jiwa kepedulian generasi muda tentang potensi konflik melalui pelatihan deteksi dini cegah dini terhadap konflik masyarakat.

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan
Strategis-5

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai Omset Usaha Koperasi dan Usaha Mikro (Juta Rp.)	941.770	873.840	1.098.536	125,71	963.200
Nilai Investasi (Rp)	1.136.436.573.269	400.000.000.000	1.551.369.078.594	387,84	450.000.000.000
Jumlah Investor	3.242	1.120	4.319	385,63	1.122
Nilai PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rp.)	856.400,40	782.055,27	986.548 (ADHB)	126,15	846.743,87
Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Juta Rp.)	3.116.120,90	2.417.898,53	2.318.350 (ADHK)	95,88%	846.743,87
Nilai PDRB Sektor Pertanian (Juta Rp.)	5.820.792,10	3.945.931,52	6.172.989 (ADHB)	156,43	4.043.767,21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				224,24%	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kemampuan / keberdayaan koperasi dan usaha mikro mencapai 224,24% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UM) dan Koperasi di Kabupaten Magetan memiliki tren terus naik secara moderat selama 3 tahun terakhir. Jumlah usaha mikro sebanyak 6. 616 usaha di tahun 2017 terus meningkat rata-rata 3.477 usaha per tahun sehingga akhir tahun 2022 menjadi lebih kurang 17.663. di masa pandemi Covid-19 tahun 2021, usaha mikro masih terus bertambah meski kecil yaitu 130 usaha jika dibandingkan dengan jumlah usaha di tahun 2020. Demikian pula dengan jumlah koperasi yang sejak tahun 2017 terus bertambah rata-rata 6 buah setiap tahun sehingga tahun 2022 berjumlah 862 koperasi yang memiliki izin usaha resmi. Bahkan di tahun 2021, di masa Pandemi Covid-19, jumlah koperasi tetap bertambah sebesar 10 unit koperasi. Akan tetapi, jika dilihat dari prosentase koperasi yang aktif memiliki jumlah yang fluktuatif dan tren nya tetap naik. Tahun 2018 dari jumlah koperasi yang ada 828 unit usaha, sebanyak 519 unit atau 62, 68% unit yang aktif meningkat signifikan di tahun 2022 menjadi 648 unit koperasi dari 862 unit atau sekitar 75,17%. Hal ini menunjukkan bahwa animo dan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi terus membaik dan didukung





dengan program pembinaan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Magetan. Terkait dengan jumlah wirausaha baru juga menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019 sebanyak 53 orang wirausaha baru dan tahun 2022 terbentuk sebanyak 143 orang. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendidikan dan latihan perkoperasian	404.200.000	386.249.200	95,56
Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	202.200.000	175.424.000	86,76
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	58.000.000	44.790.000	77,22
Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	209.350.000	196.060.000	93,70
Pemberdayaan UMKM	2.450.827.650	2.141.961.400	87,40
Pengembangan UMKM	1.374.299.000	1.307.609.550	95,15
Rata-Rata Serapan Anggaran	4.698.876.650	4.252.094.150	90,49

Kendala atau hambatan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja tersebut antara lain:

- Kapasitas dan Kemampuan wirausaha pengurus koperasi dalam melakukan pengelolaan keuangan dan untuk melakukan kerjasama masih terbatas.
- Belum adanya peraturan khusus yang terkait dengan SOP, sertifikasi, dan proses bisnis internal koperasi.
- Akses permodalan dari lembaga keuangan formal perbankan masih terbatas karena sistem keuangan koperasi yang masih belum bankable.
- Terbatasnya personel dan kapasitas ASN yang memahami koperasi secara utuh dan komprehensif di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sehingga cakupan pembinaan usaha mikro dan koperasi belum maksimal.
- Banyaknya Wirausaha Baru (WUB) yang belum memiliki ijin usaha, sehingga akses fasilitasi dan modal terbatas.
- Adanya perubahan peraturan terkait kategori Usaha Mikor menjadi Usaha Kecil, sehingga menghambat proses perubahan status usaha.

Beberapa strategi dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

- Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pengurus koperasi, baik melalui pelatihan maupun sertifikasi, secara periodik bagi seluruh pengurus koperasi,
- Meningkatkan fasilitasi dan kemudahan untuk akses perijinan usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- Fasilitasi kerjasama dengan lembaga formal keuangan perbankan dalam rangka mengakses sumber-sumber pendanaan dan transfer kemampuan,
- Meningkatkan Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas, melalui kegiatan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan monev dan bimbingan teknis.
- Meningkatkan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro melalui, meningkatkan promosi dan pemasaran terhadap produk usaha mikro agar dikenal masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat,



meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang teknologi sehingga dapat menggunakan *E-Commerce* bagi produknya, koordinasi antar Dinas/OPD terkait dalam mengembangkan usaha mikro sehingga pembinaan yang dilakukan dapat terukur dan terarah, dan meningkatkan kualitas dan daya saing pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro, memfasilitasi legalitas.

Terkait dengan kinerja sasaran strategis meningkatnya kegiatan investasi mencapai 387,84% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Jumlah Investor rata-rata 2.518 usaha pertahun. Tahun 2018 jumlah investor sebanyak 525 usaha dan terus naik sebanyak 949 usaha atau 45,96% per tahun, sehingga tahun 2022 menjadi 4.319 investor. Sedangkan untuk jumlah investasi rata-rata Rp.970.386 juta rupiah pertahun. Tahun 2018 jumlah investasi sebanyak Rp.291.843 juta rupiah dan terus naik menjadi Rp.1.551.369 juta rupiah atau 19,23% per tahun. dalam rangka meningkatkan layanan perijinan investasi, maka telah dilaunching Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan teknologi online dan maju dan inovasi pelayanan yaitu Jempol Peri (Jemput Bola Untuk Peningkatan Realisasi Investasi), meliputi kegiatan pendataan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan secara berkala. MPP ini melibatkan 23 instansi perangkat daerah, 206 jenis layanan yang diberikan, 25 loket dan rata-rata per hari melayani 70 kali layanan antrian perizinan. Perangkat Daerah terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:



Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	50.000.000	47.778.884	95,56
Promosi penanaman modal	310.000.000	295.962.642	95,47
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	394.695.000	363.383.372	92,07
Pelayanan penanaman modal	190.000.000	184.315.513	97,53
Pengembangan iklim penanaman modal	165.000.000	159.892.830	96,90
Rata-Rata Serapan Anggaran	1.109.695.000	1.051.333.241	94,74

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran adalah:

- Dari sisi realisasi nilai investasi, kendala yang masih terjadi adalah masih kurangnya investor berskala besar yang berinvestasi dan terhambatnya promosi investasi karena pandemi Covid-19.



- Sedangkan, dilihat dari sisi investor, maka kendala yang terjadi adalah belum tersedianya data potensi investasi yang komprehensif dan belum optimalnya upaya fasilitasi usaha mikro dan kecil.
- Dukungan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah, khususnya infrastruktur jalan dan air yang masih kurang.

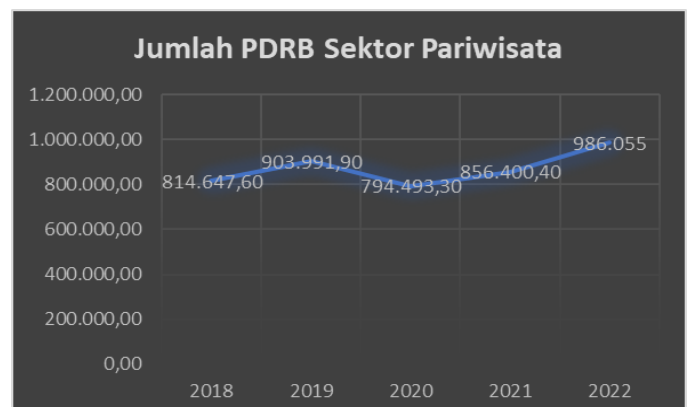
Solusi dan pemecahan masalah yang sudah diambil untuk mewujudkan capaian kinerja ke depan agar lebih baik adalah

- Menawarkan peluang investasi langsung kepada investor berskala besar.
- Mengubah strategi promosi investasi menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
- Memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan perizinan.

Pada tahun 2021 ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyusun rencana aksi layanan investasi di era Pandemi Covid-19 ini.

1. Memfasilitasi kegiatan usaha yang sudah beroperasi untuk memperluas usahanya.
2. Mendatangkan investasi baru.
3. Memberikan insentif kemudahan penanaman modal.
4. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan.
5. Memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM.

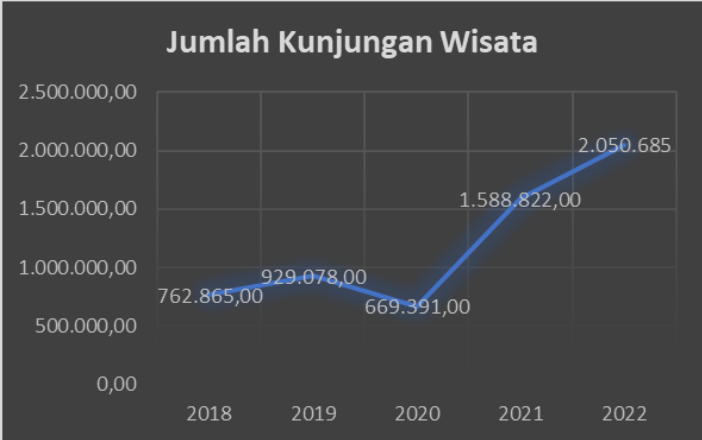
Capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kegiatan industri pariwisata mencapai 126,14% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. PDRB sektor pariwisata ini diproksi dengan nilai PDRB ADHB untuk sektor akomodasi dan makan minum. Nilai PDRB menunjukkan bahwa rata-rata selama 5 tahun (2018



– 2022) telah tumbuh sebesar Rp.13.917,60 milyar atau rata-rata 5,45% pertahun, dimana tahun 2018 realisasi PDRB sektor pariwisata sebesar Rp.814.647,60 juta terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi Rp.986.055,90 juta. Tahun 2020 sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak parah dan bahkan berkontraksi negatif. Tahun 2020, jumlah kunjungan wisata turun -11,67% dari tahun 2020 menjadi 856.400,40 juta. Tahun 2021 mulai ada peningkatan capaian kinerja indikator pertumbuhan nilai PDRB Sektor pariwisata meningkat dan melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp.986.547,60 juta atau dengan nilai capaian sebesar 126,14%. Hal ini menunjukkan bahwa meski diterapkan protokol yang ketat dan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 50% dari kapasitas, namun animo masyarakat untuk ke destinasi wisata di Kabupaten Magetan.



Jumlah kunjungan wisata diberbagai destinasi wisata favorit di Magetan tahun 2018 sebanyak 762.865 kunjungan. Angka ini terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 21,79% atau 166.213 kunjungan wisata maka menjadi 929.078 kunjungan. Pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan kunjungan wisata sebanyak 50% di destinasi wisata, maka jumlah kunjungan menurun -27,95% dengan jumlah pengunjung tahun 2020 sebanyak 669.391 orang di tahun 2022. Jumlah kunjungan ini naik rata-rata 275.319 orang per tahun selama 5 tahun terakhir atau naik 40,06% per tahun. Dukungan akomodasi hotel sebanyak 2 26 buah dengan 2.193 kamar dan 3.366 tempat tidur. Indikator kinerja yang menarik dan menunjukkan peningkatan adalah jumlah rumah makan yang tersedia, tahun 2018 sebanyak 50 rumah makan, tahun 2021 meningkat 95 dan di tahun 2022 terus meningkat drastis menjadi 248 rumah makan dan restoran. Magetan bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi menjadi jalur alternatif dan transit bagi perjalanan ke daerah lain yaitu karanganyar dan wonogiri. Sebanyak 7 buah destinasi unggulan di Kabupaten Magetan dengan jumlah pengunjung tahun 2022 adalah:



Jumlah Kunjungan Wisata per Destinasi

Destinasi	Jumlah Pengunjung	Destinasi	Jumlah Pengunjung
1. Telaga Sarangan	920.574	5. Taman Genilangit	97.184
2. Taman Genilangit	97.187	6. Desa Wisata Jabung	30.142
3. Taman Mojosemi	255.567	7. Banyu Biru	57.247
4. Magetan Park	47.137	8. Kebun Bunga Refugia	71.524

Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2023, BPS.

Beberapa prioritas pengembangan pariwisata ke depan adalah dengan mengembangkan agorwisata dan destinasi wisata edukasi-rekreasi-konservasi yang sesuai dengan ciri khan Kabupaten Magetan. Pariwisata yang berbasis pada potensi lokal ini diharapkan mampu memberikan dampak *multiplier effect* yang besar meningkatkan jumlah dan pemerataan pendapatan bagi penduduk karena dikelola berbasis komunitas. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perindustrian dan PerdaganganAdapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.105.111.050	4.017.859.592	65,81
Program Pemasaran Pariwisata	190.613.305	148.810.275	78,07



Rata-Rata Serapan Anggaran	6.295.724.355	4.166.669.867	66,18
----------------------------	---------------	---------------	-------

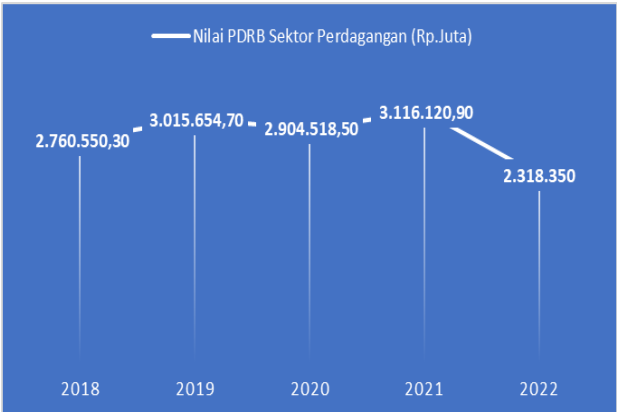
Komitmen Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengembangkan pariwisata melalui penciptaan destinasi-destinasi wisata baru berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini. Salah satu prestasi pariwisata adalah Penghargaan Tingkat nasional yaitu sebagai masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonsia (ADWI) atas nama Desa Wisata Jabung dan Pemenang East Java Tourism Award kategori Rumah Makan. Destinasi baru yang didukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana wisata telah menarik tumbuh kembangnya berbagai industri industri kecil, yang mendukung pengembangan destinasi wisata, antara lain kulit dan makanan. Beberapa hambatan dan kendala yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

1. Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan destinasi berbasis potensi alam dan sosial budaya sebagai modal dasar pariwisata masih sangat rendah. Masyarakat cenderung tergantung pada pemerintah dan menunggu stimulasi pemerintah daerah.
2. Masih rendahnya lama rata-rata tinggal karyawan.
3. Perputaran uang wisawatan (*spending of money*) masih rendah.
4. Kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata masih terbatas.
5. Promosi pariwisata daerah yang masih harus digencarkan terutama dengan berbasis pada *digital content* yang menjadi media promosi di era digital ini.

Solusi dan pemecahan masalah yang telah diambil antara lain:

1. Meningkatkan promosi pariwisata secara massif baik melalui berbagai media, baik digital maupun jejaring sosial dengan menggandeng para pelaku pariwisata, tour dan travel, serta melibatkan masyarakat dalam mempromosikan pariwisata. Bahkan, pelaku seni melakukan pameran secara virtual untuk melestarikan seni budaya daerah.
2. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata.
3. Memperbanyak atraksi/event di obyek wisata.
4. Digitalisasi sektor usaha pariwisata.
5. Peningkatan kompetensi sumber daya pariwisata.

capaian sasaran strategis meningkatnya kegiatan sektor perdagangan mencapai 95,88% atau kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan menunjukkan tren rata-rata penurunan - 3,19% dalam 5 tahun terakhir (2018 – 2022) dimana realisasi tahun 2018 sebesar Rp.2.760,55 milyar naik menjadi Rp.3.015,65 milyar di tahun 2019. Tahun 2020, terjadi penurunan nilai PDRB akibat covid-19 sebesar -3,69% sehingga nilai PDRB Sektor Perdagangan menjadi sebesar Rp.2.904,52 milyar. Tahun 2021, terjadi kenaikan kembali PDRB sektor perdagangan





sebesar 7,29% menjadi Rp.3.116,12 milyar. Namun tahun 2022 telah terjadi penurunan menjadi Rp.2.318.350 milyar. Penurunan ini dipicu oleh masih belum pulihnya bisnis di daerah dan adanya perubahan basis penentuan angka PDRB dari ADBH menjadi ADHK. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.291.391.000	4.146.136.429	96,62
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	540.000.000	535.406.450	99,15
Pengendalian Izin Industri Kab/Kota	881.000.000	875.340.058	99,36
Rata-Rata Serapan Anggaran	5.712.391.000	5.556.882.937	97,28

Terkait capaian Kinerja indikator pendukung sektor usaha perdagangan ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Akses perdagangan ini sangat penting untuk dapat memberikan akses ekonomi produktif bagi mereka. Jumlah pasar yang aktif di Kabupaten Magetan rata-rata 60 pasar setiap tahun. Jumlah pasar kondisi baik terus menunjukkan adanya peningkatan jumlah secara moderat selama 5 tahun terakhir, dimana tahun 2018 sebanyak 40 buah pasar dan terus meningkat menjadi 77 buah di tahun 2022 atau naik rata-rata 9 buah atau 18,34% per tahun. Sedangkan, jumlah industri kecil yang dibina sebanyak 13.466.

Jumlah Usaha Perdagangan berijin atau memiliki SIUP menunjukkan peningkatan terus selama 5 tahun terakhir, dari 4.989 usaha ber-SIUP taun 2017 naik signifikan menjadi 6.601 usaha di tahun 2021. Juga jumlah industri kecil dimana tahun 2017 berjumlah 15.895 naik secara moderat sampai tahun 2021 menjadi 16.035 industri kecil. Namun pada tahun 2020 sebagai dampak dari massifnya perdagangan akibat Pandemi Covid-19, maka jumlah SIUP Perdagangan turun menjadi 2.475 izin. Demikian juga untuk sentra industri kecil yang dibangun, tahun 2017 sebanyak 233 sentra industri kecil dan di akhir tahun 2021 sudah naik menjadi 278 sentra industri kecil dan akhir tahun 2022 menjadi 279 sentra.

Kendala/hambatan yang ada dalam mewujudkan sasaran tersebut adalah:

1. Pembatalan pesanan produk dari luar negeri dikarenakan pandemi covid
2. Sumber Daya Manusia dari IKM masih kurang
3. Sarana dan prasarana pendukung produksi belum memenuhi kebutuhan IKM
4. Kurangnya kebersamaan antar IKM dalam hal produksi dan pemasaran
5. Belum dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal
6. Masih banyak pelaku usaha yang belum paham dengan system perizinan melalui system OSS.

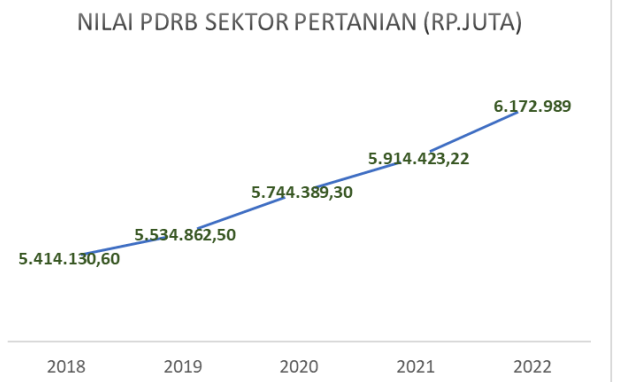
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mewujudkan capaian kinerja ke depan agar lebih baik adalah:

1. Pengajuan bantuan Peralatan Produksi bagi IKM
2. Diperlukan pembinaan secara berkelanjutan untuk Sumber Daya Manusia dari IKM
3. Bantuan sarana penunjang untuk IKM

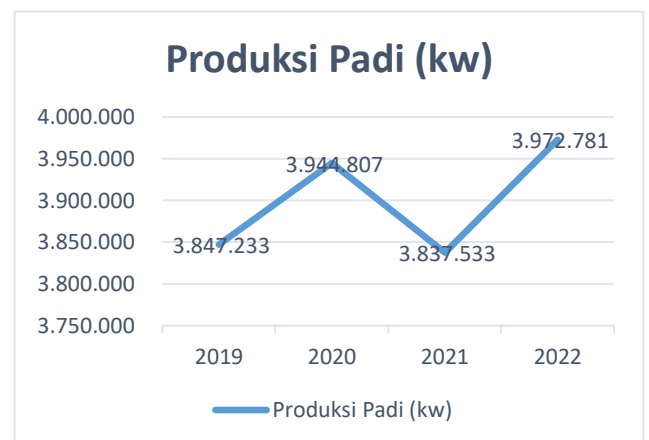


- Menyediakan tempat yaitu Mal Pelayanan Publik untuk memudahkan pelaku usaha mengurus Izin Usaha melalui system OSS.
- Melalui program Digital Marketing akan mewadahi pelaku usaha untuk tetap berusaha dikala pandemi.

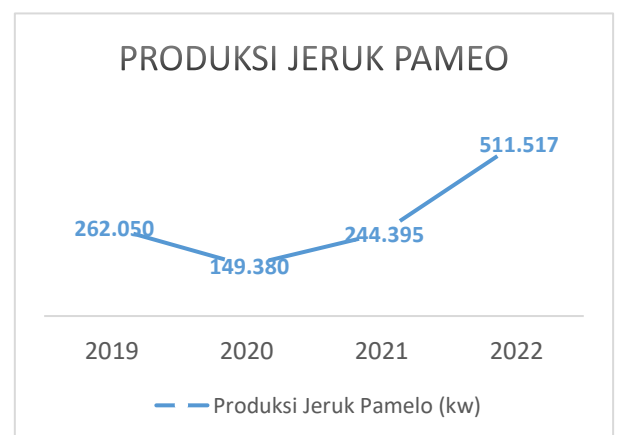
Pada capaian kinerja sektor pertanian menunjukkan capaian rata-rata sasaran strategis meningkatnya kegiatan sektor pertanian yang diukur dengan Nilai PDRB ADHB sektor pertanian mampu malampaui target sebesar 156,43% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Angka PDRB Sektor Pertanian tren nya terus meningkat rata-rata 3,18%



meski dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2018 angka PDRB ini sebesar Rp.5.534,86 milyar terus naik rata-rata Rp.186,18 milyar pertahun menjadi atau 3,18% menjadi sebesar Rp.6.172,99 milyar di tahun 2022. Produksi tanaman pangan padi menunjukkan angka peningkatan yang fluktuatif, dimana tahun 2019 sebesar 3.847.233 kw dan angka ini terus naik di tahun 2020 dan kemudian turun di tahun 2021 akibat Pandemi Covid 19. Akhir tahun 2022 kembali, meningkat sebesar 135.248 kw, sehingga dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan angka rata-rata sebesar 41.849 kw. Untuk angka produktivitas padi menunjukkan penurunan yang moderat, dimana tahun 2019 masih 74,09kw/ha dan tahun 2022 hanya tinggal 70,24kw/ha atau turun rata-rata -1,28kw/ha selama 4 tahun. Pada tanaman hortikultura unggulan daerah, yaitu Jeruk Pamelio diperoleh angka yang fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 262.5050kw dan angka ini terus fluktuatif, sehingga tahun 2022 meningkat tajam menjadi 511.517kw. Rata-rata produksi pertahun sebesar 301.764kw dan angka pertumbuhan sebesar rata-rata sebesar 83.156kw per tahun. Angka ini menunjukkan kondisi yang terus membaik.



Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya produksi komoditas tanaman pangan adalah produksi padi dan jagung. Untuk mengetahui capaian produksi padi dan jagung diperoleh melalui hasil pengukuran/survey ubinan di lapangan oleh Petugas Mantri Tani di wilayah kerja kecamatan masing-masing dan petugas BPS (Koordinator Statistik Kecamatan). Hasil pengukuran produktivitas dari lapangan selanjutnya



dikumpulkan dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat kecamatan ke kabupaten/kota, dari kabupa



ten/kota ke provinsi. Capaian produksi padi dan jagung adalah 100% dan 143% (sangat berhasil). Secara umum capaian produksi ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu (2021).

Capaian keberhasilan produksi padi dan jagung tahun 2022 disebabkan produktivitas jagung meningkat untuk setiap hektarnya. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: perbaikan penerapan pengelolaan teknologi budidaya akibat bantuan saprodi paket lengkap (bantuan benih, pupuk dan pestisida), peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat, perbaikan jaringan irigasi tersier, peningkatan perlindungan tanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman, perbaikan penanganan pascapanen, peningkatan penyuluhan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas pertanian serta kerja keras dan ketaatan petani dalam menyukseskan program pemerintah.

Tabel 3.1.
Produksi Pertanian Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022
Pangan Utama			
1	Padi	Ton	391.588,19
2	Jagung	Ton	162.313,29
3	Kedelai	Ton	1.470,99
4	Ubi Jalar	Ton	64.787
Perkebunan			
1	Kelapa	Ton	170,523
2	Kopi	Ton	442,76
3	Tebu	Ton	389.689,88
4	Tembakau	Ton	135,694
5	Kakao	Ton	555,16
Hortikultura			
1	Jeruk Besar	Ton	432.479,2
2	Kentang	Ton	4.068,5
3	Cabe	Ton	4.378,27
4	Bawang merah	Ton	3.561,84
5	Wortel	Ton	30.447,5
Biofarmaka			
1	Jahe	Kg	2.677.002
2	Kunyit	Kg	4.205.850

Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka 2023

Indikator pengukuran keberhasilan program di sektor hortikultura dan perkebunan diwakili oleh komoditas jeruk pamelon dan tebu. Capaian produksi jeruk pamelon dan tebu adalah 194% (sangat berhasil) dan 70% (berhasil). Kurang berhasilnya pencapaian produksi tebu disebabkan oleh luas tanam tebu menurun pada tahun 2020. Animo petani untuk menanam tebu menurun disebabkan harga tebu tidak sesuai harapan petani. Disamping hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat penetapan target kinerja angka yang digunakan adalah angka produktivitas tebu yang diperoleh dari laporan pabrik gula setiap musim giling. Hal ini menunjukkan, sektor pertanian menjadi sektor basis bagi



daerah dan harus ditransformasi ke sistem jasa sehingga pendukung pariwisata sehingga mampu mendukung peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Artinya, hasil pertanian harus ditingkatkan nilai tambah melalui proses industri dengan teknologi tepat guna (TTG), sehingga hasil pertanian masyarakat dapat ditingkatkan nilai produknya dan mampu meningkatkan pendapatan petani. Beberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan realisasi program:

a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9.286.508.300	8.806.681.743	94,83
Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	37.229.261.250	36.212.348.597	97,26
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	469.800.000	465.892.700	99,16
Penyuluhan Pertanian	302.800.000	278.857.575	92,09
Rata-Rata Serapan Anggaran	47.288.369.550	45.763.780.615	96,78

b. Dinas Peternakan dan Perikanan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75.000.000	73.044.370	97,40
Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.016.188.550	967.670.218	95,23
Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.864.911.087	2.842.518.700	99,22
Perizinan Usaha Pertanian	52.000.000	51.984.000	99,97
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.433.650.000	10.065.331.800	96,47
Rata-Rata Serapan Anggaran	14.441.749.637	13.032.878.870	90,24

Beberapa hambatan/kendala yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara:

1. Kondisi alam yang tidak menentu (cuaca).
2. Serangan organisme pengganggu tanaman.
3. Tidak semua petani mau menerapkan teknologi budidaya dan pengolahan produk pasca panen berbasis teknologi tepat guna (TTG) untuk meningkatkan nilai hasil pertanian masih belum berjalan dengan baik.
4. Masyarakat peternak dan pembudidaya perikanan miskin yang mendapatkan bantuan sarpras budidaya ikan
 - Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan SDM masyarakat peternak dan pembudidaya ikan miskin, serta keterbatasan jumlah bantuan terkait teknis dan kelembagaan pembudidayaan ikan.
 - Keterbatasan Modal Usaha.



- Kegiatan budidaya ikan untuk masyarakat perikanan miskin belum berkonsep untuk berkelanjutan.

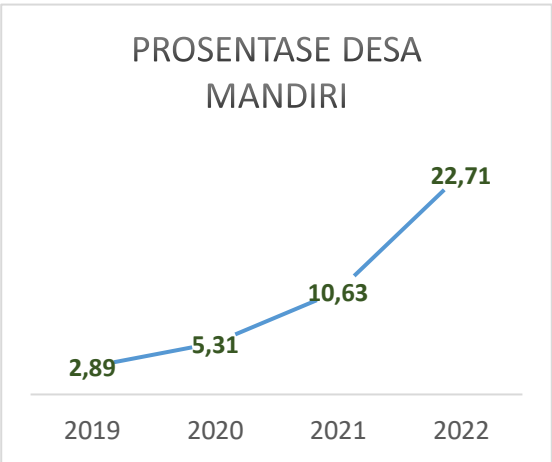
Beberapa strategi dan solusi yang diambil antara lain:

1. Koordinasi intensif antara penyuluh dan kelompok gabungan petani (Gapoktan) terus ditingkatkan terutama dalam mengembangkan teknis budidaya tanaman pangan yang lebih efektif dan efisien.
2. Melakukan kebijakan pengadaan Demplot Tanaman dan Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu bagi petani.
3. Memberikan bantuan kepada masyarakat perikanan miskin berupa sarana prasarana budidaya ikan
4. Melakukan Pendampingan dan Pembinaan Teknis Kelembagaan

Sasaran Strategis-6 : Meningkatnya Status Kemandirian Desa

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah Desa Maju yang Meningkatkan Menjadi Desa Mandiri	10,63	12,07	22,71	188,15	9,6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				188,15%	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya status kemandirian desa mencapai 118,15% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Kabupaten Magetan memiliki 18 Kecamatan dan 207 desa. Jumlah desa maju menjadi desa mandiri terus meningkat selama 3 tahun terakhir, tahun 2020 sebanyak 9 desa, meningkat menjadi 11 desa tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat sangat signifikan menjadi 23 desa. Pertumbuhan



desa mandiri rata-rata sebanyak 6 desa setiap tahun. Program percepatan Desa Mandiri dan Maju jadi prioritas pembangunan desa. Prioritas lain, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga menjadi perhatian dimana tahun 2018 hanya 99 BUMDesa yang aktif dan tahun 2021 melonjak menjadi 190 dan tahun 2022 BUMDesa aktif meningkat drastis menjadi 197, meningkat rata-rata 23 BUMDesa atau 22,9% per tahun. Keberadaan BUM Desa sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BUM Desa tidak hanya mengembangkan usaha, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam dukungan layanan ekonomi desa, jumlah pasar desa aktif juga semakin meningkat drastis, dari jumlah 35 tahun 2018 menjadi 55 di tahun 2022. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan realisasi program:

Program	Anggaran		
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian



			(%)
Penataan desa	145.607.100	144.907.630	99,52
Administrasi pemerintahan desa	3.024.236.250	2.806.415.078	92,80
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	724.000.000	697.760.850	86,38
Peningkatan Kerjasama Desa	25.500.000	25.002.900	98,05
Rata-Rata Serapan Anggaran	3.919.343.350	3.674.086.458	93,74

Kendala dan hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian target kinerja antara lain:

1. Terbatasnya anggaran dan aturan atau regulasi terkait upaya peningkatan sarana prasarana Pasar Desa
2. SDM pengelola Pasar Desa yang belum Maksimal
3. Penyertaan modal desa belum optimal
4. Perijinan usaha masih disamakan dengan badan usaha yg lain (PT, CV)
5. Manajemen SDM belum professional
6. Kewenangan pengelolaan aset desa belum optimal
7. Jejaring bisnis dengan industri/ perusahaan belum menjadi ekosistem bisnis Bumdes
8. Kurangnya dukungan modal pengembangan BUMDes
9. Belum adanya kesadaran penuh dari Pemerintah Desa terkait pentingnya pembentukan dan pengembangan BUMDes
10. Kualitas SDM pengelolaBUMDes belum maksimal sehingga belum memunculkan ide/inovasi baru terkait pengelolaan BUMDes

Solusi kebijakan dan pemecahan masalah yang telah diambil adalah:

1. Memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat desa untuk pembentukan dan pembinaan pasar desa;
2. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola pasar desa dan usaha ekonomi desa;
3. Sosialisasi dan edukasi pada pemerintah desa untuk alokasi penyertaan modal pada BUMDes;
4. Fasilitasi pengurusan perijinan usaha dengan dinas terkait;
5. Pelatihan terintegrasi manajemen SDM Bundes (*In house training*, studi referensi, training kompetensi pengelolaan keuangan & usaha, peningkatan kapasitas dengan crash program training);
6. Fasilitasi training penyusunan peraturan desa pengelolaan aset desa;
7. Merintis jejaring bisnis dengan fasilitasi dengan industri/ perusahaan (kerjasama desa dengan pihak ketiga melalui Bumdes);
8. Penyusunan regulasi terkait penyertaan modal BUMDes dari APBDes.

Sasaran Strategis-7 : Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan

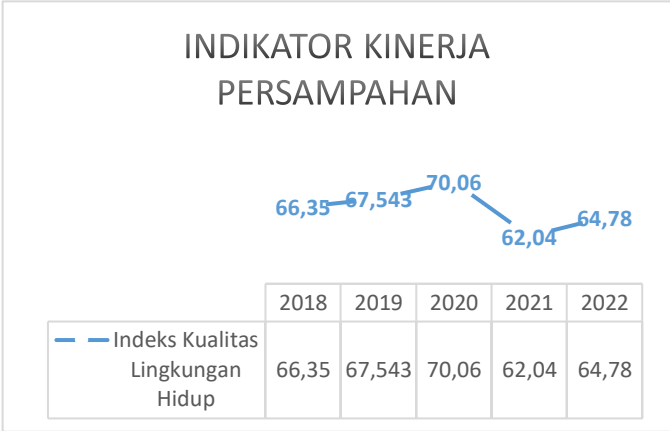
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Air (IKA)	52,78	53,49	56,03	104,75%	55,54



Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,28	88,52	89,68	101,31%	87,15
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	34,93	34,16	33,72	98,71%	67,64
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				101,59%	

Capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas air, lahan dan udara mencapai 101,59% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama ada 3 (tiga) indikator. Pengelolaan sampah dan konservasi lingkungan menjadi program prioritas daerah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

menunjukkan angka yang tren nya menurun -0,39 poin atau -0,38% selama 5 tahun terakhir. Angka IKLH tahun 2018 menunjukkan realisasi 66,35 poin dan terus membaik (meningkat) secara moderat sampai dengan tahun 2020 sebesar 70,06 poin. Tahun 2021 angka IKLH menunjukkan penurunan tajam akibat perubahan parameter perhitungan kinerja untuk Indeks Kualitas Lahan, maka angka menurun menjadi 62,04 poin. Tahun 2022 kembali angka IKLH menunjukkan tren kenaikan secara moderat.



Indikator pendukung lain dari aspek persampahan, yaitu prosentase timbulan sampah yang ditangani, jumlah TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan indikator prosentase ketersediaan TPS. Persentase Penanganan Timbulan Sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan sebesar 76,11% tahun 2022 dan Persentase Pengurangan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan sebesar 23,22%. Dukungan terhadap pengelolaan sampah juga dilakukan melalui kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/Prt/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, pemerintah daerah wajib menyediakan RTH seluas 30% dari luas wilayah, dimana 10% adalah RTH Private yang sudah dikuasai oleh individu atau perusahaan dan 20% adalah RTH Publik. Pemerintah Kabupaten Magetan selalu terus menambah luasan RTH dimana tahun 2017 seluas 7.865 Ha naik menjadi 2.325,80 Ha pada tahun 2022. Akan tetapi, secara luasan, jumlah tersebut masih berada di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu baru sekitar 18,05% atau kurang 11,95% dari luasan wilayah daerah. Partisipasi semua pihak dalam membangun dan membesarkan RTH antara lain dengan menggandeng CSR perusahaan/BUMN sangat penting dilakukan karena anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Selain itu, sosialisasi ke berbagai instansi atau perusahaan dibutuhkan agar mau merawat dan menyisihkan ruang untuk RTH, selain dengan pengendalian dalam pemberian izin prinsip perumahan yang wajib disisakan untuk RTH. Perangkat Daerah terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, program-program sbb:

- a. Dinas Lingkungan Hidup



Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.072.515.923	2.872.705.467	93,50
Perencanaan lingkungan hidup	255.000.000	251.150.535	98,49
Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	50.000.000	46.131.850	92,26
Penanganan pengaduan lingkungan hidup	20.000.000	18.346.450	91,73
Pengakuan kebenaran masyarakat, hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	24.000.000	22.302.077	92,93
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.802.668.700	1.787.800.615	99,18
Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	25.000.000	24.976.000	99,90
Pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	110.000.000	93.989.660	85,45
Peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	440.625.000	419.161.692	95,13
Pengelolaan sampah	5.012.475.000	4.810.860.836	95,98
Rata-Rata Serapan Anggaran	10.812.284.623	10.347.425.182	95,70

Kendala/hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Peningkatan penduduk menyebabkan peningkatan permukiman yang akan menyebabkan peningkatan volume air limbah domestik.
2. Perilaku Masyarakat yang kurang ramah lingkungan
3. Rendahnya pengelolaan limbah domestik
4. Berkembangnya kegiatan/ usaha dan industri
5. Peningkatan jumlah penduduk/ rumah tangga mengakibatkan peningkatan aktivitas rutin seperti bahan bakar untuk proses produksi, pembakaran sampah, penguraian zat organik dari penumpukan sampah dan mobilisasi
6. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, sektor usaha/industri menyebabkan emisi polutan udara semakin besar
7. Berkurangnya vegetasi
8. Aktivitas Industri dan Pembangunan Infrastruktur yang tidak sesuai dengan tata ruang, menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan untuk melindungi air dan tanah
9. Peningkatan permukiman dapat menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan sesuai dengan fungsinya
10. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi dan kaidah konservasi
11. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk



12. Semakin meningkatnya kegiatan yang menghasilkan limbah padat, air limbah, limbah B3 padat, dan limbah B3 cair dari kegiatan industri, rumah sakit, fasilitas umum dan area wisata di Kabupaten Magetan
13. Belum optimalnya perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah
14. Belum optimalnya pengelolaan sampah di sumber sampah
15. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengurus sampah tidak sebanding dengan cakupan luas penanganan sampah
16. TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Milangasri dengan kondisi saat ini yang overload
17. Sarana dan prasarana yang tersedia hanya dapat menangani di wilayah tertentu
18. Belum adanya penegakan hukum terkait pengelolaan sampah
19. Minimnya ketersediaan teknologi pemrosesan sampah
20. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah
21. Belum optimalnya kelembagaan daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Melakukan pemantauan kualitas Lingkungan secara berkala sebagai upaya untuk mempertahankan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang
2. Melakukan pencegahan setiap rencana kegiatan/usaha untuk dapat melakukan pengelolaan lingkungan melalui dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
3. Penertiban usaha/ kegiatan disekitar DAS
4. Pembinaan pengendalian pencemaran air
5. Melakukan program peningkatan kinerja bagi usaha/ industri yang mengacu pada produksi bersih
6. Pengendalian pencemaran dengan pengembangan teknologi pengolah air limbah
7. Pengendalian rutin terhadap industri/ kegiatan penyumbang pencemaran udara
8. Melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala
9. Pembinaan pengendalian pencemaran udara
10. Pengelolaan sampah secara optimal
11. Peningkatan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
12. Penambahan pohon pada Ruang Terbuka Hijau antara lain di taman, hutan kota dan penanaman pohon di sekitar sumber mata air, bahu jalan dan bantaran sungai sebagai upaya peningkatan Tutupan Lahan di Kabupaten Magetan
13. Pengendalian dan pengawasan usaha yang tidak sesuai dengan tata guna lahan
14. Penanganan sampah dengan penambahan sarana dan prasarana persampahan
15. Pengurangan sampah dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat
16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah
17. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sampah kepada masyarakat
18. Pengembangan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah



- 19. Pengembangan teknologi pemrosesan akhir
- 20. Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah
- 21. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah pengelola sampah.

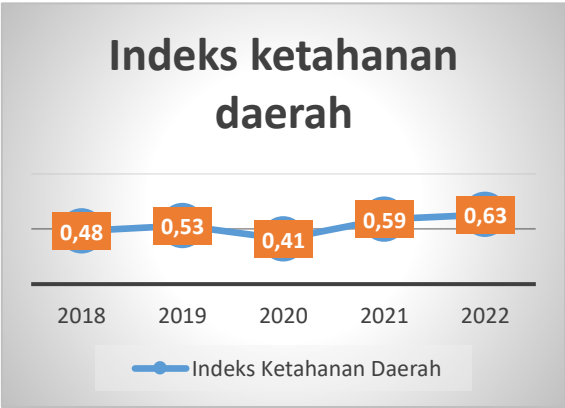
Dinas Lingkungan hidup sangat agresif dalam melakukan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Magetan. Beberapa inovasi tersebut antara lain:

- 1. Si Jupri (Aksi Jupuk, Pilah, Resiki Sampah)
- 2. Si Tepo (Aksi Tebar Kompos)
- 3. Si Jolu (Aksi Ijol Uwuh) yaitu tukar sampah dengan sembako, kompos, dll
- 4. Senam (Sekolah Menanam)
- 5. Operasional Bank Sampah Induk (BSI) Omah Apik Kab. Magetan
- 6. Peningkatan pembuatan perbenihan MPTS (*Multy Purpose Trees Species*) tanaman keras dan tanaman hias
- 7. Pemeliharaan dan peningkatan hutan kota serta taman kota
- 8. Diraihnya predikat Pelestari Fungsi Lingkungan, Seleksi Adiwiyata Nasional dan Seleksi Adiwiyata Provinsi
- 9. JUMINGSIH (Jum'at - Minggu Bersih)
- 10. Retribusi Kebersihan Non Tunai (RESI NONA).

Sasaran Strategis-8 : Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Ketahanan Daerah	0,59	0,60	0,64	106,67%	0,50
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				106,67%	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana mencapai 168,57% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator terkait dalam mengukur ketahanan daerah terhadap bencana yaitu dengan melihat Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap bencana. Indeks Ketahanan Bencana daerah menunjukkan angka yang terus meningkat (membaik) setiap tahun. Rata-rata Angka IKD adalah 0,54 poin selama 5 tahun terakhir. Angka IKD tahun 2018 masih sebesar 0,48 atau di bawah 50 poin, atau tingkat indeks ketahanan rendah. Angka ini terus meningkat meningkat secara permanen dan modert sebesar 0,038 poin selama 5 tahun terakhir.





Sehingga, nilai IKD Kabupaten Magetan sebesar 0,63 (membaik di atas 50 poin) di tahun 2022 atau naik sebesar rata-rata 0,038. Sebaliknya, untuk angka risiko bencana menunjukkan angka yang semakin membaik (menurun), di mana tahun 2018 angka IRB sebesar 153 poin dan angka nya terus menurun sebesar -4,71 poin setiap tahun, sehingga tahun 2022 menjadi hanya 134,16 poin. Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) menunjukkan bahwa kesiap-siagaan masyarakat terhadap adanya bencana sudah mulai membaik dan tinggi. Kedua indikator ini membutuhkan kerja keras perangkat daerah terkait dan proses edukasi kesadaran bencana yang lebih tinggi. Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penanggulangan Bencana	903.354.650	868.030.491	96,09
Program Penanganan Bencana	280.000.000	273.107.000	97,54
Rata-Rata Serapan Anggaran	1.183.354.650	1.141.137.491	96,43

Prestasi yang diraih adalah Desa Tangguh Bencana Tingkat Utama, di Tingkat Provinsi Jawa Timur (Desa Tangguh Bencana Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan). Ada beberapa kendala/penghambat keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Kurangnya minat dan kesadaran generasi muda dalam upaya pengurangan risiko bencana
2. Kurangnya fasilitas yang dimiliki relawan desa tangguh bencana
3. Belum adanya anggaran guna pengadaan fasilitas, pelatihan, dan operasional bagi relawan desa tangguh bencana
4. Kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana masih kurang
5. Tingkat kerentanan daerah terhadap bencana masih cukup tinggi
6. Lemahnya internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di daerah

Sedangkan, Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Melakukan Monitoring dan evaluasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda akan pentingnya budaya sadar bencana
2. Meningkatkan intensitas pembinaan serta pengembangan Desa Tangguh Bencana yang sudah terbentuk
3. Mendorong Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana di masing-masing wilayah
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pelaku penanggulangan bencana melalui kegiatan sertifikasi teknis, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
5. Melakukan berbagai upaya mitigasi bencana melalui mitigasi struktural maupun non struktural



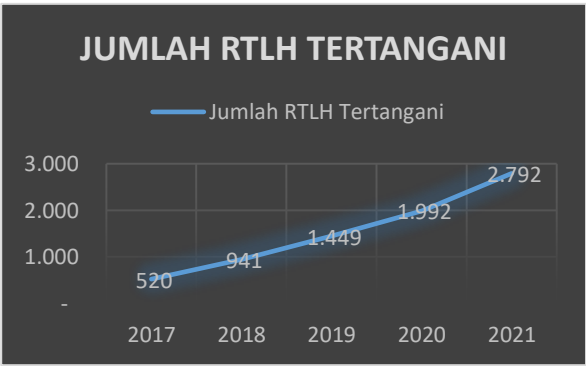
6. Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sasaran Strategis-9 : Meningkatnya Pemerataan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Infrastruktur	76,36	82,3	Belum rilis	-	82,75
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				-	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang merata untuk semua wilayah mencapai 93,24% atau kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator. Pada tahun 2020, dilakukan pemetaan jalan SK Bupati Nomor 188/135/Kept/403.013/2020, sehingga total panjang jalan kabupaten bertambah menjadi 630,25 km dari semula 525,81 km. Indeks Konektivitas ini didukung oleh beberapa indikator antara lain prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, prosentase jembatan dalam kondisi baik dan prosentase drainase dalam kondisi baik. Secara umum, capaian kinerja ketiga indikator pendukung tersebut menunjukkan angka capaian di atas 70%. Kinerja tertinggi dan konsisten dicapai oleh indikator jembatan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir di atas 78% sampai tahun 2021. Berikutnya adalah capaian kinerja jalan dalam kondisi baik yang fluktuatif, dimana tahun 2020 sempat turun menjadi 71% dan kemudian tahun 2021 naik lagi 73,87%. Secara umum indikator pendukung konektivitas jalan memberikan rata-rata capaian kinerja yang tinggi dalam mendukung kinerja sasaran strategis. Selain memberikan jaminan atas sarana jalan, pemerintah daerah juga memberikan rasa nyaman bagi pengguna angkutan melalui intensifikasi uji kir kendaraan umum. Sejak tahun 2019, jumlah kendaraan yang taat uji (wajib dan melakukan pengujian KIR) terus meningkat rata-rata 419 kendaraan atau naik 25,68% per tahun. Tahun 2019 jumlah kendaraan taat uji sebanyak 1.495 kendaraan dan terus meningkat menjadi 2.332 kendaraan di tahun 2022. Sehingga rata-rata kendaraan taat uji dalam 1 tahun sebanyak 2.211 kendaraan.

Capaian kinerja ini didukung oleh 1 program, yaitu program pengembangan perumahan dan program perumahan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam meningkatkan rumah layak huni secara mandiri, bekerjasama dengan CSR perusahaan (antara lain Bank Jatim, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Syari'ah) dan berbagai komunitas masyarakat. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa data perkembangan jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun atau direhabilitasi terus meningkat dimana tahun 2017 sebanyak 520 rumah dan terus meningkat secara signifikan menjadi 2.729 rumah di





tahun 2022 atau terjadi rata-rata peningkatan 568 rumah tiap tahun atau 53,24% per tahun. Pertumbuhan jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun ini sangat signifikan. Selain itu, jumlah rekomendasi ijin Siteplan yang dikeluarkan oleh dinas menunjukkan tren peningkatan dimana tahun 2020 hanya sebanyak 5 ijin dan tahun 2021 ini sebanyak 8 ijin siteplan. Kawasan kumuh yang tertangani juga tren nya menurun, dimana tahun 2019 sebesar 10,36 ha dan tahun 2021 sebesar 14,91 ha atau setiap tahun turun 2,275 ha. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat, sehingga terus terjadi pemenuhan kebutuhan dasar perumahan bagi masyarakat. Dinas juga terus melakukan penguatan basis data kegiatan melalui pengembangan aplikasi sistem e-RTLH (Basis data rumah tidak layak huni secara online dan update), sehingga kebijakan penanganan RTLH dapat terpadu, efektif dan berkelanjutan. Perangkat Daerah terkait dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengelolaan sumber daya air	27.630.798.900	25.931.777.686	93,85
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.376.794.000	6.487.827.840	87,95
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.851.742.050	2.840.038.437	99,59
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	2.440.526.950	2.393.347.396	98,07
Penyelenggaraan Jalan	11.199.865.672	10.758.287.558	96,06
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	15.035.570.000	14.110.970.937	93,85
Penataan Bangunan Gedung	109.929.866.813	83.505.919.336	75,96
Pengembangan Jasa Konstruksi	1.029.622.000	982.757.281	95,45
Penyelenggaraan Penataan Ruang	804.300.000	781.385.792	97,15
Rata-Rata Serapan Anggaran	178.299.086.385	147.792.312.263	82,89

b. Dinas Perhubungan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penyelenggaraan lalu lindatas dan angkutan jalan (LLAJ)	23.661.856.710	22.918.656.925	96,85
Serapan Anggaran	23.661.856.710	22.918.656.925	96,85

c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengembangan Perumahan	470.000.000	411.560.179	87,57%



Program Kawasan Permukiman	14.001.669.800	13.786.022.581	98,46%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.650.378.200	8.406.784.380	97,18%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.565.000.000	1.420.705.070	90,78%
Program Penunjang Urusan Perumahan	5.263.348.415	4.700.502.644	89,31%
Rata-rata Serapan Anggaran	29.950.396.415	28.725.574.854	92,66

Tahun 2021 dilakukan peresmian (*Launching*) Sim Card pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dari Buku Uji diganti dengan penerapan Sim Card, agar waktu uji kir kendaraan dapat terpantau dan segera dihubungi oleh kantor uji kir. Branding dan promosi pemanfaatan SIMCARD terus dilakukan sepanjang tahun 2022. Dalam proses pencapaian sasaran strategis tersebut, maka beberapa kendala/hambatan masih yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Wabah Corona (Covid-19) berdampak pada tidak beroperasinya kendaraan angkutan pelajar mulai bulan Maret s/d Desember 2022.
2. Karena dampak dari Covid-19 kesadaran masyarakat jadi menurun sehingga banyak kendaraan tidak di ujikan.
3. Adanya Wabah Corona (Covid-19) juga berdampak pada pemangkasan anggaran program prasarana kelengkapan jalan (rambu-rambu) dalam rangka *Refocusing* APBD Tahun 2022 terkait penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Kab. Magetan.
4. Basis data RTLH dan dukungan legalitas kependudukan yang masih rendah, sehingga menghambat proses pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Kondisi tersebut antara lain status kepemilikan tanah yang diajukan belum jelas, adanya ketidaksesuaian nama pada saat pengajuan dengan KTP, pas akan dilaksanakan ternyata rumah sudah direhabilitasi, dan penerima bantuan pada saat akan di bangun ternyata sudah meninggal dunia.
5. Tingkat kesadaran masyarakat yang kurang dalam membangun rumah harus sesuai dengan standar rumah sehat dari Dinas Kesehatan.
6. Sistem layanan yang digunakan masih manual, sehingga banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan memverifikasi administrasi.

Sedangkan, Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/solusi atas permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Jumlah kegiatan Operasi Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Lalu Lintas di Jalan ditingkatkan.
2. Perlu diadakan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis Mobil Uji Keliling ke daerah – daerah di Kab. Magetan.
3. Mengusulkan bantuan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perhubungan terkait ketersediaan prasarana perlengkapan jalan di Kab. Magetan.
4. Membangun basis data rumah tidak layak huni, pelaksanaan pendataan ulang sebagai basis data dasar dan update secara periodik.

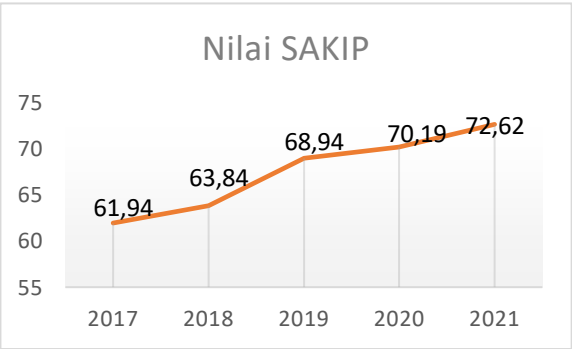


- 5. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara intensif terkait dengan kriteria dan syarat-syarat pengajuan RTLH.
- 6. Melakukan pendataan Kawasan permukiman kumuh dan sosialisasai dan penyadaran publik akan pentingnya Kawasan permukiman yang tertata.
- 7. Pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pelayanan publik, khususnya untuk pelayanan rekomendasi perizinan yang dibutuhkan waktu dan proses yang cepat.

Sasaran Strategis-10 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik yang Efektif

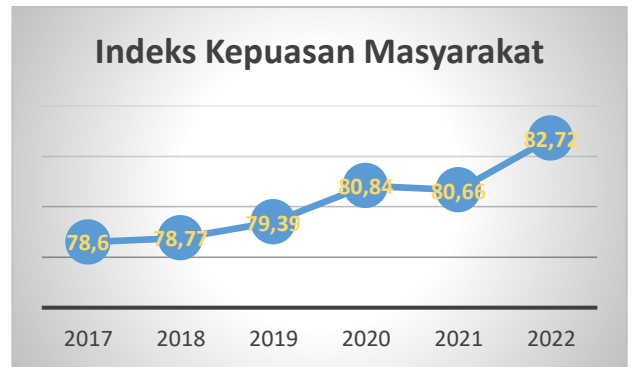
Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP
Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,56	2,8	2,27	81,07%	3,0
Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	BB (70,19)	BB (78)	BB (72,62)	100%	A
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,66	80,5	82,75	102,80%	81
Capaian Kinerja Sasaran Strategis				95,97%	

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan public yang efektif mencapai 95,97% atau kategori **Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) indikator. Capaian kinerja setiap indikator menunjukkan angka yang cenderung meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir, antara lain capaian Nilai SAKIP dan Nilai IKM Kabupaten Magetan menunjukkan tren terus naik. Nilai SAKIP Kabupaten Magetan sejak tahun 2018 menunjukkan angka capaian yang selalu naik dari 61,94 poin menjadi 72,62 poin di tahun 2022 atau naik rata-rata 2,54 poin pertahun. Meskipun hasil evaluasi AKIP Pemkab Magetan tetap BB, apabila dibandingkan dengan tahun 2020, di tahun 2022 ada kenaikan nilai, di tahun 2020 nilai 70,19 sedangkan di tahun 2021 naik menjadi 72,62 ada kenaikan sebesar 2,43 poin. Berbagai upaya perbaikan nilai SAKIP sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, baik dengan mengajukan supervisi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun ke Kementerian PAN dan RB. Demikian juga, nilai IKM Kabupaten Magetan dari tahun 2015 hingga tahun 2021 yang selalu meningkat. Pada tahun 2017 nilai IKM sebesar 78,60 poin dan terus naik rata-rata 0,715 pertahun terakhir tahun 2022 sebesar 82,72 poin.



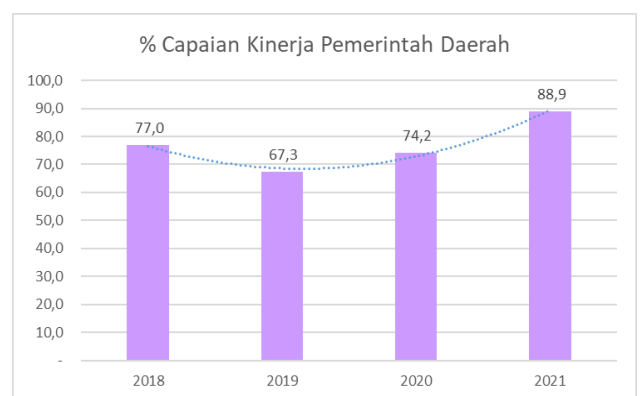


Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja perolehan Opini BPK dan nilai SAKIP, maka Inspektorat menyusun rencana aksi tata kelola yang meliputi 5 rencana aksi, yaitu *pertama*, mengoptimalkan Tim Pendampingan evaluasi SAKIP tingkat Kabupaten Magetan dan secara aktif memberikan perbaikan kualitas SAKIP. *Kedua*, menyusun, mereviu, dan menyempurnakan Peta Proses Bisnis, IKU dan IKI setiap OPD dan memastikannya sudah lebih spesifik, relevan, terukur, dan unik yang menggambarkan efektivitas. *Ketiga*, alasan keberadaan pemilik IKU dan IKI tersebut dan memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi. *Keempat*, menyusun LAKIP yang menyajikan perbandingan antara realisasi capaian target dengan standar nasional, dan *kelima*, memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan sampai dengan saat ini.



Terkait dengan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dengan didukung seluruh perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu selama 5 tahun berturut, sehingga mampu mempertahankan opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Selain itu, berbagai aplikasi juga dikembangkan dalam meningkatkan intensifikasi dan kontrol atas penerimaan pajak daerah misalnya dengan implementasi e-PBB (Software aplikasi sistem Pajak Bumi dan Bangunan) dan e-BPHTB (software aplikasi untuk penerimaan dan pengendalian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di tahun 2022. Sampai dengan tahun 2021, jumlah aplikasi software yang diterapkan dalam rangka e-government adalah 51 aplikasi sistem yang naik dibandingkan tahun 2020 yaitu 20 aplikasi atau naik sebanyak 31 aplikasi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan sangat agresif dalam pengembangan e-government terutama bagi pelayanan.

Terkait dengan pengawasan, berbagai capaian kinerja seperti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sudah dilakukan 92% dan tindak lanjut temuan APIP sebesar 100%. Penyelesaian pengaduan masyarakat sudah 100% dan level kapabilitas APIP sudah sampe level 2+ selama 5 tahun berturut-turut dan untuk tingkat maturitas SPIP sudah berada pada level 3 selama 4 tahun berturut-turut. Dan hasil reviu SAKIP perangkat



daerah sudah mampu mencapai nilai A. Inspektorat memberikan perhatian besar bagi kualitas SDM aparatur dalam meningkatkan SAKIP. Mengkoordinir komitmen dari seluruh OPD untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Memperbaiki dan mensosialisasikan “KLINIK MAMA” Inspektorat (Magetan Menuju Zona Aman), merupakan wadah konsultasi bagi SKPD mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan/aset dan Podcast KIBAS CANDA yang membahas aktivitas pengawasan pemerintahan di Kabupaten Magetan, peran audit



kepastian mutu (*quality assurance*) juga dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan pemberian konsultasi sehingga organisasi pemerintah daerah dapat mewujudkan tujuannya dengan cara efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan kehadiran acara podcast ini dapat memberikan alternatif solusi atas permasalahan disamping melalui proses audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan.

Terkait dengan kinerja e-government, terjadi beberapa peningkatan capaian kinerja antara lain 1) Jumlah Aplikasi e-Government digunakan Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan tahun 2022 sebanyak 68 aplikasi sistem atau naik rata-rata 30% pertahun; 2) Rata-rata nilai hasil evaluasi pengelolaan e-government (update sub domain, dll) di tingkat Perangkat Daerah sebanyak 112 domain yang aktif;



3) Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik sebanyak 88,89% tercapai dan 4) Cakupan ketersediaan data statistik sektoral trennya menunjukkan kenaikan rata-rata 20,5% dan angka terakhir 2022 sebesar 85,19%. Angka Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Magetan menunjukkan angka yang naik secara signifikan rata-rata 14 poin per tahun dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2019 Angka IPA sebesar 45,7 poin dan terus naik sebesar 14 poin per tahun dan akhir tahun 2022 sebesar 56. Capaian angka ini menunjukkan kinerja yang sudah melampaui rata-rata.

Salah satu Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang dari sisi perencanaan adalah persentase capaian kinerja Pemerintah Daerah. Persentase capaian kinerja Pemerintah Daerah ini diukur dari jumlah indikator kinerja daerah (IKD) yang tercapai dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator kinerja daerah yang tertuang didalam RPJMD. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Magetan mulai tahun 2018 – 2021 pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,69%, hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja daerah yang diukur karena tahun 2018 adalah periode RPJMD yang lama, sementara 2019 adalah periode RPJMD yang baru sehingga memang tidak bisa kita bandingkan capaiannya. Namun pada tahun berikutnya realisasi kinerja meningkat terus mengalami peningkatan dari 67,3 di tahun 2019 menjadi 74,2 di tahun 2020 dan 88,9 di tahun 2021. Meskipun situasi Pandemi masih melanda, namun hal itu tidak mengurangi semangat dan kinerja Bappeda dan seluruh OPD untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Dukungan BPKAD juga besar dalam pencapaian SAKIP, yaitu menyelesaikan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu. Beberapa inovasi pelayanan publik dan prestasi yang berhasil diraih Penghargaan Kategori Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Tingkat Provinsi (KOVABLIK) JATIM diwakili oleh Puskesmas Poncol dan Meraih penghargaan Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB pada Disdukcapil dan DPMPTSP.

Teberapa Perangkat Daerah yang terkait dalam pencapaian kinerja ini adalah Inspektorat, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, realisasi program-program pendukung sasaran strategis:



a. Sekretariat Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota, sub keg. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	179.269.850	175.131.961	97,69%
Rata-Rata Serapan Anggaran	179.269.850	175.131.961	97,69%

b. Inspektorat

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penyelenggaraan Pengawasan	1.393.328.000	1.329.085.672	95,39%
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	561.099.100	477.715.246	85,14%
Serapan Anggaran	1.954.427.100	1.806.800.918	92,45%

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.102.968.500	1.015.664.491	92,08
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.317.149.700	2.231.047.106	96,28
Penelitian dan Pengembangan Daerah	927.169.865	899.150.545	96,98
Rata-Rata Serapan Anggaran	4.347.288.065	4.145.862.142	95,37

d. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengelolaan keuangan daerah	343.749.400.606	322.849.854.725	93,92
Pengelolaan barang milik daerah	3.705.798.600	2.905.133.405	78,39
Pengelolaan pendapatan daerah	5.681.437.500	4.993.576.937	87,89
Rata-Rata Serapan Anggaran	353.136.636.706	330.748.565.067	93,66

e. Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Aplikasi Informatika	2.149.499.975	2.071.786.986	96,38
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	2.133.483.155	1.996.707.577	93,59
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	527.116.100	518.032.946	98,28
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	130.000.000	127.923.563	98,40
Rata-Rata Serapan Anggaran	4.940.099.230	4.714.451.072	95,43



f. Dinas Kearsipan dan perpus

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pengelolaan Arsip	179.900.000	178.126.846	99,01
Rata-Rata Serapan Anggaran	179.900.000	178.126.846	99,01

g. Setwan

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	30.432.105.500	25.179.238.020	82,74
Rata-Rata Serapan Anggaran	30.432.105.500	25.179.238.020	82,74

Beberapa capaian kinerja telah diraih dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Magetan. Beberapa catatan penting pencapaian kinerja ini adalah:

1. Peraturan Arsitektur SPBE Nasional baru saja ditetapkan di akhir tahun 2022
2. Proses Bisnis masih berada di tingkatan Kabupaten, belum sampai di tataran SKPD;
3. Kekurangan SDM yang memahami tentang kebutuhan SPBE
4. Belum adanya kesepahaman tentang pentingnya SPBE
5. Perilaku ASN dalam penggunaan aplikasi terkait pembuatan user password untuk login ke aplikasi
6. Sebagian besar pengembangan Aplikasi masih tidak didasarkan pada kebutuhan, melainkan keinginan. Padahal seharusnya acuannya dari proses/core bisnis dari masing-masing instansi, sehingga pengembangan aplikasi dilakukan sewaktu-waktu dan spontan.
7. Untuk audit TIK dalam aturan nasional belum ada lembaga swasta/negeri yang di tunjuk sebagai pemeriksa eksternal dalam audit TIK
8. Kurangnya SDM pada bidang komunikasi publik
9. Belum adanya Metadata disetiap produsen data sektoral
10. Belum diterapkannya Indeks KAMI (Indeks Keamanan Informasi) di setiap OPD dalam pelaksanaan keamanan informasi.
11. investarisasi aset dalam kondisi rusak ringan, sedang, berat yang belum optimal dan temuan terkait aset masih berulang
12. Masih belum optimalnya maturitas penyelenggaraan SPIP SKPD
13. Kapabilitas APIP yang diwujudkan dengan peningkatan level APIP melalui pemenuhan elemen-elemen dalam IACM belum optimal
14. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI



Beberapa straregi kebijakan dan rencana dalam meningkatkan capaian nilai SAKIP dan Opini BPK tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Mapping terhadap existing yang sudah ada di Kabupaten Magetan, seperti aplikasi, infrastruktur, dan layanan, untuk kemudian disusun sebagai draft Arsitektur SPBE;
2. Merencanakan draft dewan audit daerah;
3. Merencanakan draft Tim Koordinasi SPBE Kabupaten;
4. Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang urgensi SPBE/pemahaman tentang SPBE, terutama proses bisnis;
5. Merancang draft Peta Rencana SPBE, agar pembangunan aplikasi, pembangunan infrastruktur, dan yang berkaitan dengan arah pengembangan SPBE bisa lebih terstruktur dan sistematis.
6. Sosialisasi dan pembuatan aturan untuk melaksanakan aplikasi
7. Sosialisasi kepada OPD tentang pentingnya Metadata
8. Sosialisasi kepada OPD tentang pelaksanaan Indeks KAMI
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi inventarisasi aset
10. Pendampingan dan penguatan SPIP pada masing-masing Perangkat Daerah
11. Peningkatan melalui diklat pengawasan dan Pengembangan Potensi Mandiri (PPM) menuju APIP level 3
12. Mengoptimalkan pemenuhan dokumen sesuai elemen-elemen dalam IACM
13. Terus mengkoordinasikan TL BPK kepada SKPD terkait serta melakukan TL secara berkala dalam rakorwas.
14. Meningkatkan Sosialisasi kualitas pelayanan publik ke OPD.
15. Melaksanakan monitoring dan desk kepada OPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan terdapat prinsip penyelenggaraan yaitu menyelenggarakan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pelaksanaan program-program pembangunan, fungsi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien serta mencegah tumpang tindih ataupun ketidak-tersediaan dana pada suatu bidang atau urusan pemerintahan, menuntut dibangunnya jejaring pendanaan guna pelaksanaan program dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dalam rangka Tugas Pembantuan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pendanaan yang bersumber dari APBN.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor: 160/PMK.07/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 198/PMK.07/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Magetan memperoleh alokasi anggaran untuk penyelenggaraan tugas pembantuan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di atasnya yaitu sebesar Rp. 28.075.092.891,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskan dengan urusan pemerintah daerah bersangkutan, kemudian



mempersiapkan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam hal sinkronisasi jenis pembantuan telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu DAK Reguler dan Penugasan pada program dan kegiatan berikut ini:

1. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
Kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Magetan memperoleh alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang didanai melalui Dana Insentif Daerah yaitu sebesar Rp. 336.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan terlebih dahulu dilakukan sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskan dengan urusan pemerintah daerah bersangkutan, kemudian mempersiapkan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan, dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam hal sinkronisasi sebagian yang ditugaskan telah sesuai dengan kewenangan.



3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor: 160/PMK.07/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Keluaran : 26 Lokasi Rumah Rincian Kegiatan : Perencanaan, rehabilitasi jalan, dan supervisi sub kegiatan Rehabilitasi Jalan	Kab. Magetan	Dinas PUPR	4.907.853.900	4.775.030.000	97.29	100	100	DID
2	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor: 160/PMK.07/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota Keluaran : 15 Lokasi Rincian Kegiatan: perencanaan, pembangunan, dan supervisi saluran drainase	Kab. Magetan	Dinas PUPR	3.005.000.000	2.741.341.000	91.23	833,70 m	100	DID
3	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor: 160/PMK.07/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab. Magetan	Dinas PUPR	400.000.000	386.100.000	96.53	100	100	DID



NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSA NA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Kegiatan : Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi I (DAK) Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota Keluaran : 2 Lokasi Rincian Kegiatan: Rehabilitasi Embung Jarakan dan Rehabilitasi Embung Kawedanan								
4	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor: 160/PMK.07/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota Keluaran : 2 Lokasi Rincian Kegiatan: Rehabilitasi Dam dan Tembok Pengaman Bulungan, Rehabilitasi Dam dan Tembok Pengaman Dunglinjo, Rehabilitasi Dam dan Tembok Pengaman Genilangit,	Kab. Magetan	Dinas PUPR	1.460.000.000	1.404.500.000	96.20	100	100	DID



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2021

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Rehabilitasi Dam dan Tembok Pengaman Watusisik								
5	Kementerian Pekerjaan Umum	Perpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 198/PMK.07/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terhubung Langsung Dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota Keluaran : 2 Lokasi Rincian Kegiatan: Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Bondot, Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sindon, Desain perencanaan dan e-PAKSI, Pengawasan (Supervisi DI. Sindon),Pengawasa n (Supervisi DI. Bondot),Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	Kab. Magetan	Dinas PUPR	3.765.499.997	3.194.575.000	84.84	100	100	DAK
6	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 198/PMK.07/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Keluaran : 2 Lokasi Rincian Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan Mategal - Trosono	Kab. Magetan	Dinas PUPR	6.493.830.994	5.104.847.200	78.61	100	100	DAK



NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			dan Jalan Sumberagung - Plangkrongan								
7	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 198/PMK.07/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan: Pengelolaa n dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : 700 SR Rincian Kegiatan: -Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ds Lembeyan Wetan Kec Lembeyan -Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ds Mantren Kec Karangrejo - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ds Sobontoro Kec Karas - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Ds Banjarpanjang Kec Ngariboyo - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Ds Tanjungsari Kec. Panekan - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Ds Turi Kec	Kab. Magetan	Dinas PUPR	3.438.614.000	2.774.713.000	80.69	350 SR	50	DAK



NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Panekan - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kel Sarangan Kec Plaosan								
8	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 198/PMK.07/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Keluaran : 4 unit Rincian Kegiatan: - Pembangunan TPS3R Ds Lembeyan Kulon Kec Lembeyan (KSM Harapan Baru) - Pembangunan TPS3R Ds Sumberdodol Kec Panekan (KSM SUMBERDODOL ASRI) - Pembangunan TPS3R Ds Temboro Kec Karas (KSM Temboro Berseri) - Pembangunan TPS3R Kel Sarangan Kec Plaosan (KSM Sarangan Asri)	Kab. Magetan	Dinas PUPR	2.604.294.000	2.604.294.000	100	4 Unit	100	DAK
9	Kementerian Pekerjaan Umum	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor : 198/PMK.07/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan: Pengelolaa n dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	Dinas PUPR	1.200.000.000	1.200.000.000	100	135 SR	90	DAK



NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Keluaran : 150 SR Rincian Kegiatan: - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Ds. Gonggang, Kec. Poncol - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Ds. Mategal, Kec. Parang - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Ds. Ngiliran, Kec. Panekan								
10	Kementerian Keuangan	PMK No 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Pengadaan Kursi Roda Lansia)	Kab. Magetan	Dinas Sosial	72.000.000	64.214.285	89.19	16	100	
11	Kementerian Keuangan	PMK No 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keluaran : 17 kaki palsu, 21 kursi roda disabilitas	Kab. Magetan	Dinas Sosial	264.000.000	256.020.000	96.98	38	100	



3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1.											
NIHIL											

3.3 Permasalahan dan Kendala

- Tidak terdapat masalah dan kendala yang berarti.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- . Tidak terdapat masalah dan kendala yang berarti.



BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 . Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh daerah.

Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan antara lain :

- 1) Pendidikan Dasar
- 2) Pendidikan Kesetaraan
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Target Pencapaian Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	100%	2022
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2022
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2022

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan



4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah sebagaimana berikut

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2022			Keterangan
					Pembila ng	Penye but	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	83203	84694	98,24%	Jumlah Warga Kabupaten/Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, MP/MTs) _____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun
2	Pendidikan Kesenjangan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	345	345	100%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan _____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga KabupatenUsia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16630	17330	95,96%	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD _____ Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6Tahun

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain :



Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Pendidikan Dasar	104.832.965.589
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	18.595.902.903
3.	Pendidikan Kesetaraan	6.508.680.000

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain :

Tabel 4.4
Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan	Dukungan Personil
1	Pendidikan Dasar	2.654 PNS
2	Pendidikan Kesetaraan	423 PPPK
3	Pendidikan Anak Usia Dini	2.798 NON PNS

Sumber data : Dinas Dikpora Magetan

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antara lain :

- Adanya Pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi kualitas Pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP
- Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
- Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4;



Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan antara lain :

- a. Melakukan implementasi kurikulum merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran.
- b. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.
- c. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S1/D4, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru; dan mendorong pendidik maupun tenaga kependidikan untuk melanjutkan S2 pada program kerjasama antara Universitas dengan Kabupaten Magetan.
- d. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi ke daerah-daerah untuk memantau dan memotivasi program kesetaraan bagi penduduk yang belum menempuh wajib belajar 12 Tahun.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa SPM Bidang kesehatan terdiri dari 12 jenis pelayanan yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.



4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Indikator dan target capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kab. Magetan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat terlayani kesehatan	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	80



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET (%)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan pada tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET/ SASARAN	HASIL/ REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA
			(A)	(B)	(A/B)(%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	8.012	7.081	88
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	7.684	7.075	92
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	7.284	7.098	97
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	29.577	29.577	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	82.218	82.218	100



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET/ SASARAN	HASIL/ REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA
			(A)	(B)	(A/B)(%)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	380.824	372.401	98
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	154.430	151.205	98
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	211.764	188.092	89
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	13.664	13.664	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat terlayani kesehatan	1.569	1.569	100
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	6.572	6.572	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	10.671	10.671	100
Rata-Rata Prosentase Pencapaian SPM Kesehatan			96,83%		

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

Tabel 4.7



Rekapitulasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2021

Tingkat Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
A. 100 %	6	50%
A. < 100 %	6	50%
Jumlah Total	12	100%

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 12 indikator SPM bidang kesehatan, ada 6 indikator SPM (50%) bidang kesehatan yang telah memenuhi target dengan capaian sebesar 100%, dan terdapat 6 indikator SPM (50%) bidang kesehatan yang tingkat capaiannya pada tahun 2022 sebesar < 100%.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Tabel 4.8
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Guna Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja SPM	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.189.000.900	967.642.750	81,38
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	705.315.400	529.787.362	75,11
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	219.755.000	186.346.050	84,80
4	Pelayanan kesehatan balita	882.169.650	716.846.400	81,26
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	643.052.850	638.315.200	99,26
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	126.300.100	117.221.250	92,81
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	286.522.990	229.848.900	80,22
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	25.000.000	17.799.800	71,20
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	25.000.000	17.799.800	71,20



No	Indikator Kinerja SPM	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	140.834.000	112.067.250	79,57
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	182.480.000	142.941.050	78,33
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	126.660.000	114.774.500	90,62
JUMLAH		4.552.090.890	3.791.390.312	83

Sumber data: Dinas kesehatan Kab. Magetan

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Dukungan personil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2022					Kesehatan Masyarakat	Lab
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Gizi		
1	Bendo	1	11	22	1	1	1	1
2	Candirejo	2	13	18	1	1	0	1
3	Gorang-Gareng Taji	2	12	16	1	1	1	1
4	Ngariboyo	2	8	15	1	1	1	1
5	Panekan	1	14	22	1	1	1	2
6	Sidorejo	2	10	15	1	2	1	1
7	Plaosan	2	8	14	1	3	2	1
8	Sumberagung	2	10	13	1	1	1	1
9	Poncol	2	9	14	1	1	1	0
10	Parang	2	14	15	1	2	1	1
11	Kawedanan	1	15	13	1	2	1	2
12	Tladan	2	13	17	1	1	1	1
13	Lembeyan	2	13	18	1	2	1	3



No	Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2022					Kesehatan Masyarakat	Lab
		Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Gizi		
14	Takeran	2	15	22	1	2	1	1
15	Maospati	3	17	14	1	1	1	2
16	Ngujung	2	16	14	1	2	1	1
17	Tebon	3	10	16	1	2	2	1
18	Kartoharjo	3	13	19	1	1	2	2
19	Rejomulyo	2	15	15	1	2	2	2
20	Karangrejo	3	17	22	1	2	2	1
21	Taji	2	19	17	1	2	1	1
22	Sukomoro	2	13	18	1	1	1	2
Jumlah		45	285	359	22	34	26	29

*) Data per tanggal 31 Desember 2022

Sumber data: Dinas kesehatan Kab. Magetan

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam upaya pencapaian target SPM bidang kesehatan yang dilaksanakan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan selama tahun 2022, terdapat 6 indikator yang capaiannya masih <100%. Berikut kami paparkan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.

a. Permasalahan

Beberapa indikator SPM yang capaian kurang dari 100% yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standart, pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standart, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Permasalahan tidak tercapainya indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 antara lain:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart pelayanan antenatal

Capaian Kinerja pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standart pelayanan antennal masih dibawah target nasional (100%) yaitu sebesar 88 % hal ini disebabkan antara lain :

- a. Belum optimalnya kunjungan pertama kali ibu hamil ke tenaga Kesehatan sehingga kurangnya pendataan petugas, petugas tidak domisili diwilayah, pencatatan pelaporan masih lemah sehingga monev belum terlaksana dengan baik, masih terdapatnya kehamilan yang tidak diinginkan, sasaran pada ibu hamil yang berpindah.
- b. Masih terdapatnya ibu hamil yang belum memnuhi standart ANC karena kurangnya tenaga dokter, gizi dan analis Kesehatan di puskesmas, belum semua FKTP dan FKTL menerapkan



ANC terpadu sesuai standart sehingga belum terciptanya alur ANC terpadu yang efektif di Puskesmas, belum adanya regulasi pembebasan biaya untuk ANC terpadu di Puskesmas bagi sasaran yang belum punya penjaminan.

- Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 adalah :
 - a. Melaksanakan penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Gerakan ibu hamil sehat sesuai pedoman terbaru, GSI dan posyandu oleh bidan penanggungjawab desa.
 - b. Melaksanakan pembinaan pada jaringan dan jejaring oleh tim jaringan dan jejaring di wilayah kerja puskesmas
 - c. Melaksanakan kunjungan pada rumah ibu hamil sesuai dengan standar K4 dengan.
 - d. Adanya pemantauan dari Bidan Penanggung Jawab Wilayah setempat terkait perkembangan Ibu hamil melalui kunjungan rumah.
 - e. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas Dokter umum dan tenaga Kesehatan
 - f. Pelaksanaan workshop skrining layak hamil bagi petugas

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin yang sesuai standart pelayanan ibu bersalin

Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin yang sesuai standart pelayanan ibu bersalin masih dibawah target nasional (100%) yaitu sebesar 92 %, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Belum optimalnya puskesmas PONED di Kabupaten karena terbatasnya jumlahnya puskesmas PONED, Sarana dan prasarana serta tenaga Kesehatan di Puskesmas PONED belum memenuhi standart karena belum terlatih sehingga Tim PONED kurang lengkap.
- b. Masih tingginya prevalensi abortus dikabupaten karena belum terlaksananya skrining layak hamil yang baik sehingga menambah tinggi kasus kehamilan yang tidak berkualitas, kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan asuhan masa sebelum hamil, bersalin dan masa nifas.
- c. Belum optimalnya fungsi Ponkesdes diwilayah karena bidan desa tidak domisili diwilayah disebabkan karena sarana prasarana yang belum memenuhi standart.

- Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 adalah :

Melakukan Analisa untuk penambahan puskesmas PONED dikabupaten Magetan yang ditetapkan dengan SK Bupati.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan Kesehatan bayi baru lahir

Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar pelayanan Kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2022 belum mencapai target nasional (100%) dengan capaian kinerja sebesar 97 %, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa bayinya datang ke fasilitas Kesehatan pada masa neonatus apabila tidak ada keluhan/masalah.
- b. Kurangnya pendataan sasaran karena terdapat perbedaan antara sasaran riil dimasyarakat dan sasaran proyeksi dari Pusdatin Kemenkes.



- Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 adalah :
 - a. Pelayanan SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital) untuk seluruh bayi yang lahir yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr.Sutomo
 - b. Bimbingan teknis Kader Kesehatan dan Lintas Sector dalam pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.
 - c. Meningkatkan pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir dengan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan pada bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan

4. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Capaian kinerja pelayanan Kesehatan pada usia produktif pada tahun 2022 masih dibawah target nasional (100%) sebesar 98 %, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Sasaran Usia Produktif Sebagian besar tidak datang ke fasilitas khususnya pada anak sekolah.
- b. Kurangnya kemampuan petugas Kesehatan karena penjangkaran yang dilaksanakan membutuhkan ketrampilan.
- c. Kurangnya jumlah serta kemampuan kader Kesehatan remaja dalam membantu proses pelaksanaan penjangkaran dan pemeriksaan secara berkala.
- d. Kurangnya buku rapor kesehatanku, alat pemeriksaan.
- e. Kurangnya Kerjasama lintas sector dalam pelaksanaan kegiatan UKS

- Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2022 :
 - a. Pengaktifan deteksi dini factor resiko PTM kesekolah dan pondok pesantren
 - b. Melaksanakan sosialisasi kesekolah sekolah untuk mengaktifkan Kembali kegiatan UKS
 - c. Pelaksanaan kegiatan POSBINDU di sekolah dan didesa.
 - d. Meningkatkan ketrampilan petugas Kesehatan dan kader Kesehatan remaja melalui Sosialisasi

5. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pada tahun 2022 capaian kinerja pada pelayanan Kesehatan pada usia lanjut masih dibawah target nasional (100%) yaitu sebesar 98 %, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kurangnya Jumlah stik pemeriksaan seperti gula darah, kolesterol,asam urat serta blangko pemeriksaan
- b. Lansia yang resiko tinggi lebih dari 70 tahun tidak bisa berkunjung ke Fasilitas Kesehatan
- c. Jumlah lansia yang hadir terbatas
- d. Keterbatasan Lansia dengan tingkat kemandirian sehingga sulit untuk mengakses layanan kesehatan

- Solusi yang telah dilakukan pada tahun 2022 :
 - a. Penanggungjawab pelayanan kesehatan lansia Puskesmas berkoordinasi dengan penanggungjawab desa melakukan kunjungan ke rumah lansia yang sakit atau lansia yang hidup sendiri.



- b. Koordinasi dengan kader lansia tiap pos untuk mendata atau memantau kondisi lansia yang hidup sendiri atau lansia sakit
- c. Adanya dukungan sarana prasarana termasuk didalamnya blangko serta stik pemeriksaan untuk lansia
- d. Mendorong/ Menggerakkan lansia yang tidak pernah kontak dengan petugas untuk pergi ke Fasilitas Kesehatan atau Posyandu Lansia
- e. Menambah jumlah caregiver informal di masyarakat sehingga bisa membantu petugas Kesehatan dalam kunjungan rumah

6. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Pada Tahun 2022 Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standart belum mencapai target nasional (100%) yaitu sebesar 89 %, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang bahayanya penyakit Hipertensi sehingga kepatuhan minum obat dan kunjungan ke fasilitas Kesehatan masih rendah yang menyebabkan penemuan kasus baru Hipertensi tidak bertambah.

➤ Solusi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 :

- a. Petugas memberikan penyuluhan keliling tentang penyakit hipertensi
- b. Menyebarluaskan leaflet hipertensi sebagai sarana penyuluhan
- c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Penanggungjawab Keluarga Sehat dan Penanggungjawab Jaringan dan Jejaring dalam memberikan pelayanan pada penderita hipertensi
- d. Menyediakan pelayanan hipertensi di puskesmas pembantu
- e. Melaksanakan kunjungan rumah pada penderita hipertensi untuk melaksanakan pemeriksaan dan motivasi untuk kontrol secara teratur ke fasilitas Kesehatan
- f. Pengaktifan deteksi dini factor resiko PTM melalui kegiatan Posbindu PTM

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis - jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah.

Adapun SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun



target pencapaian standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum di Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.10
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari – hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	95,00 %	2022
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,67 %	2022

Sumber data : Dinas PU PR Kab. Magetan tahun 2022

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.11
Realisasi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kab. Magetan 2022

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2022			Keterangan
					Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari – hari	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan Air Bersih	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	670,812	670,812	95,00	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Jumlah Seluruh Rumah Tangga
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan Sanitasi	100 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	625,577	625,577	96,67	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah Seluruh Rumah Tangga

Sumber data : Dinas PU PR Kab. Magetan tahun 2022



4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan antara lain :

Tabel 4.12
Alokasi Dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan

No.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Alokasi Dana	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Rp. 7.376.794.000,00	Rp. 6.487.827.840,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Rp. 2.440.526.950,00	Rp. 2.393.347.396,00

Sumber data : Dinas PU PR Kab. Magetan tahun 2022

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM.

Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.13
Personel Pendukung pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari – hari	10 PNS
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	10 PNS

Sumber data : Dinas PU PR Kab. Magetan tahun 2022

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak ditemui permasalahan yang berarti.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi



program pemerintah kabupaten

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.14
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan

	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	10	Desember 2022
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0

Sumber data : Dinas Perkim Kab. Magetan tahun 2022

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Adapun Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.15
Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan Tahun 2021

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021			Keterangan
					Pembi lang	Peny ebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan	10	10	0	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021			Keterangan
					Pembi lang	Peny ebut	Nilai	
	yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	rumah layak huni		Permukiman				layak huni Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten korban bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten

Sumber data : Dinas Perkim Kab. Magetan tahun 2022

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

Tabel 4.16
Alokasi Dana Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Alokasi Dana
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Rp. 250.000.000,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	

Sumber data : Dinas Perkim Kab. Magetan tahun 2022



4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah :

Tabel 4.17
Jumlah personil pada Standar Pelayanan Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	6 PNS
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	

Sumber data : Dinas Perkim Kab. Magetan tahun 2022

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

- 1) Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal
- 2) Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

- 1) Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD
- 2) Memasukan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- c. Pelayanan informasi rawan bencana ;
- d. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi Korban bencana ;

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 4.18
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target RKPD 2021	Target Akhir RPJMD (2023)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	100 %	100 %
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Laporan Peristiwa Kebakaran yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu 15 Menit	100 %	100 %
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	65 %	70 %
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25 %	30 %
5	Pelayanan	Persentase warga negara yang	100 %	100 %



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target RKPD 2021	Target Akhir RPJMD (2023)
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		

Sumber : Satpol PP Damkar dan BPBD Kab. Magetan

4.5.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD	Tahun 2021			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Tindak Lanjut Terhadap Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum	Pol PP dan Damkar	100 %	100 %	100 %	
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Laporan Peristiwa Kebakaran yang Ditindaklanjuti Dalam Kurun Waktu 15 Menit	Pol PP dan Damkar	100 %	71 %	71 %	
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	BPBD	65 %	89,71 %	138,02 %	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi jenis ancaman bencana dibagi seluruh penduduk di kawasan rawan bencana
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD	25 %	25,52 %	102,12 %	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi seluruh penduduk di kawasan rawan bencana



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD	Tahun 2021			Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD	100 %	100 %	100 %	Jumlah korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah korban keseluruhan dari bencana dalam satu tahun

Sumber : Satpol PP Damkar dan BPBD Kab. Magetan

4.5.4 Alokasi Anggaran

Merupakan anggaran yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang Perlindungan Masyarakat Antara lain :

Tabel 4.19
Alokasi Dana Bidang
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Alokasi Dana
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	852.896.670
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.318.362.000
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	35.000.000
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	318.150.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	84.077.500

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan

4.5.5 Dukungan Personil

Jumlah personil Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan adalah 102 Orang. Adapun dukungan personil pada Sub Urusan Bencana antara lain :



Jumlah personil pada Standar Pelayanan Sub Urusan Bencana
Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Dukungan Personil
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	15 ASN
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	40 NON ASN
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

Sumber : BPBD Kab. Magetan

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

Permasalahan :

- Belum adanya sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga PPNS yang ada masih tersebar di berbagai OPD.
- Belum diaktifkannya unit Satpol PP di wilayah kecamatan sehingga penegakan perda di masing -masing wilayah kecamatan belum optimal.
- Kurangnya Jumlah unit pembantu / posko di setiap wilayah manajemen kebakaran sehingga menyebabkan penanganan pemadaman kebakaran di wilayah tertentu kurang optimal sehingga tidak memenuhi respon time 15 menit.

Solusi :

- Satpol PP dan Pemadam kebakaran akan membentuk sekretariat PPNS serta penyatuan beberapa personil PPNS yang ada di beberapa OPD, diharapkan bisa mempermudah koordinasi dan dapat berjalan secara optimal dalam melaksanakan tupoksinya.
- Mengoptimalkan linmas desa dan mengaktifkan unit Satpol PP di wilayah kecamatan.
- Menambah jumlah unit pembantu/posko damkar di Magetan bagian Selatan yakni area kecamatan Parang dan sekitarnya.

Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Sub Urusan Bencana antara lain:

- Indikator 2.1, Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan capaian sebesar 89,71 % dari target yang ditetapkan sebesar 65 % pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 138,02%. Berdasarkan persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2022 sudah melebihi dari target yang ditentukan baik pada tahun tersebut dan pada akhir periode RPJMD, walaupun sudah melebihi target yang ditentukan namun tetap memberikan layanan penyebaran informasi rawan bencana



kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana serta melibatkan Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam pelaksanaannya.

- b. Indikator 2.2, Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana menunjukkan capaian pada tahun 2022 sebesar 25,52 % dari target yang ditetapkan sebesar 25 %. Namun untuk menuju capaian target 30 % pada akhir periode RPJMD, masih membutuhkan capaian sebesar 5%. Hal tersebut disebabkan karena selama ini fokus layanan pencegahan dan kesiapsiagaan ditujukan kepada aparaturnya dan para pelaku penanganan bencana dan baru sedikit sekali menyentuh kepada masyarakat secara langsung utamanya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- c. Indikator 2.3, Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana masih dibawah target 100%. Permasalahan ini disebabkan karena adanya keterbatasan data dan informasi yang diterima oleh aparaturnya dalam hal laporan kejadian bencana, sehingga ada beberapa kejadian bencana yang ditangani secara swadaya oleh masyarakat dan perangkat daerah terkait penanganan bencana.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana antara lain :

- a. Penambahan sarana dan prasarana atau media informasi guna mempermudah dan memperluas penyebaran informasi rawan bencana kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana serta melibatkan Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam pelaksanaannya;
- b. Mengintensifkan kegiatan komunikasi dan edukasi bencana kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana;
- c. Meningkatkan intensitas pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana seperti Pelaksanaan Gladi, Simulasi, Pembentukan/ Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di masing-masing wilayah serta meningkatkan kapasitas aparaturnya/ pelaku penanggulangan bencana.
- d. Pengintegrasian layanan *public service center* sebagai sebuah *call center* berbagai macam pelaporan masyarakat, baik berupa laporan bencana, laporan kecelakaan, laporan kebakaran, laporan tindak kejahatan dan laporan-laporan lainnya dengan melibatkan perangkat daerah/ lembaga teknis terkait guna mempercepat pelayanan terhadap setiap gangguan yang ada di masyarakat.



4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial antara lain :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Adapun target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kab. Magetan adalah :

Tabel 4.20
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial
Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	45,80	2022
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100	2022
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	41,25	2022
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100	2022
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala	100	2022



	tanggap darurat bencana bagi	kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat		
--	------------------------------	--	--	--

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Magetan Tahun 2021

4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan adalah :

Tabel 4.21

Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan Tahun 2021

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021			Keterangan
					Pembi lang	Penyeb ut	Nilai %	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	Dinas Sosial	919	3.884	23,66	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi Jumlah penyandang disabilitas terlantar terlantar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100%	Dinas Sosial	65	65	100	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah anak terlantardi seluruh wil Kabupaten Magetan
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100%	Dinas Sosial	1.334	1.334	100	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah lanjut usia terlantar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai Nasional (2025)	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2021			Keterangan
					Pembi lang	Penyeb ut	Nilai %	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase (%) tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100%	Dinas Sosial	58	58	100	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di seluruh wilayah Kabupaten Magetan
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	Dinas Sosial	400	400	100	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Magetan Tahun 2022

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan adalah :



Tabel 4.22

Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan Tahun 2021

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Alokasi Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	2.495.700.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	

Sumber data : Dinas Sosial Kab. Magetan Tahun 2022

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Adapun dukungan personel Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kab. Magetan adalah :

Tabel 4.23

Dukungan Personel Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Kab. Magetan Tahun 2022

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	47 personil
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi	44 personil

Sumber : Dinas Sosial Kab. Magetan Kab. Magetan



4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial antara lain :

- a. Masih tingginya jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya
- b. Tingginya jumlah penyandang disabilitas (cacat) yang belum mendapat jangkauan pelayanan sosial sesuai spesifikasi kecacatannya baik pelayanan primer maupun sekunder meliputi pelayanan kebutuhan pokok dan pelayanan peningkatan SDM.
- c. Masih banyaknya Lanjut Usia Terlantar yang belum mendapatkan pelayanan sosial.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Sosial adalah dengan Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial seperti UCP Roda Kemanusiaan maupun lembaga pemerintah pusat maupun provinsi seperti Balai Rehabilitasi Cacat Mental, Rehabilitasi Cacat Daksa, Panti Wreda dll, serta mengusulkan bantuan sosial Jaminan Sosial Cacat Berat kepada Pemerintah Propinsi dan Kemensos RI.



BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 merupakan tolok ukur capaian kinerja Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dimana LPPD ini juga memuat keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dicapai termasuk permasalahan yang belum mendapatkan penyelesaian selama satu tahun anggaran.

Keberhasilan capaian program dan kegiatan merupakan komitmen dan konsistensi semua pihak baik aparatur Pemerintah Daerah, unsur Forkopimda, para anggota DPRD dan partisipasi masyarakat. Perhargaan yang setinggi tingginya disampaikan kepada semua pihak atas kerjasama yang baik sehingga seberat apapun tantangan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, yang muaranya dapat tercipta suasana Magetan yang kondusif, tenteram damai dan penuh rasa kekeluargaan. Saran dan masukan sangat diharapkan sehingga akan menjadikan bekal dalam penyempurnaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya kami berharap, laporan ini bisa jadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam memberikan penilaian atas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat selama Tahun 2022.

Magetan, Maret 2023

BUPATI MAGETAN

Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si